



**PEMERINTAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

**LAPORAN KINERJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TAHUN ANGGARAN 2022

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kami sampaikan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 telah dapat diselesaikan sebagaimana target waktu yang sudah ditentukan. LKjIP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 merupakan Laporan Kinerja tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap Bupati/walikota wajib menyusun laporan Kinerja tahunan pemerintah Kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan ini juga merupakan media akuntabilitas yang menjelaskan pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai pengguna sumber daya dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah serta menginformasikannya kepada masyarakat terkait dengan pencapaian sasaran strategis yang diukur dengan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan selama tahun 2022.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat berbagai hal yang memerlukan penyempurnaan, baik dalam aspek penulisan, data-data dan materi laporan. Maka dari itu kami mengharapkan adanya informasi-informasi berupa saran dan masukan, koreksi serta kritikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang.



Akhirnya kami sampaikan penghargaan dan terima kasih, kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan laporan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah untuk meningkatkan kualitas kinerja dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan guna mewujudkan Visi Kabupaten Pesisir Selatan “ **Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional** ”. Amin

Pada, Maret 2023
BUPATI PESISIR SELATAN

Drs. RUSMA YULANWAR, M.Pd

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan good governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, serta memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran yang dapat diukur, diuji dan dipertanggungjawabkan.

Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan misi yang diemban dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2022 sebagai berikut :

MISI 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratif dan Transparan.

Pencapaian Kinerja untuk 3 (tiga) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 1 sebesar 99,26%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik**. Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 1

NO.	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2022			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
MISI 1 : Memperkuat tata kelola, pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan							
Tujuan 1 : Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkinerja tinggi							
1.1.1	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	tanpa satuan	WTP	WTP	100
		2.	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	tanpa satuan	B (70,00)	68,97	98,53
		3.	Skor Nilai LPPD	tanpa satuan	32150	3,1433	97,77
		4.	Level Maturitas SPIP Pemda	tanpa satuan	3 (3,0057)	3,0000	99,81
1.1.2	Meningkatnya kapasitas birokrasi	1.	Indek Kelembagaan	tanpa satuan	P-3 (Cukup Efektif)	N/A	-
		2.	Indeks SPBE	tanpa satuan	3.20	3,48	108,75

		3.	Indek Inovasi	tanpa satuan	6,300	N/A	-
		4.	Indeks Profesionalitas ASN	tanpa satuan	62	49,93	80,53
1.1.3	Meningkatnya keterbukaan informasi dan pelayanan publik	1.	Kategori keterbukaan informasi publik	tanpa satuan	93 (Informatif)	99,92	107,44
		2.	Indeks Kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik	tanpa satuan	82	82,65	100,79
Rata-rata Capaian Kinerja Misi 1							99.26

MISI 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat

Pencapaian Kinerja untuk 4 (empat) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 2 sebesar 103,32%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik** dengan rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 2

NO.	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2022			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
MISI 2 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat							
Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat							
2.1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat	1.	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup	8	9	87,50
		2.	Angka Kematian Ibu	Per 1.000 kelahiran hidup	95	144	48,42
		3.	Prevalensi stunting	persen	10,92	7	135,90
		4.	Angka Kesakitan	persen	15,95	15,16	95,05
2.1.2	Meningkatnya perlindungan kesehatan masyarakat	1	Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan	persen	80	79	98,75
Tujuan 2 : Meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat							
2.2.1	Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat	1.	Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	53	66,21	124,92

2.2.2	Meningkatnya ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin	1.	Pencapaian skor pola pangan harapan	skor	87	80,4	92,41
		2.	Pengeluaran per kapita	Rp./org/thn	9.369.000	9.686.000	103,38
Rata-rata Capaian Kinerja Misi 2							103.32

MISI 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah

Pencapaian Kinerja untuk 5 (lima) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 3 sebesar 129,39%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik** dengan rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 3

NO	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2022		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
MISI 3 : Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah						
Tujuan 1 : Meningkatnya pertumbuhan dan ekonomi secara berkelanjutan						
3.1.1	Meningkatnya investasi PMA dan PMDN	1. Nilai investasi swasta dan masyarakat	juta Rp.	310.000	679.234	219,11
3.1.2	Meningkatnya PDRB sektor unggulan	1. Nilai PDRB sektor Pertanian (ADHK)	TriliunRp	3,61	3,74	103,60
		2. Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Milyar Rp.	707,32	741,26	104,80
3.1.3	Menurunnya pengangguran	1. Tingkat pengangguran terbuka	persen	6,85	4,61	132,70
3.1.4	Meningkatnya kualitas infrastruktur	1. Persentase jalan kabupaten kondisi	persen	31,90	32,34	101,38
		2. Rasio konektivitas	persen	57,00	58,00	101,75
		3. Proporsi lahan sawah beririgasi baik	persen	59,20	59,49	100,49
3.1.5	Terjaminnya kelestarian lingkungan	1. Indek kualitas lingkungan hidup	tanpa satuan	86,85	77,94	89,74
Rata-rata Capaian Kinerja Misi 3						129.39

MISI 4 : Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan

Pencapaian Kinerja untuk 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 4 sebesar 89,07%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik** dengan rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 4

NO.	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2022			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
MISI 4 : Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan							
Tujuan 1 : Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif bagi kesejahteraan masyarakat							
4.1.1	Pesisir Selatan menjadi daerah tujuan wisata favorit di pantai barat Indonesia	1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	1.200.000	942.240	78,52
		2	Lama tinggal wisatawan	Hari	1,25	1,25	100,00
4.1.2	Berkembangnya ekonomi kreatif	1	Jumlah omset usaha ekonomi kreatif	Milyar Rp.	18	16	88,89
Rata-rata Capaian Kinerja Misi 4							89.07

MISI 5 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing

Pencapaian Kinerja untuk 4 (empat) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 5 sebesar 136,04%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik** Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel. 5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 5

NO.	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2022			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
MISI 5 : Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing							
Tujuan 1 : Terwujudnya pendidikan yang berkualitas							
5.1.1	Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan	1.	Harapan lama sekolah	tahun	13,40	13,35	99,63
		2.	Rata-rata lama sekolah	tahun	8,32	8,43	101,32

5.1.2	Meningkatnya daya saing pendidikan	1.	Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat propinsi	orang	4	2	50,00
		2.	Indek Pembangunan literasi	tanpa satuan	6,643	7,172	107,96
Tujuan 2 : Terwujudnya SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing							
5.2.1	Meningkatnya pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	1.	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	persen	96,50	75,5	78,24
		2.	Tingkat partisipasi subuh berjamaah dimesjid/mushola	tanpa satuan	Rendah (≤10 orang)	Tinggi (≥35 orang)	350,00
5.2.2	Meningkatnya SDM kreatif dan berdaya saing	1.	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional	orang	10	17	170,00
		2.	Jumlah wirausahawan yang berdaya saing	orang	500	656	131,20
Rata-rata Capaian Kinerja Misi 5							136,04

MISI 6 : Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenram dan Dinamis

Pencapaian Kinerja untuk 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 6 sebesar 73,20%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Baik**. Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel. 6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 6

NO.	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2022			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
MISI 6 : Mewujudkan kondisi yang aman, tenram dan dinamis							
Tujuan 1 : Terciptanya kondisi masyarakat Pesisir Selatan yang aman							
6.1.1	Terwujudnya keluarga bahagia	1.	Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	persen	0,0008	0,0058	72,50
		2.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen	91,0944	91,7179	100,68
6.1.2	Meningkatnya partisipasi masyarakat	1.	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	orang	56,93	53,39	93,78



	dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri	2	Jumlah Nagari tanggu Bencana	tanpa satuan	Pratama (182) Madya (0) Utama (0)	47	25,82
Rata-rata Capaian Kinerja Misi 6							73.20

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I	
PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Maksud Tujuan.....	I-1
1.3 Dasar Hukum.....	I-2
1.4 Gambar Umum Kabupaten Pesisir Selatan	I-2
1.5 Strukur Organisasi	I-5
1.6 Kepegawaian	I-7
1.7 Sistematika Penyusunan.....	I-9
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	II-1
2.1 Rencana Strategis Kabupaten Pesisir Selatan.....	II-1
2.1.1 Visi.....	II-1
2.1.2 Misi.....	II-2
2.1.3 Misi, Tujuan dan Sasaran	II-2
2.2 Perjanjian Kinerja.....	II-3
2.3 Indikator Kinerja Utama.....	II-5
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1. Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja	III-1
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja.....	III-2
3.3. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.....	III-5
3.4. Akuntabilitas Keuangan	III-101
BAB IV	
PENUTUP	IV-1
4.1. Kesimpulan.....	IV-1
4.2. Saran.....	IV-1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.....	I-3
Tabel	1.2	Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Kecamatan Tahun 2021-2022.....	I-4
Tabel	1.3	Data Jumlah PNS Kab. Pesisir Selatan Tahun 2020-2022 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	I-8
Tabel	1.4	Komposisi Sumber Daya Aparatur Pemda Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan jenjang Pendidikan Tahun 2020-2022.....	I-8
Tabel	2.1	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	II-2
Tabel	2.2	Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.	II-3
Tabel	2.3	Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian Tahun 2022 Kabupaten Pesisir Selatan.....	II-5
Tabel	3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022.....	III-2
Tabel	3.2	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kab.Pesisir Selatan Tahun 2022.....	III-3
Tabel	3.3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.....	III-6
Tabel	3.4	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Penilaian LKD (Opini BPK) Tahun 2022.....	III-7
Tabel	3.5	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2022.....	III-9
Tabel	3.6	Realisasi Kualifikasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019-2020.....	III-10
Tabel	3.7	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022.....	III-11
Tabel	3.8	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Skor Nilai LPPD Tahun 2022.....	III-19
Tabel	3.9	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP Tahun 2022.....	III-21
Tabel	3.10	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2	III-23
Tabel	3.11	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks SPBE Tahun 2022.....	III-29
Tabel	3.12	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesional ASN Tahun 2022.....	III-30
Tabel	3.13	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3	III-34
Tabel	3.14	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kategori Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022.....	III-36
Tabel	3.15	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Publik Tahun 2022.....	III-38



Tabel	3.16	IKM atas masing-masing unsur pelayanan Tahun 2021.....	III-40
Tabel	3.17	Capain Indikator Kinerja sasaran strategis 4.....	III-43
Tabel	3.18	Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.....	III-43
Tabel	3.19	Jumlah Kematian Bayi Per Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2022.....	III-43
Tabel	3.20	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Angka Kematian Bayi Tahun 2022.....	III-44
Tabel	3.21	Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.....	III-46
Tabel	3.22	Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 s/d 2022.....	III-46
Tabel	3.23	Jumlah Kematian Ibu Per Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2022.....	III-46
Tabel	3.24	Realisasi Prevalensi Stunting di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2022.....	III-48
Tabel	3.25	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Prevalensi Stunting Tahun 2022.....	III-48
Tabel	3.26	Realisasi Angka Kesakitan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2022.....	III-49
Tabel	3.27	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Angka Kesakitan Tahun 2022.....	III-50
Tabel	3.28	Capain Indikator Kinerja sasaran strategis 5.....	III-50
Tabel	3.29	Realisasi Indikator Persentase Masyarakat yang Terlindungi Hak Layanan Kesehatan Tahun 2020-2022.....	III-51
Tabel	3.30	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Masyarakat yang Terlindungi Hak Layanan Kesehatan Tahun 2021.....	III-51
Tabel	3.31	Capain Indikator Kinerja sasaran strategis 6.....	III-52
Tabel	3.32	Data Perkembangan Realisasi PPKS yang memperoleh Bantuan 2020-2022	III-54
Tabel	3.33	Capain Indikator Kinerja sasaran strategis 7.....	III-55
Tabel	3.34	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2022.....	III-57
Tabel	3.35	Perkembangan Ketersediaan Pangan, Konsumsi Pangan dan Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2022	III-57
Tabel	3.36	Perbandingan Skor PPH Kabupaten Pesisir Selatan dengan Skor Maksimal PPH (tahun 2020,2021,2022).....	III-57
Tabel	3.37	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Pengeluaran Perkapita Tahun 2022.....	III-58
Tabel	3.38	Realisasi Pengeluaran PerkapitaTahun 2020-2022.....	III-59
Tabel	3.39	Capain Indikator Kinerja sasaran strategis 8.....	III-60
Tabel	3.40	Perkembangan nilai investasi di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2022	III-61



Tabel	3.41	Capain Indikator Kinerja sasaran strategis 9.....	III-63
Tabel	3.42	Capain Indikator Kinerja Sub.Sektor Pertanian	III-64
Tabel	3.43	Jumlah Populasi Ternak Tahun 2021-2022 di Kabupaten Pesisir Selatan	III-68
Tabel	3.44	Jumlah Populasi Ternak Unggas Tahun 2021 s.d 2022 di Kabupaten Pesisir Selatan	III-69
Tabel	3.45	Jumlah Produksi Daging Tahun 2020 s.d 2022 di Kabupaten Pesisir Selatan	III-70
Tabel	3.46	Jumlah Populasi Telur Tahun 2020 s.d 2022 di Kabupaten Pesisir Selatan	III-73
Tabel	3.47	Perkembangan Produksi Ikan Tahun 2020-2022 di Kabupaten Pesisir Selatan	III-74
Tabel	3.48	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	III-74
Tabel	3.49	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK) 3 Tahun terakhir (2020 s.d 2022).....	III-78
Tabel	3.50	Capain Indikator Kinerja sasaran strategis 10.....	III-80
Tabel	3.51	Realisasi dan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2022.....	III-81
Tabel	3.52	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2022.....	III-82
Tabel	3.53	Capain Indikator Kinerja sasaran strategis 11.....	III-84
Tabel	3.54	Panjang Jalan Kabupaten berdasarkan jenis dan kondisi jalan Tahun 2020-2022.....	III-85
Tabel	3.55	Target dan Realisasi Jalan Kondisi baik Tahun 2020-2022.....	III-85
Tabel	3.56	Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Jalan Kondisi Baik Tahun 2022.....	III-86
Tabel	3.57	Jenis, kondisi status Jalan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2022.....	III-87
Tabel	3.58	Realisasi dan Capaian Indikator Rasio Konektivitas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.....	III-89
Tabel	3.59	Realisasi Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Tahun 2020-2022.....	III-90
Tabel	3.60	Indikator Bidang Irigasi Tahun 2020-2022.....	III-93
Tabel	3.61	Capaian Kinerja Indikator Proposi Lahan Sawah Beririgasi Baik Tahun 2021 s.d 2022.....	III-93
Tabel	3.62	Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Proporsi Lahan saawah Beririgasi Baik Tahun 2022.....	III-94
Tabel	3.63	Capain Indikator Kinerja sasaran strategis 12.....	III-97
Tabel	3.64	Titik Pantau Pengambilan Sampel Pemantauan Kualitas Air Tahun 2022.....	III-99
Tabel	3.65	Perkembangan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020–2022.....	III-101
Tabel	3.66	Capain Indikator Kinerja sasaran strategis 13.....	III-104
Tabel	3.67	Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Pesisir Selatan	

		Tahun 2022.....	III-104
Tabel	3.68	Realisasi dan Capaian Indikator Peningkatan Jumlah Wisatawan Tahun 2022.....	III-105
Tabel	3.69	Realisasi Capaian Kinerja Jumlah Wisatawan Tahun 2020-2022.....	III-105
Tabel	3.70	Perbandingan realisasi Capaian Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2022 dengan standar provinsi Tahun 2020 – 2022.....	III-105
Tabel	3.71	Realisasi dan Capaian Indikator Lama Tinggal Wisatawan Tahun 2022 di Kabupaten Pesisir Selatan.....	III-108
Tabel	3.72	Realisasi Indikator Kinerja Lama Tinggal Wisatawan Tahun 2020-2022.....	III-108
Tabel	3.73	Perbandingan realisasi Capaian Indikator Lama Tinggal Wisatawan Tahun 2022 dengan standar provinsi Tahun 2020 – 2022.....	III-109
Tabel	3.74	Capain Indikator Kinerja sasaran strategis 14.....	III-110
Tabel	3.75	Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Omset Usaha Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2022.....	III-111
Tabel	3.76	Capain Indikator Kinerja sasaran strategis 15.....	III-114
Tabel	3.77	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2022.....	III-114
Tabel	3.78	Perkembangan Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2020-2022.....	III-115
Tabel	3.79	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2022.....	III-115
Tabel	3.80	Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2020-2022.....	III-116
Tabel	3.81	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Rata rata Lama Sekolah Tahun 2022.....	III-118
Tabel	3.82	Perkembangan Indikator Kinerja Rata rata Lama Sekolah Tahun 2020-2022.....	III-118
Tabel	3.83	Perbandingan Rata rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2020-2022.....	III-119
Tabel	3.84	Capain Indikator Kinerja sasaran strategis 16.....	III-119
Tabel	3.85	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Tenaga Pendidik dan Siswa yang berprestasi minimal tingkat propinsi Tahun 2022.....	III-120
Tabel	3.86	Jumlah Guru Se-Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.....	III-121
Tabel	3.87	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja.....	III-121
Tabel	3.88	Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	III-122
Tabel	3.89	Perbandingan APK di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dan Nasional.....	III-122
Tabel	3.90	Perbandingan APM di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dan Nasional.....	III-123
Tabel	3.91	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 2022.....	III-124
Tabel	3.92	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menurut jenis pengunjung	

		Tahun 2022.....	III-124
Tabel	3.93	Jumlah Perpustakaan menurut jenis perpustakaan dan kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.....	III-125
Tabel	3.94	Jumlah Buku Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menurut jenis buku Tahun 2022.....	III-125
Tabel	3.95	Hasil Perhitungan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	III-126
Tabel	3.96	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Indek Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2020-2022.....	III-127
Tabel	3.97	Capain Indikator Kinerja sasaran strategis 17.....	III-128
Tabel	3.98	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Potensi Zakat yang dikelola BAZ Tahun 2022.....	III-129
Tabel	3.99	Realisasi Penerimaan Zakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2022.....	III-130
Tabel	3.100	Program Kerja BAZ Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Program BAZNAS Tahun 2022.....	III-130
Tabel	3.101	Realisasi dan Capaian Indikator Tingkat Partisipasi Subuh Berjamaah di Mesjid/Mushola Tahun 2022.....	III-131
Tabel	3.102	Jumlah Masjid berdasarkan Tipologi di Kabupaten Pesisir Selatan.....	III-131
Tabel	3.103	Jumlah Mushalla berdasarkan Tipologi di Kabupaten Pesisir Selatan.....	III-131
Tabel	3.104	Capain Indikator Kinerja sasaran strategis 18.....	III-132
Tabel	3.105	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Propinsi dan Nasional Tahun 2022.....	III-132
Tabel	3.106	Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2022.....	III-133
Tabel	3.107	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 3 Tahun terakhir (2020 s.d 2022).....	III-134
Tabel	3.108	Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.....	III-135
Tabel	3.109	Data Pengelola Organisasi Kepemudaan yang mendapatkan Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan.....	III-136
Tabel	3.110	Daftar Cabang Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.....	III-136
Tabel	3.111	Dokumentasi Prestasi yang diperoleh pada Tahun 2022....	III-138
Tabel	3.112	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah wirausahawan yang berdaya saing Tahun 2022.....	III-139
Tabel	3.113	Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan cabang industry Tahun 2022.....	III-139
Tabel	3.114	Data Hotel/ Penginapan/ Villa/Home Stay Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.....	III-140
Tabel	3.115	Capain Indikator Kinerja sasaran strategis 19.....	III-141
Tabel	3.116	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga Tahun 2022.....	III-142



Tabel	3.117	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 3 Tahun terakhir (2020 s.d 2022)	III-142
Tabel	3.118	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2022.....	III-144
Tabel	3.119	Realisasi dan Capaian Indikator Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2022.....	III-144
Tabel	3.120	Perbandingan Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni dengan kabupaten/kota lain pada tahun 2020-2022	III-146
Tabel	3.121	Capain Indikator Kinerja sasaran strategis 20.....	III-148
Tabel	3.122	Realisasi dan Capaian Indikator Indek Pemberdayaan Gender di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.....	III-149
Tabel	3.123	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Nagari Tangguh Bencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022..	III-151
Tabel	3.124	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 3 Tahun terakhir (2020 s.d 2022).....	III-151
Tabel	3.125	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang Sasaran Strategis.....	III-153

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.....	I-5
Gambar 1.2	Komposisi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2022.....	I-8
Gambar 1.3	Komposisi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Berdasarkan Pendidikan Tahun Tahun 2020-2022.....	I-9
Gambar 3.1	Pencapaian Nilai SPBE dari tahun 2018 – 2022.....	III-24
Gambar 3.2	Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar.....	III-54
Gambar 3.3	Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2022.....	III-59
Gambar 3.4	Jumlah Produksi Daging di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2022.....	III-70
Gambar 3.5	Produksi Telur Tahun 2020 s.d 2022 di Kabupaten Pesisir Selatan.....	III-73
Gambar 3.6	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020 s.d. 2022.....	III-82
Gambar 3.7	Target dan realisasi per tahun jalan kondisi baik Tahun 2020-2022.....	III-86
Gambar 3.8	Peningkatan Jalan Ruas Cimpu Sei-Sirah, Kec. Sutera Tahun 2022	III-87
Gambar 3.9	Peningkatan Jalan Labuhan Tanjak – Sei Sirah Hilir Kec. Pancung Soal Tahun 2022.....	III-87
Gambar 3.10	Peningkatan Rasio Konektivitas tahun 2020-2022.....	III-90
Gambar 3.11	Perbandingan Rasio Konektivitas Kab. Pesisir Selatan dengan Provinsi dan Nasional.....	III-91
Gambar 3.12	Proporsi Sawah Beririgasi di Kabupaten Pesisir Selatan.....	III-94
Gambar 3.13	Bendung DI. Sei. Kuyung Pancung Soal (2022).....	III-95
Gambar 3.14	DI. Sawah Liek (2022).....	III-96
Gambar 3.15	Perbaikan Sayap Bendung Daerah Irigasi (DI) Damar Rumput	III-96
Gambar 3.16	Rehabilitasi Saluran DI. Damar Rumput.....	III-97
Gambar 3.17	Pengujian Kualitas Air di Laboratorium UPD Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan.....	III-100
Gambar 3.18	Kontribusi Usaha Ekonomi Kreatif terhadap Perekonomian Nasional.....	III-111
Gambar 3.19	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan.....	III-115



Gambar 3.20	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.....	III-126
Gambar 3.21	Piagam Penghargaan Kabupaten Layak Anak Peringkat Madya Tahun 2022 di Jakarta 23 Juli 2022 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	III-143
Gambar 3.22	Perkembangan Indikator Indek Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 s.d. 2022.....	III-149

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau yang disingkat dengan LKjIP Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 merupakan Laporan realisasi hasil penyelenggaraan pemerintahan tahun kedua dari lima tahun perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Dokumen RPJMD ini merupakan landasan utama yang mengarahkan seluruh penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah. Penyusunan LKjIP ini sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Proses penyusunan LKjIP dilakukan pada setiap akhir tahun sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi dan tujuan organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu satu tahun dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Selaian itu, dokumen ini juga memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

Informasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKJIP menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKJIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 disusun mengacu kepada peraturan perundangundangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026.

1.4. GAMBARAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

A. Kondisi Geografis Daerah

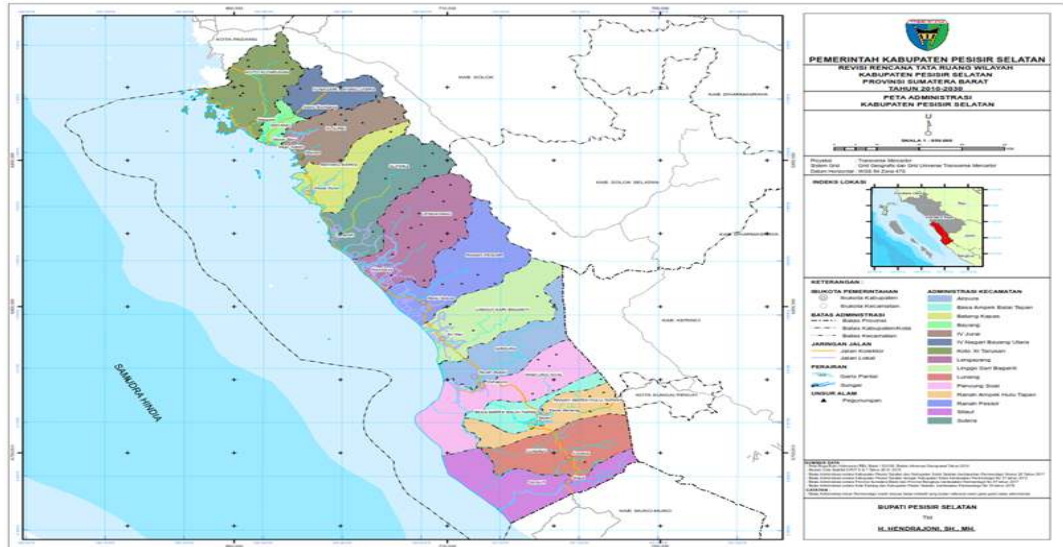
Kabupaten Pesisir Selatan terletak di wilayah pantai barat Pulau Sumatera, sebelah Timur berbatasan dengan deretan pegunungan Bukit Barisan, sedangkan di sebelah Barat berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia. Kota Painan sebagai Ibu Kota Kabupaten Pesisir Selatan, berjarak 78 Km dari Kota Padang–Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Pesisir Selatan juga merupakan gerbang Selatan Provinsi Sumatera Barat, karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Muko-Muko di Provinsi Bengkulu dan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi. Secara astronomis Kabupaten Pesisir Selatan terletak di $0^{\circ} 57' 31, 21''$ LS - $2^{\circ} 28' 42, 32''$ LS dan $100^{\circ} 17' 48,64$ BT - $101^{\circ} 17' 34,3$ BT.

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki wilayah terluas di provinsi Sumatera Barat, yaitu $\pm 6.049,34$ km², atau 14,22 % dari luas Provinsi Sumatera Barat. Pesisir Selatan secara administratif berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Padang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu

- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan (Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh) Provinsi Jambi.

B. Wilayah Administratif



Pada tahun 2022, bentuk wilayah administratif Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 wilayah Kecamatan, 182 Nagari dan 480 kampung. Secara rinci jumlah nagari dan kampung per kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah Kampung	Luas Wilayah	
				(Km2)	(%)
1	Koto XI Tarusan	23	51	437,37	7,71
2	Bayang	17	45	80,92	3.34
3	IV Nagari Bayang Utara	6	17	242,33	0.01
4	IV Jurai	20	52	368,19	0.09
5	Batang Kapas	9	29	277,54	5.59
6	Sutera	12	32	569,81	4.42
7	Lengayang	9	45	632,96	4.46
8	Ranah Pesisir	10	27	562,44	3.30
9	Linggo Sari Baganti	16	43	557,66	2.22
10	Air Pura	10	20	380,10	2.28
11	Pancung Soal	10	24	547,41	0.05
12	Basa Ampek Balai Tapan	10	22	187,46	1.10
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	10	18	281,96	6.60
14	Lunang	10	28	456,73	5.55
15	Silaut	10	27	466,45	7.71
JUMLAH		182	480	6.049,33	100,00

Sumber : Pesisir Selatan Dalam Angka, 2022

C. Kondisi Demografis

Demografi atau ilmu kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan. Sedangkan kondisi demografis ialah informasi kependudukan suatu wilayah atau kondisi masyarakat dalam suatu wilayah yang meliputi ukuran, struktur, distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian dan migrasi.

Pada tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan adalah 516.518 jiwa yang terdiri dari 260.118 laki-laki dan 256.400 perempuan dengan rasio jenis kelamin 101,45. Tingkat kepadatan penduduk Pesisir Selatan tahun 2022, sebesar 85,38 orang per km². Kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Bayang mencapai 531,43 orang per km², sedangkan yang paling rendah terdapat di Silaut yaitu sekitar 34,63 orang per km². Berikut jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu dari tahun 2021 sampai tahun 2022 yang dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2
Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Kecamatan
Tahun 2021-2022

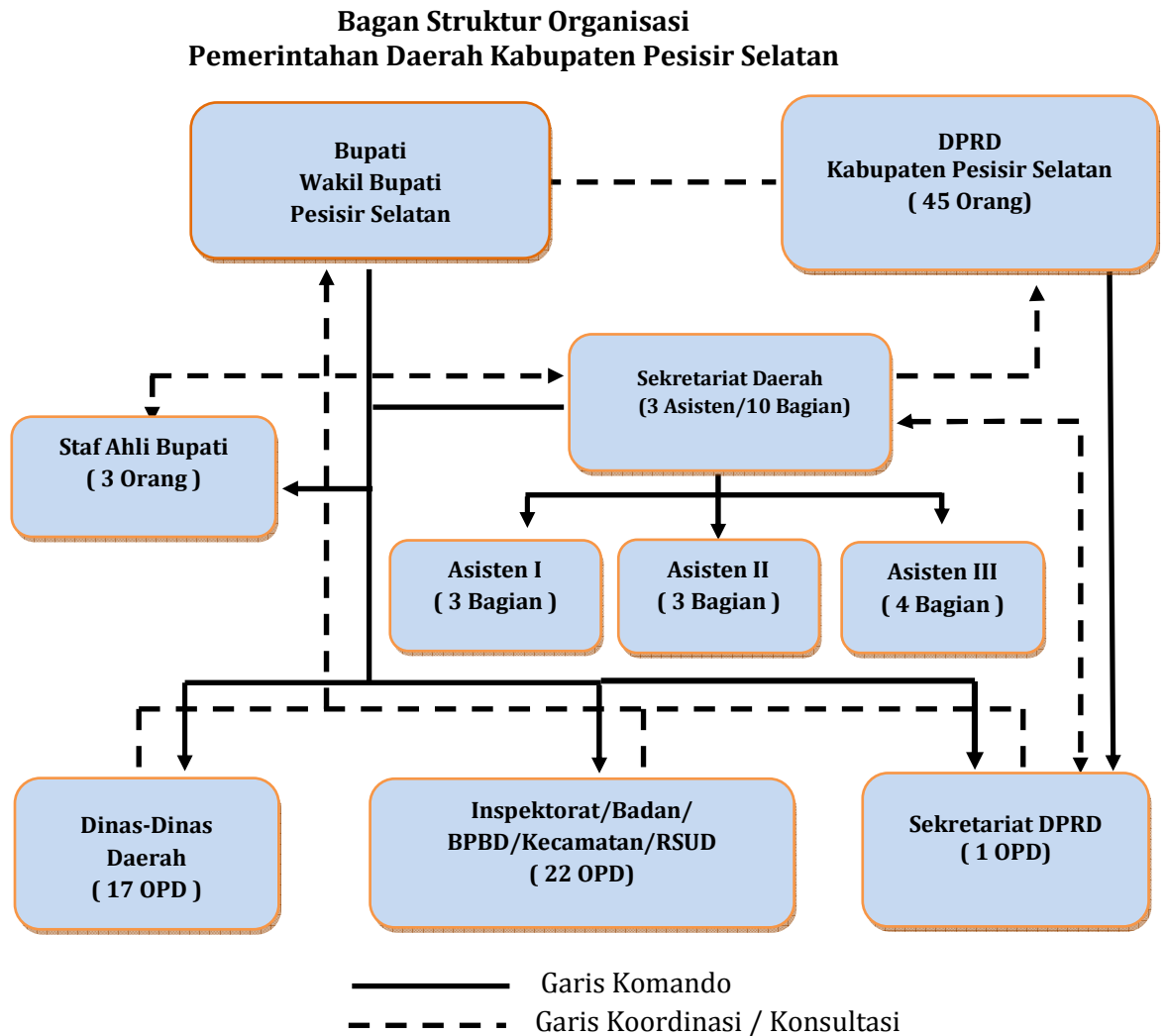
No.	Kecamatan	Tahun	
		2021	2022
1	Silaut	15.592	16.152
2	Lunang	22.423	23.228
3	Basa Ampek Balai Tapan	15.487	15.930
4	Ranah Ampek Hulu Tapan	15.499	15.943
5	Pancung Soal	26.570	27.355
6	Airpura	18.180	18.718
7	Linggo Sari Baganti	49.169	50.231
8	Ranah Pesisir	33.760	34.257
9	Lengayang	60.994	62.515
10	Sutera	56.091	57.836
11	Batang Kapas	36.422	37.329
12	IV Jurai	50.894	52.110
13	Bayang	42.181	43.003
14	IV Nagari Bayang Utara	8.286	8.432
15	Koto XI Tarusan	52.870	53.479
Kabupaten Pesisir Selatan		504.418	516.518

Sumber : BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka, Tahun penerbitan, 2023

Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022 berdasarkan data Pesisir Selatan Dalam Angka yang dipublikasikan oleh BPS adalah 516.518 jiwa, yang terdiri dari 260.118 orang laki-laki dan 256.400 orang perempuan. Jumlah ini naik sebesar 12.100 jiwa dari tahun 2021.

1.5. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.1: Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

A. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

1) Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok Fungsi, Tata Kerja dan

Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sekretariat Daerah terdiri dari :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - c. Bagian Hukum
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
 - a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - b. Bagian Pembangunan dan infrastruktur
 - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
3. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
 - a. Bagian Umum
 - b. Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bagian Organisasi
 - d. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

2) Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur staf yang membantu pimpinan DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya, dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang bertanggung jawab secara operasional kepada pimpinan DPRD dan secara administratif kepada Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD terdiri dari:

1. Bagian Umum
2. Bagian Persidangan dan Risalah
3. Bagian Keuangan dan Bina Program
4. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

3) Dinas Daerah

Dinas Daerah terdiri dari 17 (tujuh belas) Dinas yaitu :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
5. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
6. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Dinas Komunikasi dan Informatika
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11. Dinas Perikanan dan Pangan
12. Dinas Pertanian
13. Dinas Perhubungan

14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

D. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga Teknis Daerah dibentuk terdiri dari :

1. Inspektorat
2. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

E. Lembaga Lainnya

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M.Zein Painan

F. Pemerintahan Kecamatan

Pemerintahan Kecamatan terdiri dari 15 Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Koto XI Tarusan
2. Kecamatan Bayang
3. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
4. Kecamatan IV Jurai
5. Kecamatan Batang Kapas
6. Kecamatan Sutera
7. Kecamatan Lengayang
8. Kecamatan Ranah Pesisir
9. Kecamatan Linggo Sari Baganti
10. Kecamatan Pancung Soal
11. Kecamatan Air Pura
12. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
13. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
14. Kecamatan Lunang
15. Kecamatan Silaut

1.6. KEPEGAWAIAN

Sumber Daya Aparatur Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 adalah sebanyak 5.822 orang, terdiri dari 2.007 orang laki laki atau 34,47% dan 3.815 orang Perempuan atau 65,53%, sebagaimana tergambar pada tabel 1.3 dan gambar 1.2 berikut ini :

Tabel 1.3
Data Jumlah PNS Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020–2022 Berdasarkan Jenis Kelamin

TAHUN	JUMLAH PEGAWAI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI
TAHUN 2020	6,506	4,347	2,159
TAHUN 2021	6,334	4,279	2,055
TAHUN 2022	5,918	4,027	1,891

Sumber : BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan, per 31 Desember 2022



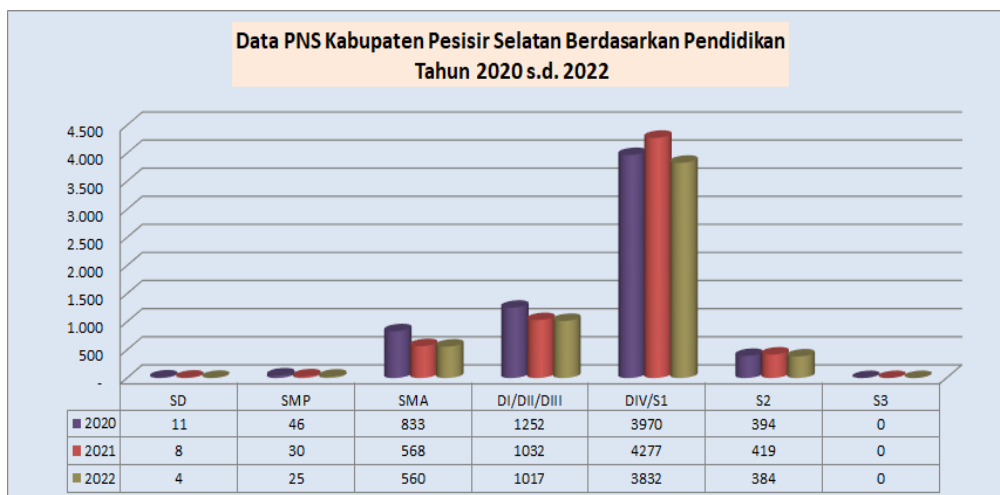
Gambar 1.2 **Komposisi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2022**

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan jenjang pendidikan pendidikan S2 sebanyak 384 orang sedangkan jenjang pendidikan DIV/S1 sebanyak 3.832 orang mendominasi jenjang pendidikan sumber daya aparatur, disusul oleh jenjang pendidikan DI/DII/DIII sebanyak 1.017 orang, SMA sebanyak 560 orang, SMP sebanyak 25 orang dan SD sebanyak 4 orang. Dari data di atas menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM Kabupaten Pesisir Selatan cukup baik. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut :

Tabel. 1.4
Komposisi Sumber Daya Aparatur Pemda Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2020-2022

Tahun	Jenis Pendidikan							Jumlah
	SD	SLTP	SLTA	DI/DII/DIII	DIV/S1	S2	S3	
Tahun 2020	11	46	833	1252	3970	394		6506
Tahun 2021	8	30	568	1032	4277	419		6334
Tahun 2022	4	25	560	1017	3832	384		5822

Sumber : BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan, 2021, per 31 Desember 2022



**Gambar 1.3 Komposisi Sumber Daya Aparatur Pemda
Kab. Pesisir Selatan Berdasarkan Pendidikan
Tahun 2020-2022**

1.7. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja. Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Sedangkan analisis program/kegiatan menguraikan tentang efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1. Bab I : Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum Kabupaten Pesisir Selatan dan sistematika penyajian.
- 2. Bab II : Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022.
- 3. Bab III : Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan:
 - a. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah
Pada subbab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, evaluasi dan analisis capaian kinerja

b. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah.

4. **Bab IV : Penutup**, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS KABUPATEN PESISIR SELATAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1. Visi

Visi merupakan gambaran kondisi perkembangan lingkungan strategis untuk mewujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021-2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka Visi Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”

Penjabaran dan filosofi dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

- Sejahtera : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- Maju : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan
- Bermartabat : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah)
- Akuntabel : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/ badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang

memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban

Profesional : Penyelenggaraan pemerintah yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan beban KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme)

2.1.2. Misi

Visi Kabupaten Pesisir Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang merupakan bagian dari proses menuju cita-cita tersebut. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan, maka dijabarkan kedalam misi sebagai berikut :

1. Memperkuat tata kelola, pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman tenram dan dinamis

2.1.3. Misi, Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi kepala daerah, telah ditetapkan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
VISI
“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN
BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN
PROFESIONAL “

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

MISI		TUJUAN		SASARAN	
1	Memperkuat tata kelola, pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan	1.1	Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkinerja tinggi	1.1.1	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja
				1.2.1	Meningkatnya kapasitas birokrasi
				1.3.1	Meningkatnya keterbukaan informasi dan pelayanan publik
2	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan	2.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

	masyarakat			2.1.2	Meningkatnya perlindungan kesehatan masyarakat
		2.2	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat	2.2.1	Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat
				2.2.2	Meningkatnya ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin
3	Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah	3.1	Meningkatnya pertumbuhan dan ekonomi secara berkelanjutan	3.1.1	Meningkatnya investasi PMA dan PMDN
				3.1.2	Meningkatnya PDRB sektor unggulan
				3.1.3	Menurunnya pengangguran
				3.1.4	Meningkatnya kualitas infrastruktur
				3.1.5	Terjaminnya kelestarian lingkungan
4	Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan	4.1	Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif bagi kesejahteraan masyarakat	4.1.1	Pesisir Selatan menjadi daerah tujuan wisata favorit di pantai barat Indonesia
				4.1.2	Berkembangnya ekonomi kreatif
5	Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing	5.1	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas	5.1.1	Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan
				5.1.2	Meningkatnya daya saing pendidikan
		5.2	Terwujudnya SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing	5.2.1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat
				5.2.2	Meningkatnya SDM kreatif dan berdaya saing
6	Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis	6.1	Terciptanya kondisi masyarakat Pesisir Selatan yang aman	6.1.1	Terwujudnya keluarga bahagia
				6.1.2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri

Sumber: RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 ditetapkan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	Terwujudnya pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1.1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	tanpa satuan	WTP
		1.2.	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	tanpa satuan	BB (70,00)



		1.3.	Skor Nilai LPPD	tanpa satuan	32150
		1.4.	Level Maturitas SPIP Pemda	tanpa satuan	3 (3,0057)
2	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	2.1	Indeks Kelembagaan	tanpa satuan	P-3 (Cukup Efektif)
		2.2	Indeks SPBE	tanpa satuan	3.20
		2.3	Indeks Inovasi Daerah	tanpa satuan	6,300
		2.4	Indeks Profesionalitas ASN	tanpa satuan	62
3	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	3.1.	Kategori keterbukaan informasi publik	tanpa satuan	93 (Informatif)
		3.2.	Indeks Kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik	tanpa satuan	82
4	Meningkatnya kualitas Kesehatan Masyarakat	4.1	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup	8
		4.2	Angka Kematian Ibu	Per 1.000 kelahiran hidup	95
		4.3	Prevalensi stunting	persen	10,92
		4.4	Angka Kesakitan	persen	15,95
5	Meningkatnya Perlindungan Kesehatan Masyarakat	5.1	Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan	persen	80
6	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	6.1	Persentase PPKS yang memperoleh Bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	53
7	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	7.1	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	Skor	87
		7.2	Pengeluaran Perkapita	Rp./org/thn	9,369,000
8	Meningkatkan Investasi PMA dan PMDN	8.1	Nilai investasi swasta dan masyarakat	Juta Rp.	310,000
9	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	9.1	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	TriliunRp	3.61
		9.2	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Milyar Rp.	707,32
10	Menurunnya Pengangguran	10.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	6.85
11	Meningkatnya kualitas infrastruktur	11.1	Persentase jalan kabupaten kondisi baik	persen	31,90
		11.2	Rasio Konektivitas	persen	57.00
		11.3	Proporsi lahan sawah beririgasi baik	persen	59.20
12	Terjaminnya Kelestarian Lingkungan	12.1	Indek kualitas lingkungan hidup	tanpa satuan	86.85
13	Pesisir Selatan Menjadi Daerah Tujuan Wisata Favorit di Pantai Barat Indonesia	13.1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	1,200,000
		13.2	Lama tinggal wisatawan	Hari	1.25
14	Berkembangnya Ekonomi Kreatif	14.1	Jumlah omset usaha ekonomi kreatif	Milyar Rp.	18
15	Meningkatnya Akses Layanan Bidang Pendidikan	15.1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.40
		15.2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.32

16	Meningkatnya daya saing pendidikan	16.1	Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat provinsi	Orang	4
		16.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	tanpa satuan	6.643
17	Meningkatnya pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	17.1	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	persen	96.50
		17.2	Tingkat partisipasi subuh berjamaah di mesjid/ mushola	tanpa satuan	Rendah (≤ 10 orang)
18	Meningkatnya SDM kreatif dan berdaya saing	18.1	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional	Orang	10
		18.2	Jumlah wirausahawan yang berdaya saing	Orang	500
19	Terwujudnya Keluarga Bahagia	19.1	Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	persen	0.0008
		19.2	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak huni	persen	91.0944
20	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	20.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	tanpa satuan	56.93
		20.2	Jumlah nagari tangguh bencana	Nagari	Pratama (182) Madya (0) Utama (0)

Sumber: Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, 2022

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun anggaran menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama dan target capaian Tahun 2022
Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN	
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN
1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	tanpa satuan	WTP	Hasil Evaluasi/ Opini BPK	
2.	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	tanpa satuan	70,00 (BB)	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB tentang SAKIP	
3.	Skor Nilai LPPD	tanpa satuan	3.2150	Hasil Evaluasi EKPPD oleh Tim Penilai Kemendagri	



4.	Level Maturitas SPIP Pemda	tanpa satuan	3 (30057)	Hasil penilaian SPIP oleh BPK	
5.	Indek Kelembagaan	tanpa satuan	P-3 (cukup)	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB	
6.	Indeks SPBE	tanpa satuan	320	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB tentang SPBE	
7.	Indek Inovasi Daerah	tanpa satuan	6,300	Hasil Evaluasi Inovasi Daerah oleh Tim Penilai Kemendagri	
8.	Indeks Profesionalitas ASN	tanpa satuan	62		$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$
9	Katategori keterbukaan informasi publik	tanpa satuan	93 (onformatif)	Penilaian Keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat.	
10..	Indeks Kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik	tanpa satuan	82		<p>IKM = (Total dari nilai persepsi per unsur)/(Total unsur yang terisi) x nilai penimbang</p> <p>Dimana :</p> <p>Bobot nilai rata-rata tertimbang = (Jumlah bobot)/(Jumlah unsur) = 1/14=0,071</p>
11	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup	8		$AKB = (D0 - \leq 1th) / (\Sigma \text{Lahir Hidup}) \times 1000$ <p>D0 - ≤1th = jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu</p> <p>Σlahir hidup = Jumlah kelahiran hidup pada stau tahun tertentu</p>
12	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	95		$AKI = JKI / JLH \times 100.000$ <p>AKI = Angka Kematian Ibu</p> <p>JKI = Jumlah Kematian Ibu</p> <p>JLH = Jumlah Kelahiran Hidup</p>
13	Prevalensi stunting	persen	10.92		$PAB(2)SPstunting = (JPKK/JAB(2)SPstunting) / (JAB(2)) \times 100\%$
14	Angka Kesakitan	persen	15.95		$AM = JPJK / JP \times 100\%$ <p>AM = (Angka Kesakitan)</p> <p>JPJK = Jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktivitas</p> <p>JP = Jumlah penduduk</p>
15	Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan	persen	80		$\frac{(\text{Jumlah peserta BPJS kesehatan} + \text{BPJS Ketenagakerjaan} + \text{JKN} + \text{Jamkesda})}{(\text{jumlah penduduk})} \times 100\%$
16.	Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk kebutuhan dasar	persen	53		$\frac{\text{Jumlah PPKS yang telah memperoleh Bansos}}{\text{Jumlah keseluruhan PPKS}} \times 100\%$
17	Pencapaian skor pola pangan harapan	persen	83		<p>PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan</p>
18	Pengeluaran perkapita	Rp./org/thn	9,369,000		<p>Y* = Pengeluaran per kapita harga konstan</p> <p>Y = Pengeluaran per kapita setahun</p> <p>IHK = Indeks Harga Konsumen tahun</p> $Y^* = \frac{Y}{IHK} \times 100\%$



19	Nilai investasi swasta dan masyarakat	Juta Rp.	310,000	Jumlah keseluruhan nilai investasi swasta dan masyarakat (di luar investasi pemerintah) dalam satu tahun	
20.	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	TriliunRp	3.61	Jumlah PDRB dari sektor pertanian berdasarkan ADHK dalam 1 (satu) tahun	
21	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Milyar Rp.	707,32	Jumlah PDRB dari sektor industri pengolahan berdasarkan ADHK dalam 1 (satu) tahun	
22	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	6.85		$TPT = \frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$ TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka
23	Persentase jalan kabupaten kondisi baik	persen	31.90		$\frac{\text{(Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik)}}{\text{(Panjang Jalan Kabupaten)}} \times 100\%$
24	Rasio Konektivitas	persen	57		Rasio konektivitas = $\frac{\text{(IK1 x bobot angkutan jalan)} + \text{(IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)}}{\text{...}}$
25	Proporsi lahan sawah beririgasi baik	persen	59.20		$\frac{\text{(Luas lahan fungsional sawah beririgasi baik)}}{\text{(Luas lahan fungsional sawah keseluruhan)}} \times 100\%$
26	Indek kualitas lingkungan hidup	tanpa satuan	86.85		Indeks Pencemaran Air + Indeks Pencemaran Udara + Indeks Tutupan Lahan
27	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	1,200, 000	Jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke objek wisata berbayar di Pesisir Selatan dalam 1 (satu) tahun	
28	Lama tinggal wisatawan	hari	1,25	Jumlah hari yang dihabiskan wisatawan yang berkunjung ke Pesisir selatan untuk tinggal di hotel/penginapan	
29	Jumlah omset usaha ekonomi kreatif	Milyar Rp.	18		Omset UEK = $\sum_{i=1, 12, 13, \dots}$
30.	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,40		$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$
31	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,32		$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$
32	Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat provinsi	orang	4	Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang memperoleh penghargaan	



				minimal tingkat provinsi	
33	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	tanpa satuan	6,643	Survey kajian IPLM	
34	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	persen	96,5	Jumlah zakat harta	
35	Tingkat partisipasi subuh berjamaah di mesjid / mushola	tanpa satuan	Rendah (<10 orang)	Jumlah orang yang mengikuti shalat subuh berjamaah di mesjid/mushola	
36	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional	orang	10	Jumlah pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan nasional	
37	Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	persen	0,0008		$(\text{Jumlah kasus kekerasan pada anak dan perempuan}) / (\text{Jumlah keseluruhan keluarga}) \times 100\%$
38	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak huni	persen	91,0944		$(\text{Jumlah rumah layak huni}) / (\text{Jumlah keseluruhan rumah}) \times 100\%$
39	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	tanpa satuan	56,93	Rata-rata aritmatik dari dimensi Keterwakilan di parlemen, Pengambilan keputusan dan dimensi Distribusi pendapatan.	
40	Jumlah nagari tangguh bencana	nagari	Pratama (182) madya (0) utama (0)	Jumlah nagari yang sudah memenuhi kriteria tangguh bencana	

Sumber: RPJMD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pesisir Selatan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan, mulai Perencanaan Strategis (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021. Akuntabilitas Kinerja ini mencakup 20 (dua puluh) sasaran strategis dengan 40 (empat puluh) indikator kinerja.

3.1. METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu bentuk pelaporan kinerja pemerintahan yang fokus pelaporannya adalah keberhasilan atau ketidakberhasilan unit organisasi dalam proses perwujudan visi dan misinya, sehingga pelaporan LKjIP berisi pula tentang indikator kinerja, target kinerja dari setiap indikator kinerja, hasil pengukuran realisasi atas target kinerja pada tahun berkenaan, dan analisis atas progres realisasi kinerja terhadap pencapaian tujuan.

Pengukuran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi capaian target kinerja pada akhir tahun pelaksanaan anggaran dengan rencana target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun pelaksanaan anggaran dengan bentuk Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber, yaitu :

1. Data internal yang berasal dari sistem informasi dan pelaporan yang ada, baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan bulanan, triwulanan, semesteran, laporan akuntabilitas kinerja SKPD, laporan keuangan Perangkat Daerah/laporan keuangan pemerintah daerah maupun laporan kegiatan tahunan lainnya ;
2. Data eksternal, digunakan data-data skunder sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya data-data yang bersumber atas hasil hitung Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan. Perhitungan persentase pencapaian target kinerja memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :



- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan tentang keberhasilan atau tidak berhasilnya pelaksanaan suatu kegiatan dan program dalam mewujudkan kondisi sasaran yang diharapkan. Evaluasi juga bertujuan agar dapat diukur dan diketahui tingkat kemajuan pencapaian realisasi kinerja dalam upaya perwujudan visi dan misi kepala daerah. Lebih lanjut hasil evaluasi merupakan bahan yang penting untuk dipelajari karena berguna untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian
Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 20 (dua puluh) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2022			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
MISI 1 : Memperkuat tata kelola, pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan							
Tujuan 1 : Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkinerja tinggi							
1	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	1	Penilaian LKD (opini BPK)	tanpa satuan	WTP	WTP	100
		2	Kualifikasi penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	tanpa satuan	BB (70,00)	68,97	98,53
		3	Skor Nilai LPPD	tanpa satuan	32150	3,1433	97,77
		4	Level Maturitas SPIP	tanpa satuan	3 (3,0057)	3,0000	99,81
2	Meningkatnya kapasitas birokrasi	1	Indek Kelembagaan	tanpa satuan	P-3 (Cukup Efektif)	N/A	-
		2	Indeks SPBE	tanpa satuan	3.20	3,48	108,75
		3.	Indek Inovasi	tanpa satuan	6,300	N/A	-
		4	Indeks Profesionalitas ASN	tanpa satuan	62	49,93	80,53
3	Meningkatnya keterbukaan informasi dan pelayanan publik	1	Kategori keterbukaan terhadap informasi publik	tanpa satuan	93 (Informatif)	99,92	107,44
		2	Indek Kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik	tanpa satuan	82	82,65	100,79
MISI 2 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat							
Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat							
4	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup	8	9	87,50
		2	Angka Kematian Ibu	Per 1.000 kelahiran hidup	95	144	48,42
		3	Prevalensi stunting	persen	10,92	7	135,90
		4	Angka Kesakitan	persen	15,95	15,16	95,05
5	Meningkatnya perlindungan kesehatan masyarakat	1	Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan	persen	80	79	98,75
Tujuan 2 : Meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat							
6	Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat	1	Persentase PPKS yang memperoleh Bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	53	66,21	124,92

7	Meningkatnya ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin	1	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	Skor	87	80,4	92,41
		2	Pengeluaran Perkapita	Rp./org/thn	9.369.000	9.686.000	103,38
MISI 3 : Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah							
Tujuan 1 : Meningkatnya pertumbuhan dan ekonomi secara berkelanjutan							
8	Meningkatnya investasi PMA dan PMDN	1	Nilai investasi swasta dan masyarakat	Juta Rp.	310.000	679.234	219,11
9	Meningkatnya PDRB sektor unggulan	1	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	TriliunRp	3,61	3,74	103,60
		2	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Milyar Rp.	707,32	741,26	104,80
10	Menurunnya pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	6,85	4,61	132,70
11	Meningkatnya kualitas infrastruktur	1	Persentase jalan kabupaten kondisi baik	persen	31,90	32,34	101,38
		2	Rasio Konektivitas	persen	57,00	58,00	101,75
		3	Proposi lahan sawah beririgasi baik	persen	59,20	59,49	100,49
12	Terjaminnya kelestarian lingkungan	1	Indek kualitas lingkungan hidup	tanpa satuan	86,85	77,94	89,74
MISI 4 : Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan							
Tujuan 1 : Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif bagi kesejahteraan masyarakat							
13	Pesisir Selatan menjadi daerah tujuan wisata favorit di pantai barat Indonesia	1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	1.200.000	942.240	78,52
		2	Lama tinggal wisatawan	Hari	1,25	1,25	100,00
14	Berkembangnya ekonomi kreatif	1	Jumlah omset usaha ekonomi kreatif	Milyar Rp.	18	16	88,89
MISI 5 : Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing							
Tujuan 1 : Terwujudnya pendidikan yang berkualitas							
15	Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan	1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,40	13,35	99,63
		2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,32	8,43	101,32
16	Meningkatnya daya saing pendidikan	1	Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat provinsi	Orang	4	2	50,00

		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	tanpa satuan	6,643	7,172	107,96
Tujuan 2 : Terwujudnya SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing							
17	Meningkatnya pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	1	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	persen	96,50	75,5	78,24
		2	Tingkat partisipasi subuh berjamaah di mesjid/ mushola	tanpa satuan	Rendah (≤ 10 orang)	Tinggi (≥ 35 orang)	350,00
18	Meningkatnya SDM kreatif dan berdaya saing	1	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional	Orang	10	17	170,00
		2	Jumlah wirausahawan yang berdaya saing	Orang	500	656	131,20
MISI 6 : Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan dinamis							
Tujuan 1 : Terciptanya kondisi masyarakat Pesisir Selatan yang aman							
19	Terwujudnya keluarga bahagia	1	Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	persen	0,0008	0,0058	72,50
		2	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak huni	persen	91,0944	91,7179	100,68
20	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri	1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	tanpa satuan	56,93	53,39	93,78
		2	Jumlah nagari tangguh bencana	Nagari	Pratama (182) Madya (0) Utama (0)	47	25,82
Rata-rata Capaian Indikator 20 Sasaran Strategis : 40 Indikator Kinerja							105,05

Dari tabel di atas dapat dilihat, capaian rata-rata 40 (empat puluh) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 20 (dua puluh) sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 105,05%, sebanyak 31 (tiga puluh satu) indikator nilainya predikat **Sangat Baik**, sebanyak 3 (tiga) indikator nilainya predikat **Baik**, sebanyak 1 (satu) indikator nilainya predikat **cukup**, sebanyak 3 (tiga) indikator **gagal** dan 2 (dua) indikator tidak dapat diukur karena belum adanya formula untuk mengukur capaian kedua indikator kinerja tersebut.

3.3. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sasaran 1 : Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Penilaian LKD (opini BPK)	tanpa satuan	WTP	WTP	100
2	Kualifikasi penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	tanpa satuan	BB (70,00)	68,97	98,53
3	Skor Nilai LPPD	tanpa satuan	3,215	3,1433	97,77
4	Level Maturitas SPIP	tanpa satuan	3 (3,0057)	3,0000	99,81
Rata-rata Capaian					99.26

Dari tabel 3.3. di atas dapat dilihat rata-rata capaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran strategis 1 sebesar 99.26%. Pencapaian sasaran strategis 1 termasuk kategori keberhasilan **Sangat Baik**.

1. Penilaian LKD (opini BPK)

Ada beberapa indikator yang dapat menjadi ukuran keberhasilan good governance dan clean government diantaranya yaitu pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik apabila dari hasil audit BPK mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah opini BPK. Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun 2021 dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini BPK diberikan kepada Daerah yang memenuhi Kriteria sebagai berikut (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak.

BPK dapat memberikan 4 (empat) jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified Opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/*Disclaimer Opinion*) dan Tidak Wajar (TW/*Adverse Opinion*).

Opini WTP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Opini WDP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

Opini TMP diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Misalnya, auditor tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap, sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan benar sesuai dengan SAP. Dalam hal ini auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP, atau TW.

Opini TW diberikan jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Dengan demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP. Berikut tabel 3.4, realisasi dan capaian indikator kinerja Penilaian LKD (opini BPK):

Tabel 3.4
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Penilaian LKD
(Opini BPK) Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penilaian LKD (Opini BPK)	opini	WTP	WTP	100

Formulasi capaian indikator kinerja Penilaian LKD (Opini BPK)

Hasil Evaluasi/ Opini BPK

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022 target indikator kinerja Penilaian Laporan Keuangan Daerah (Opini BPK) adalah WTP dengan realisasi WTP dan capaian indikator kinerja adalah 100%.

Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator ini adalah ***Sangat Berhasil*** dengan predikat ***Sangat Baik***.

Pada tahun 2022, Badan Pemeriksa Keuangan telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dengan Nomor : 37.A/LHP/XVIII.PDG/05/2022 dan Nomor : 37.B/LHP/XVIII.PDG/05/2022 bertanggal 17 Mei 2022 dan Surat Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 74/S-HP/XVIII.PDG/05/2022 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2022 merupakan pencapaian untuk yang ke-9 (**sembilan**) kalinya sejak laporan keuangan tahun 2013. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut didukung oleh beberapa faktor-faktor sebagai berikut :

1. Adanya Penguatan komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola dan para pelaksana kegiatan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah melalui upaya :
 - 1) Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - 2) Peningkatan kepatuhan terhadap aturan perundang- undangan;
 - 3) Meningkatkan peran PPK-PD untuk meyakini compliance.
2. Adanya upaya seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan kualitas LK-PD nya masing-masing. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan di bidang perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
3. Adanya dukungan aplikasi yang terintegrasi mulai dari penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang semakin baik sehingga laporan dapat diselesaikan tepat waktu dan meminimalisir terjadi kesalahan-kesalahan baik pada tahap penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.
4. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern (APIP) dalam pelaksanaan pengendalian internal pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan beberapa upaya dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, antara lain :

1. Melakukan Rekonsiliasi Bidang Barang Milik Daerah dan Akuntansi dengan semua Perangkat Daerah (yang memiliki DPA dan melaksanakan anggaran) dan melakukan asistensi dan fasilitas dengan Perangkat Daerah terkait penyusunan laporan keuangan setiap bulannya sehingga menghasilkan data/angka yang valid pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada para Bendahara, PPK, dan Sekretaris seluruh Perangkat Daerah.

- Melaksanakan pendampingan secara terus menerus melalui media group WhatsApp yaitu Help Desk SIPKD terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terdapat pada Perangkat Daerah dan dapat ditindaklanjuti secara langsung oleh admin SIPKD keuangan maupun SIPKD Aset.

2. Kualifikasi penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah itu didapatkan dengan mengukur 4 (empat) komponen meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta objektif instansi pemerintah.

Sasaran Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diukur dari indikator yang diperjanjikan yaitu Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Pesisir Selatan, yang merupakan perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang dipertanggungjawabkan secara periodik.

Berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor : B/881/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (AKIP) pada tahun 2022 memperoleh nilai **68,97** dengan predikat **B**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "BAIK" yaitu pelaksanaan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah baik khususnya unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. Adapun rincian penilaian capaian kinerja tersebut seperti pada tabel 3.5 di bawah ini :

Tabel 3.5
Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021 s.d 2022

No.	Komposisi Yang Dinilai	Nilai			
		Bobot	2021	Bobot	2022
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,11	30	24,15
b.	Pengukuran kinerja	25	17,06	25	17,93
c.	Pelaporan kinerja	15	11,38	15	11,19
d.	Evaluasi kinerja	10	7,08	25	15,70
e.	Capaian kinerja	20	9,09		
	Nilai Hasil Evaluasi	100	68,72	100	68,97

	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B		B
--	-------------------------------	---	--	---

Sumber : Hasil Evaluasi Menpan RB, 2021 dan 2022

Hasil akuntabilitas kinerja yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor : B/881/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan surat sebagaimana tersebut diatas, disampaikan bahwa dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja maka diberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

- 1) Memperbaiki rumusan tujuan/sasaran strategis beserta indikatornya di level Pemda maupun PD agar berorientasi pada hasil dan memastikan kecukupannya dalam mengukur keberhasilan tujuan/sasaran strategis tersebut;
- 2) Melakukan reviu kinerja prioritas Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar indikator keberhasilan yang ada di perjanjian kinerja sesuai pada levelnya;
- 3) Mereview kembali dokumen penjenjangan kinerja (cascade down) dengan mengacu kepada Permenpan Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjangkangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Menyusun pedoman SAKIP Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan memastikan minimal aspek perencanaan, pengumpulan dan pengukuran data kinerja serta evaluasi internal secara komprehensi;
- 5) Melakukan review kembali target yang diperjanjikan agar selaras dengan hasil capaian tahun sebelumnya dan menggambarkan kinerja yang lebih tinggi;
- 6) Menerapkan kebijakan *reward and punishment* dengan memperhitungkan capaian kinerja organisasi;
- 7) Memanfaatkan aplikasi e-sakip sebagai alat untuk monitoring pencapaian kinerja Bupati dan setiap perangkat daerah sekaligus dapat diintegrasikan dengan system manajemen kinerja lainnya;
- 8) Menjadikan laporan kinerja sebagai bahan evaluasi dalam perbaikan dokumen perencanaan selanjutnya;
- 9) Meningkatkan kualitas SDM Inspektorat agar hasil evaluasi akuntabilitas yang dilakukan dapat memberikan rekomendasi yang cukup dan mendalam untuk perbaikan implementasi akuntabilitas kinerja.

Realisasi AKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel 3.6 dibawah ini :

Tabel 3.6
Realisasi Kualifikasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2021-2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
			2021	2022

1.	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah	Skala	B	B
----	---	-------	---	---

Berikut tabel 3.7 realisasi dan capaian indikator kinerja Kualifikasi penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah:

Tabel 3.7
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022*		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Kualifikasi penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Tanpa satuan	BB (70,00)	B (68,97)	98,53

Sumber data : Hasil Evaluasi Menpan RB, 2022

Formulasi capaian indikator kinerja Kualifikasi Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
tentang SAKIP

Sumber data : Perbup Definsi Operasional IKU Pemerintah Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022 adalah BB (70,00) dan terealisasi B (68,97) dengan capaian indikator kinerja adalah 98,53%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022 dalam rangka pencapaian komponen-komponen penilaian SAKIP sehingga menghasilkan nilai 68,97 (B), antara lain :

1. Perencanaan Kinerja

Komponen Perencanaan Kinerja memiliki Bobot penilaian sebesar 30 % dengan yang dibagi menjadi 3 (tiga) sub komponen meliputi keberadaan, kualitas dan pemanfaatan. Objek penilaian dari Komponen Perencanaan Kinerja yakni ketersediaan dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Panjang dan Jangka Menengah. Dalam hal Perencanaan Kinerja Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2005-2025. Sedangkan untuk perencanaan kinerja jangka menengah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 yang kemudian dijabarkan pada Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026 (Renstra PD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun

2022, Rencana Kerja Anggaran, Rencana Kerja Anggaran Perubahan dan dokumen teknis lainnya.

Keberhasilan pada komponen Perencanaan Kinerja ini ditunjang oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami dan kemudian melaksanakan perencanaan sesuai dengan regulasi. Selain itu, didukung oleh berkembangnya beragam aplikasi terkait perencanaan yang sangat membantu dalam menunjang keberhasilan mencapai target kerja yang telah ditetapkan. Hal ini mempermudah hubungan koordinasi antara pihak-pihak terkait yang menjadi kunci suksesnya pencapaian target.

Selain hal tersebut diatas, tingginya komitmen dari setiap personal sumber daya manusia dalam hal pencapaian target kerja yang telah disepakati dan ditetapkan juga sangat mempengaruhi, meskipun masih dibutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia itu sendiri. Mendorong dan memaksimalkan komitmen tersebut dalam kondisi minimnya anggaran merupakan wujud dari efisiensi itu sendiri. Dimasa yang akan datang perlu dilakukan peningkatan anggaran dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia, atau setidaknya relevan dengan target yang akan dicapai.

Dalam melaksanakan perencanaan kinerja sebagai salah satu komponen penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam pelaksanaannya pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan didukung/ditunjang oleh 2 (dua) program sebagai berikut :

- 1) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan target anggaran sebesar Rp. 351.466.990,- (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 285.065.530,- (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah) dan/atau dengan capaian 81,11%.
- 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan target anggaran Rp. 464.897.304,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. Rp. 441.691.834,- (Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) dan/atau dengan capaian 95,01%.

Berdasarkan dari 2 (dua) program sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 89.606.930,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah) atau sebesar 10,98%.

Penjelasan mengenai hasil evaluasi komponen Perencanaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor : B/881/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

- ❖ Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja dan dokumen lainnya baik pada tingkat perangkat daerah. Penyusunan dokumen ini berdasarkan hasil perbaikan sasaran dan indikator hasil evaluasi internal yang telah dilakukan, hal ini ditunjukkan dengan kualitas dokumen perencanaan level Pemerintah Daerah yang sudah cukup baik.
- ❖ Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam perencanaan kinerja diantaranya sebagai berikut :
 - ◆ Indikator Pemerintah Daerah sebahagian besar merupakan kompilasi indikator perangkat daerah;
 - ◆ Indikator kinerja belum sepenuhnya berorientasi hasil dan memenuhi kriteria spesifik, terukur/*measurable*, relevan dan cukup. Sebagai contoh pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa indikator PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial, dan sebagian indikator perangkat daerah lainnya;
 - ◆ Terdapat indikator ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan target 0,00%;
 - ◆ Penjabaran kinerja belum menggambarkan kerangka logis dalam mencapai kinerja; Hal tersebut terlihat pada turunan kinerja yang telah disusun masih berdasarkan pada pendistribusian kinerja pada setiap PD;
 - ◆ Terdapat beberapa target tahun 2022 pada level pusat yang lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

2. Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal pengukuran kinerja pada tahun 2022 mendapatkan penghargaan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu sebagai Terbaik I Tingkat Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Klaster Keuangan Rendah dengan Skor 77,2975 Nilai A tentang. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur Sumatera Barat di Padang pada Desember 2022.

Adapun hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan komponen Pengukuran Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, uraiannya sebagai berikut :

- ❖ Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan unit kerjanya telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja, dan

rencana aksinya kepada seluruh perangkat daerah. Untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja tersebut, telah memiliki aplikasi *e-sakip* dalam kegiatan monitoring evaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja diantaranya sebagai berikut :

- ◆ Belum terdapatnya pedoman mengenai pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang lengkap termasuk mekanisme pemanfaatan aplikasi pengukuran kinerja;
- ◆ Pemerintah Daerah telah melakukan pengukuran kinerja, namun hasilnya belum digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*;
- ◆ Belum memanfaatkan aplikasi *e-sakip* sebagai monitoring dan evaluasi kinerja, sehingga pemantauan kinerja masih dilakukan secara manual.

3. Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja baik tingkat instansi maupun tingkat perangkat daerah. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan serta telah dipublikasi secara umum, dan sebahagian perangkat daerah telah memiliki laporan akuntabilitas yang berkualitas. Namun berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor : B/881/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja antara lain sebagai berikut :

- ❖ Laporan kinerja pada level perangkat daerah belum cukup menyampaikan informasi yang memadai. Hal tersebut terlihat pada laporan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang belum sepenuhnya menjelaskan faktor keberhasilan, hambatan dan strategi kedepan dalam mencapai sasaran strategis.
- ❖ Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya dipergunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut terlihat pada ketercapaian Target Dinas Perdagangan dan Transmigrasi dengan indikator laju pertumbuhan sektor perindustrian, namun target pada tahun 2022 cenderung lebih rendah. Dan hal tersebut juga ditemukan pada sebahagian indikator perangkat daerah lainnya.

4. Evaluasi Kinerja

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pencapaian penilaian SAKIP tahun 2022, juga didukung oleh komponen Evaluasi Kinerja yang memiliki Bobot penilaian sebesar 10 %. Adapun Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, sebagai berikut :

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI	PREDIKAT	KET.
1	Dinas Pertanian	91,89	AA	
2	Inspektorat Daerah	89,99	A	
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89,90	A	
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	89,34	A	
5	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	88,99	A	
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	88,56	A	
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	86,14	A	
8	Dinas Kesehatan	86,01	A	
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	85,85	A	
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	85,34	A	
11	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	84,79	A	
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	84,32	A	
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	85,59	A	
14	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	82,51	A	
15	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	82,38	A	
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	81,57	A	
17	Kecamatan Ranah Pesisir	81,51	A	
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	81,47	A	
19	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	81,23	A	
20	RSUD Dr. M. Zein Painan	81,13	A	
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	80,88	A	
22	Dinas Perikanan dan Pangan	80,87	A	
23	Kecamatan Ranah Ampek Hulu tapan	80,80	A	
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	80,22	A	
25	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	80,14	A	
26	Kecamatan Batang Kapas	80,13	A	
27	Sekretariat Daerah	80,03	A	
28	Kecamatan Silaut	80,02	A	
29	Dinas Perhubungan	79,04	BB	
30	Kecamatan Airpura	78,02	BB	
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	77,15	BB	
32	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	77,02	BB	
33	Kecamatan Lunang	76,24	BB	

34	Kecamatan Sutera	74,23	BB	
35	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	71,22	BB	
36	Kecamatan Lengayang	71,10	BB	
37	Kecamatan IV Jurai	70,95	BB	
38	Kecamatan Pancung Soal	70,89	BB	
39	Kecamatan Koto XI Tarusan	70,35	BB	
40	Kecamatan Linggo Sari Baganti	70,68	BB	
41	Kecamatan Bayang	63,56	B	
JUMLAH		3302,05		
RATA-RATA (Jumlah nilai SAKIP/Jumlah Perangkat Daerah)		80,53	A	

Dari tabel tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 melakukan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah sebanyak 41 (empat puluh satu) dengan nilai rata-rata 80,53 dengan kualifikasi (A), dimana nilai tersebut didapatkan dengan membagi total nilai SAKIP dengan jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi.

Jika dibandingkan, nilai rata-rata Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah tahun 2020 lebih tinggi daripada nilai rata-rata tahun 2021. Pada tahun 2020 nilai rata-rata Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah yakni 80,85 dengan kualifikasi (A), namun dari jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi lebih banyak dibandingkan tahun 2021 yakni sebanyak 45 perangkat daerah. Hal ini disebabkan karena terjadinya perampingan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berikut Tabel Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, sebagai berikut :

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI	PREDIKAT	KET.
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	90,84	AA	
2	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	90,73	AA	
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89,82	A	
4	Inspektorat Daerah	89,79	A	
5	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	89,78	A	
6	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	88,31	A	
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	85,64	A	
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	87,57	A	
9	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan	87,22	A	
10	Badan Pengelolaan Keuangan daerah	86,34	A	

11	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	86,34	A	
12	Dinas Pangan	85,71	A	
13	Dinas Kesehatan	85,59	A	
14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	85,44	A	
15	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	84,79	A	
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	84,51	A	
17	Dinas Lingkungan Hidup	84,32	A	
18	Badan Pendapatan	83,02	A	
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB	82,71	A	
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	82,06	A	
21	Sekretariat Daerah	80,82	A	
22	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	80,53	A	
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	80,40	A	
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	80,35	A	
25	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	80,17	A	
26	Dinas Perikanan	80,09	A	
27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	80,08	A	
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	80,05	A	
29	Kecamatan Silaut	80,04	A	
30	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	79,34	BB	
31	Kecamatan Ranah Pesisir	79,31	BB	
32	Kecamatan Linggo Sari Baganti	78,98	BB	
33	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	78,51	BB	
34	Dinas Perhubungan	78,32	BB	
35	Kecamatan Airpura	77,97	BB	
36	Kecamatan Sutera	75,90	BB	
37	Kecamatan IV Jurai	72,45	BB	
38	Kecamatan Batang Kapas	72,29	BB	
39	Kecamatan Koto XI Tarusan	70,69	BB	
40	Kecamatan Lengayang	70,68	BB	
41	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	70,55	BB	
42	Kecamatan Bayang	70,26	BB	
43	Kecamatan Lunang	70,11	BB	
44	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	70,02	BB	
45	Kecamatan Pancung Soal	70,02	BB	
JUMLAH		3638,46		
RATA-RATA (Jumlah nilai SAKIP/Jumlah Perangkat Daerah)		80,85	A	

Berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi Nomor : B/881/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022

perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai berikut :

- ❖ Laporan hasil evaluasi belum memberikan rekomendasi yang cukup untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap perangkat daerah;
- ❖ Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum mampu mendorong perbaikan dan capaian kinerja *output* dan *outcome* pada level Pemerintah Daerah maupun level perangkat daerah seperti pada indikator jumlah kunjungan wisatawan, jumlah nigari tangguh bencana, dan sebagian indikator lainnya;
- ❖ Belum ada kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi SAKIP internal sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di perangkat daerah;
- ❖ Hasil evaluasi yang dilakukan inspektorat belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh perangkat daerah.

3. Skor nilai LPPD

Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Memenuhi amanat Pasal 69 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jo Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan kewajiban menyampaikan LPPD kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya. Pada Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Pemerintah Provinsi melalui Tim Daerah evaluasi LPPD terhadap LPPD Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri RI berkewajiban menetapkan peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional, namun sampai dengan saat ini keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut belum diterima. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terakhir menerima nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada tahun 2018 dari Kementerian Dalam Negeri RI yang ditetapkan pada tanggal 25 April 2020 dengan Skor **3,1433** dan Status Kinerja **Sangat Tinggi**.

Pada dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026 ditetapkan target LPPD yang harus dicapai dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) tahun 2022 sebesar 3,2150 dengan skor penilaian sangat tinggi. Dengan belum diterbitkannya nilai EKPPD tahun 2022 dimana terakhir nilai tersebut diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI pada tahun 2018, maka nilai EKPPD masih menggunakan nilai pada tahun dimaksud yakni **3,1433** dengan status **Sangat Tinggi**. Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 97,77%.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya melalui Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 120/26/Pem-Otda/2023 tanggal 13 Januari 2023 perihal Nilai dan Peringkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019-2021, meminta dan memohon kepada Menteri Dalam Negeri RI agar menetapkan dan menerbitkan peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2019-2021.

Realisasi dan capaian indikator kinerja skor nilai LPPD Tahun 2022 pada tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Skor Nilai LPPD
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Skor Nilai LPPD	skor	32150	31433	97,77

Formulasi capaian indikator kinerja Skor Nilai LPPD

Hasil Evaluasi EKPPD oleh Tim Penilai
Kementerian Dalam Negeri

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Capaian Skor Nilai LPPD Tahun 2021 :	$\frac{3,1433}{3,2150}$	X	100%	=	97,77%
--------------------------------------	-------------------------	---	------	---	--------

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Skor Nilai LPPD Tahun 2022 adalah 3,2150 dan terealisasi sebesar 3,1433 dengan capaian adalah 97,77%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Tinggi**.

4. Level Maturitas SPIP

Maturitas sistem pengendalian internal merupakan ukuran kualitas dari sistem pengendalian intern pada suatu organisasi. Semakin tinggi maturitasnya semakin baik kualitas sistem pengendalian internnya. Selain itu penilaian maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan target indikator kinerja bidang aparatur negara yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2021-2026. Indikator kinerja ini berupa tingkat kematangan implementasi SPIP yang berskala 1-5. Sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga / Pemerintah Daerah. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturitas ini dapat digunakan paling tidak sebagai

instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern.

Level maturitas SPIP Kabupaten Pesisir Selatan meraih predikat level 3. Hal ini merupakan Nilai Lampiran Re-Assesment Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 berdasarkan hasil Quality Assurance (QA) karena SPIP Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan belum dinilai, yang menurut rencana akan dilakukan penilaian pada Tahun 2023. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan serta langkah dan upaya yang dilakukan oleh OPD penanggung jawab pencapaian target indikator kinerja level maturitas SPIP yaitu Inspektorat beserta OPD pendukung dalam memenuhi kriteria penilaian.

Langka-langkah yang harus dilakukan penilaian level SPIP antara lain :

1. Penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis
2. Pengkomunikasian kebijakan dan prosedur
3. Peningkatan komitmen implementasi dan dokumentasi
4. Evaluasi formal, berkala dan terdokumentasi
5. Pemantauan/pengembangan berkelanjutan

Implementasi dari penilaian level maturitas SPIP yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Menerapkan perilaku dan penegakkan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara
2. Menetapkan standar kompetensi maupun uraian tugas untuk seluruh jabatan
3. Implementasi kepemimpinan yang kondusif
4. Prosedur dan implementasi pendelegasian wewenang dan tanggung jawab Menetapkan kebijakan/aturan mengenai pembinaan SDM
5. Hasil kinerja pengawasan Inspektorat secara internal dan eksternal
6. Reviu kinerja atas capaian kinerja dan membuat analisa pencapaian target kinerja
7. Rekonsiliasi antar PD
8. Meningkatkan kinerja pegawai PD
9. Pengendalian umum dan pengendalian kinerja yang signifikan
10. Pengamanan barang milik daerah (BMD)
11. Otorisasi dan pencatatan transaksi kejadian penting

Peningkatan maturitas level SPIP di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dicapai dengan beberapa upaya antara lain :

1. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk menyelenggarakan SPIP
2. Ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor : 8 Tahun 2019 tentang Sistem PengendalianIntern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Ditetapkannya Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Ditetapkannya Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 700/407/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Pembentukan Struktur

- Pengelola Risiko Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
5. Melakukan Sosialisasi tentang SPIP
 6. Perangkat Daerah agar meningkatkan kualitas pengelolaan risiko
 7. Inspektorat Daerah melakukan penilaian efektifitas pengelolaan risiko

Berikut tabel 3.9. realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP Tahun 2022.

Tabel 3.9
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Level Maturitas SPI
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Level Maturitas SPIP	tanpa satuan	3 (3,0057)	3 (3,0000)	99.81

Formulasi capaian indikator kinerja Level Maturitas SPIP

Hasil Penilaian SPIP oleh BPK

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Capaian Level Maritas SPIP Tahun 2021 :	(3) 3,0000	X	100%	=	99.81%
	(3) 3,0057				

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Level Maturitas SPIP Tahun 2022 adalah 3,0057 dan realisasi 3,000 dengan capaian adalah 99,81%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 telah berada pada level 3 artinya secara umum menunjukkan bahwa SPIP telah dipraktekkan diseluruh organisasi di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan didukung dengan sistem pendokumentasian yang memadai, namun efektifitas pengendalian belum seluruhnya dievaluasi sehingga terdapat kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Beberapa infrastruktur pengendalian intern yang masih belum dilaksanakan secara memadai yaitu :

1. Belum sepenuhnya mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan serta prosedur atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi dalam Pemerintah Daerah serta belum mendokumentasikan secara konsisten.
2. Belum melakukan evaluasi atas efektifitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas semua kegiatan pokok unit organisasi dalam Pemerintah Daerah secara berkala dan terdokumentasi.
3. Belum melakukan pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi

dalam pelaksanaan semua kegiatan.

4. Melakukan Revisi petunjuk teknis/pelaksanaan terkait penilaian resiko.

Untuk dapat ke level yang lebih tinggi dari capaian sekarang maka perlu melakukan :

1. Mengoptimalkan implementasi SPIP.
2. Menyusun dokumen Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2023, dan inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Koordinator.
3. Melakukan penilaian maturitas SPIP secara mandiri terhadap semua PD di
4. Merevisi pedoman penilaian risiko secara khusus dan menyusun RTP berbasis risiko secara komprehensif atas program/kegiatan utama PD dan mengimplementasikan menjadi dasar perencanaan kegiatan yang harus ditindaklanjuti oleh PD terkait.
5. Setiap Kepala PD terkait agar melakukan evaluasi secara berkala atas:
 - a. Aturan perilaku dan penegakan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara.
 - b. Menetapkan standar kompetensi maupun uraian tugas untuk seluruh jabatan.
 - c. Implementasi kepemimpinan yang kondusif.
 - d. Prosedur dan implementasi pendelegasian wewenang dan tanggungjawab.
 - e. Menetapkan kebijakan/aturan mengenai pembinaan SDM.
 - f. Hasil kinerja pengawasan inspektorat secara internal dan eksternal.
 - g. Reviu kinerja atas capaian kinerja dan membuat analisa pencapaian target kinerja.
 - h. Rekonsiliasi antar PD.
 - i. Meningkatkan Kinerja Pegawai PD.
 - j. Pengendalian Umum dan pengendalian kinerja yang signifikan.
 - k. Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD).
 - l. Otorisasi dan pencatatan transaksi kejadian penting.

Program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan Yang Berkinerja, Akuntabel dan Bebas KKN antara lain :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
3. Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Aparatur
4. Program Pemantapan Otonomi Daerah
5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
6. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari

7. Program Penyelenggaraan Pengawasan
8. Perencanaan pembangunan Daerah
9. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
10. Program Pematapan Otonomi Daerah

Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas birokrasi

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.10 berikut ini:

Tabel 3.10
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks SPBE	tanpa satuan	3.20	3.48	108.75
2.	Indeks Profesional ASN	tanpa satuan	62	49,93	80.53
Rata-rata Capaian					94,64

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 2 sebesar 94,64 %. Pencapaian sasaran strategis 2 termasuk predikat **Sangat Baik**.

1. Indeks SPBE

Indek Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pelaksanaan SPBE ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk mengetahui pelaksanaan SPBE (tingkat kematangan SPBE) pada instansi pemerintah tersebut perlu dilakukan evaluasi. Tingkat kematangan dalam evaluasi SPBE ini ditinjau dari tahapan pada 2 (dua) yaitu kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Sedangkan dalam menentukan penilaian akhir, nilai indeks dihitung secara agregat dari nilai tingkat kematangan pada indikator. Nilai indeks terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

1. Nilai Indeks Aspek adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE pada aspek tertentu.
2. Nilai Indeks Domain adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE pada domain tertentu.

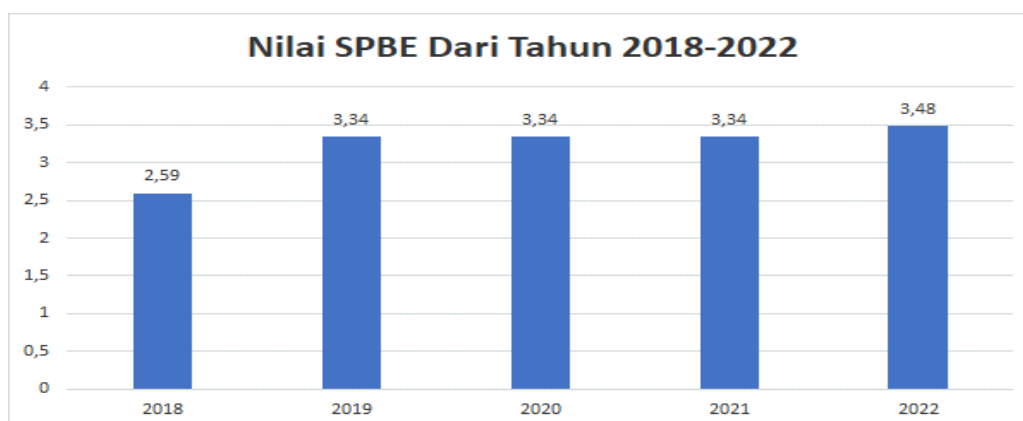
Nilai Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain.

Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan kategori sebagai berikut:

No.	Nilai Indeks	Kategori
1.	4,2-<5,0	memuaskan
2.	3,5-<4,2	Sangat baik
3.	2,6-<3,5	baik
4.	1,8-<2,60	cukup
5.	<1,8	kurang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memiliki cakupan yang luas, meliputi: layanan dari pemerintah ke pemerintah, pemerintah ke masyarakat, pemerintah ke pelaku usaha, dan pemerintah ke ASN. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan e-government, berdampak pada integrasi sistem. Implementasi SPBE yang terpadu ini bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Proses Bisnis SPBE merupakan salah satu domain pada Arsitektur SPBE memiliki tujuan untuk memberikan pedoman dan arahan dalam penggunaan data dan informasi serta untuk mendukung pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.

Indikator yang memiliki target berupa nilai Indeks SPBE sebesar 3,20, diakhir tahun 2022 Realisasi Kinerja sebesar 3,48 atau predikat SPBE Baik sehingga capaian untuk indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 108,75 %, ini berarti termasuk dalam kriteria Berhasil. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan Kegiatan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.2.992.992.200,- sebagai penunjang pelaksanaan untuk mencapainya Nilai SPBE



Gambar 3.1. Pencapaian Nilai SPBE dari tahun 2018 – 2022

Keterangan :

- Indikator penilaian dari Tahun 2018-2020 sebanyak 35 indikator
- Indikator penilaian dari Tahun 2021-2022 sebanyak 47 indikator

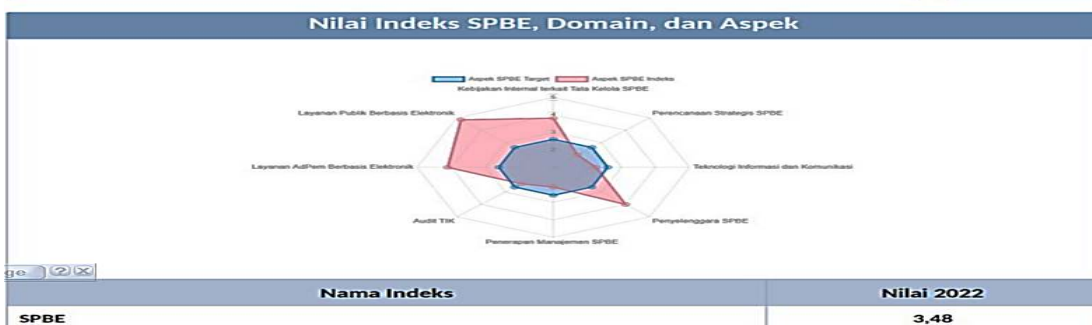
Hasil Indeks SPBE tahun 2022 sebagaimana tersebut diatas, didasari atas evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PANRB melalui surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor :B/810/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022 Perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022.

**PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2022**

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik ^{*)}</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik ^{*)}	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5		Baik ^{*)}																			
4	1,8 – < 2,6	Cukup																				
5	< 1,8	Kurang																				
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

^{*)} Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. PESISIR SELATAN **3,48**
(Baik)



Nama Indeks	Nilai 2022
SPBE	3,48
Domain Kebijakan SPBE	3,80
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,80
Domain Tata Kelola SPBE	2,50
Perencanaan Strategis SPBE	2,00
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,25
Penyelenggara SPBE	4,00
Domain Manajemen SPBE	2,18
Penerapan Manajemen SPBE	2,13
Audit TIK	2,33
Domain Layanan SPBE	4,39
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,10
Layanan Publik Berbasis Elektronik	4,83

Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi menjadi salah satu factor dalam peningkatan nilai SPBE

No	Nama Aplikasi	Nama Lengkap	Tahun Pembuatan	Tahun Penggunaan	Tahun Pengembangan
1	SIPD	Sistem Informasi Pemerintah daerah		2019	
2	GIS Insfrastuktur		2017		
3	E-PLANNING	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2017		
4	E-PAD		2017		
5	SISMIOP		2017		
6	SAPK	Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	2017		
7	SIM GAJI		2017		
8	SIPKD	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	2017	2017	
9	SIPKD Modul Aset		2017		
10	E-RTLH		2017		
11	E-PUSKESMAS		2017		
12	SLRT		2017		
13	SIKS-NG		2017		
14	SIM-PKH		2017		
15	SIMFONI		2017		
16	SIMDAPODIK		2017		
17	SIMTUN		2017		
18	SIMDAK		2017		
19	SIMUN		2017		
20	SIKAK	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	2017		
21	SIM-PKB		2017		
22	SLIMS		2017		
23	SISKEUDES	Sistem Informasi Keuangan Desa	2015	2016	2016-2021
24	CELOK	Cek Lokasi Pessel	2017	2017	2019
25	TV Pessel	TV Pessel	2017	2017	
26	PRODESKEKEL		2017		
27	PORTAL DESA		2017		
28	SIPO		2017		
29	SPIPISE		2017		
30	ANJAB-ABK		2017		
31	JKN		2017		



32	SPSE / SIRUP	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan	2017		
33	INAPROC		2017		
34	E-FORMASI		2018		
35	Talent Pool		2018		
36	SIM-RS	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	2018		
37	E-BOS		2018		
38	Aplikasi Antrian Pelayanan		2018		
39	E-LAPOR	Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat	2018		
40	SIMANTRA	Sistem Informasi Manajemen Integrasi Informasi Dan Pertukaran Data	2018		
41	DASHBOARD	Website Pesisir Selatan	2018	2018	2019
42	OSS	Online Single Submission	2018		
43	SIBAPER	Sistem Informasi Barang Persediaan	2018	2018	
44	Web Client Pajak	Web Client E-PAD Pessel	2019		
45	eTPP	Aplikasi Tambahan Penghasilan	2019	2021	2021;2022
46	SIMPEG	Sistem Informasi Kepegawaian	2019		2022
47	SIPENAMPUNG SINAR	Sistem Informasi Penampungan Data	2019	2019	
48	PPID	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	2019	2019	
49	WBS	Whistle Blowing System	2019		
50	E-SPPD	Sistem Informasi Perjalanan Dinas	2019	2019	2020;2021
51	SIMAYA	Sistem Administrasi Perkantoran Maya	2019	2019	2020
52	MANDEH	Monitoring Anggaran Desa Hebat	2019	2020	202.020.212.022
53	WEBSITE BERITA	Webiste Pemerintah Kabupaten	2019	2019	2020;2021
54	SINAR - 182 SUB DOMAIN	Sistem Informasi Nagari	2019		
55	SiCANTIK Cloud	Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik	2019	2019	2020;2021
56	SIMARDI		2019		
57	E-SAKIP	Sistem Informasi Akuntabilitas Pemerintahan	2019	2019	2020;2021;2022
58	JDIH	Jaringan Dokumentasi Informasi Publik	2019	2019	2020
59	SIMBANGDA	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	2019	2021	2022



60	TALIKASI	Portal Layanan Informasi & komunikasi Terintegrasi	2019	2019	
61	WEBSITE OPD	Webiste Perangkat Daerah	2018	2018	2020;2021;2022
62	E-KINERJA BKN	Sistem Informasi Kinerja ASN	2020	2021	2022
63	WEBSITE LPPL RADIO LANGKISAU FM	Lembaga Penyiaran Publik Lokal	2018	2018	
64	APLIKASI WEB MAIL OPD	Mail Perangkat Daerah	2017		
65	APLIKASI WEB MAIL ASN	Mail Perangkat Daerah	2017		
66	APLIKASI CLOUD KOMINFO	Storage Dan Share Data	2018		
67	SIMHP		2021		
68	SIPTL		2021		
69	LAPOR SP4N	Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional	2021		
70	OPENDATA	Satudata terbuka	2021	2021	2022
71	UKW	Unit Kepatuhan Warga	2021		
72	IBI PESSSEL	Ikatan Bidan Indonesia Pesisir Selatan	2021	2021	2022
73	PESSSEL DALAM GENGAMAMAN	Pesisir Selatan Dalam Genggaman	2022	2022	
74	BPHTP Pajak	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2022	2023	2023
75	ABON Pessel	Absensi Online	2021	2021	2022
76	APLIKASI FLLAJ BERBASIS WEB	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2020		
77	APLIKASI BEASISWA PESSSEL	Aplikasi Beasiswa Pesisir Selatan	2020		
78	APLIKASI UPK DPMDPPKB	Unit Pengelola Keuangan	2021		
79	SiRomet	Aplikasi Room Meeting	2022		
80	APLIKASI FLLAJ BERBASIS ANDROID	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2022	2022	
81	Aplikasi Vaksin	Aplikasi Vaksin	2021		
82	Aplikasi Informasi Digital	Aplikasi Informasi Digital	2019		
83	Aplikasi e-Monev	Evaluasi Monitoring	2018		
84	Siguru	Sistem Informasi Guru Kontrak	2022	2022	
85	Simapan	Sistem Informasi Masyarakat Penerima Bantuan	2021	2022	
86	SPBE	Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik	2021	2021	
87	siPENDEKAR	Sistem Informasi Pemadam Kebakaran	2022	2022	

88	siGAP-DANA	Sistem Informasi Tanggap Bencana	2022	2022	
89	PPDB Online	Penerimaan Peserta Didik Baru	2022	2022	
90	eSURVEY	Survey Statistik Potensi Nagari	2022	2022	
91	siMANTAN	Sistem Informasi Manajemen Pertanahan	2022	2022	
92	Lapau PESSSEL	Aplikasi Pemasaran Produk UMKM Pessel	2022	2022	
93	Manrisk SPBE	Aplikasi Manajemen Risiko SPBE	2020	2022	2022
94	SIPPORA Pessel	Aplikasi Informasi Pariwisata	2022	2022	
95	Pronasa	Program Nagari Bersekolah	2022	2022	

Program yang menunjang pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

NO	Program	Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp	%
1	Program Aplikasi Informatika	2.992.992.900	2.964.164.228	99,04%
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	154.650.900	128.845.190	83,31%
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Sektoral	203.166.500	156.333.450	76,95%
2	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	798.278.800	772.248.432	96,74%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.878.796.774	3.753.823.163	97%

Indikator ini ditunjang oleh semua program yang ada dengan target anggaran Rp.8.027.885.874,- dan realisasi sebesar Rp. 7.775.414.463,- atau capaian 96,86%.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 25.247.141,- atau 3,14 %.

Hambatan pada sasaran Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu belum adanya arsitektur SPBE sebagai kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

Tabel 3.11
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks SPBE
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks SPBE	tanpa satuan	3.20	3.48	108.75

Formulasi capaian indikator kinerja Indeks SPBE

Hasil Evaluasi Kemen PAN RB tentang SPBE

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Capaian Indeks SPBE Tahun 2021 : $\frac{3,48}{3,20} \times 100\% = 108,75\%$

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Indeks SPBE tahun 2022 adalah 3,20 dan realisasi level 3,48 dengan capaian adalah 108,75%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

2. Indeks Profesional ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari beberapa dimensi yaitu Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin. Pengukuran indeks berdasarkan Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Berikut tabel 3.12, realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesional ASN tahun 2022.

Tabel 3.12
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesional ASN Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Profesional ASN	tanpa satuan	62	49,93	80,53

Formulasi capaian indikator kinerja Indeks Profesional ASN

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Capaian Indeks Profesional ASN Tahun 2022 : $\frac{49,93}{62} \times 100\% = 80,53\%$

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Indeks Profesional ASN Tahun 2022 targetnya adalah 62 dan terealisasi 49,93 dengan capaian kinerja sebesar 80,53%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong **Berhasil** dengan predikat **Baik**.

Penjabaran :

1. Dimensi Kualifikasi (Nilai 13.38)

Kualifikasi merupakan salah satu dimensi dalam pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Dimensi ini memiliki bobot nilai maksimal sebesar 25% dari total nilai IP ASN yang dapat diperoleh oleh suatu instansi. Indikator yang diambil dalam pengukuran dimensi kualifikasi ini adalah riwayat jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS.

Berdasarkan nilai IP ASN yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022, dimensi kualifikasi menyumbangkan nilai sebesar 13.38 %. Berikut data riwayat pendidikan yang dicapai oleh PNS yang ada di pemda Pesisir Selatan.

NO	Jenis	Jumlah PNS	Bobot	%
1	S3	0	25	0,00
2	S2	412	20	1,47
3	S1/D4/Sederajat	3693	15	9,90
4	D3/ Sederajat	785	10	1,40
5	D1/D2/SMA/SMK/Sederajat	670	5	0,60
6	SD/SMP/Sederajat	34	1	0,01
	Total	5594		13,38

Salah satu langkah yang bisa diambil untuk peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi yaitu, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar. Pemberian tugas belajar diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dalam mengisi suatu jabatan. Apabila PNS memiliki keahlian atau kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya maka akan berdampak pada peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan sikap dan kepribadian profesional PNS sehingga diharapkan mampu meningkatkan nilai IP ASN.

2. Dimensi Kompetensi (Nilai 12.86)

Dalam pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Dimensi ini memiliki bobot nilai maksimal sebesar 40% dari total nilai IP ASN yang dapat diperoleh oleh suatu instansi. Indikator yang diambil dalam pengukuran dimensi kompetensi ini adalah riwayat pengembangan kompetensi yang dicapai oleh PNS.

PNS yang menduduki Jabatan Struktural (nilai maksimal 40)		
No	Indikator	Bobot per indikator
1	"Sudah" melaksanakan Diklat Kepemimpinan	15
2	"Belum" Diklat Kepemimpinan	0
3	Diklat Teknis (20 JP)	15
	Cara perhitungannya jika PNS mendapatkan "XX" JP maka bobot yang didapatkan adalah $\frac{XX}{20} \times 15 = \dots$	Contoh jika PNS mendapatkan 10 JP pada diklat teknisnya maka bobot nilai yang didapatkan adalah $\frac{10}{20} \times 15 = 7.5$
4	"Sudah" melaksanakan Seminar/ Workshop/ Magang/ Kursus/ dan sejenisnya dalam 2 tahun terakhir	10
5	"Belum" melaksanakan Seminar/ Workshop/ Magang/ Kursus/ dan sejenisnya dalam 2 tahun terakhir	0

PNS yang menduduki Jabatan Fungsional (nilai maksimal 40)		
No	Indikator	Bobot per indikator
1	"Sudah" melaksanakan Diklat Fungsional	15
2	"Belum" Diklat Fungsional	0
3	Diklat Teknis (20 JP)	15
	Cara perhitungannya jika PNS mendapatkan "XX" JP maka bobot yang didapatkan adalah $\frac{XX}{20} \times 15 = \dots$	Contoh jika PNS mendapatkan 10 JP pada diklat teknisnya maka bobot nilai yang didapatkan adalah $\frac{10}{20} \times 15 = 7.5$
4	"Sudah" melaksanakan Seminar/ Workshop/ Magang/ Kursus/ dan sejenisnya dalam 2 tahun terakhir	10
5	"Belum" melaksanakan Seminar/ Workshop/ Magang/ Kursus/ dan sejenisnya dalam 2 tahun terakhir	0

PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana (nilai maksimal 40)		
No	Indikator	Bobot per indikator
1	Diklat Teknis (20 JP)	22.5
	Cara perhitungannya jika PNS mendapatkan "XX" JP maka bobot yang didapatkan adalah $\frac{XX}{20} \times 22.5 = \dots$	Contoh jika PNS mendapatkan 5 JP pada diklat teknisnya maka bobot nilai yang didapatkan adalah $\frac{5}{20} \times 22.5 = 5.625$
2	"Sudah" melaksanakan Seminar/ Workshop/ Magang/ Kursus/ dan sejenisnya dalam 2 tahun terakhir	17.5
3	"Belum" melaksanakan Seminar/ Workshop/ Magang/ Kursus/ dan sejenisnya dalam 2 tahun terakhir	0

Berdasarkan nilai IP ASN yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022, dimensi kompetensi menyumbang nilai sebesar 12.86%. Berikut data riwayat pengembangan kompetensi yang dicapai oleh PNS Pemda Pesisir Selatan berdasarkan pembagian jenis jabatan.

NO	Jenis Jabatan	Jumlah PNS	Bobot Dimensi Kompetensi	%
1	JABATAN STRUKTURAL	410	5,09	0,37
2	JABATAN FUNGSIONAL	4123	16,61	12,24
3	PELAKSANA	1061	1,29	0,24
	Total			12,86

3. Dimensi Kinerja (Nilai 20.72)

Dalam pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dimensi Kinerja memiliki bobot nilai maksimal sebesar 30% dari total nilai IP ASN yang dapat diperoleh oleh suatu instansi. Indikator yang diambil dalam pengukuran dimensi kinerja adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP) dicapai oleh PNS dalam satu tahun periode penilaian.

Nilai prestasi kerja/kinerja yang seoran PNS peroleh dalam satu tahun terakhir akan mendapatkan bobot nilai sebagai berikut :

Nilai SKP	Bobot nilai yang diterima
91 - 100	30
76 - 90	20
61 - 75	15
51 - 60	5
50 ke bawah	1

Berdasarkan nilai IP ASN yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022, dimensi kinerja menyumbangkan nilai sebesar 20.72%. Berikut data riwayat hasil penilaian kinerja dicapai oleh PNS Pemda Pesisir Selatan dalam satu tahun berdasarkan pembagian jenis jabatan.

NO	Jenis	Jumlah PNS	Bobot Dimensi Kinerja	%
1	JABATAN STRUKTURAL	410	23,39	1,71
2	JABATAN FUNGSIONAL	4123	20,05	14,78
3	PELAKSANA	1061	22,27	4,22
	Total			20,72

4. Dimensi Disiplin (4.98)

Dimensi Disiplin memiliki bobot nilai maksimal sebesar 5% dalam pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang suatu instansi dapat memperolehnya. Indikator yang diambil dalam pengukuran dimensi disiplin adalah Data/ informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima oleh seoran PNS.

Rincian perhitungan bobot nilai yang dapat dilihat dari dimensi disiplin sebagai berikut :

Data/ informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima		Bobot nilai yang diterima
Tidak pernah dikenai hukuman disiplin		5
Pernah Dikenai Hukuman Disiplin	Ringan	3
	Sedang	2
	Berat	1

Berdasarkan nilai IP ASN yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022, dimensi disiplin mendapatkan nilai sebesar 4.98%. Berikut Data/ informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima oleh PNS Pemda Pesisir Selatan berdasarkan pembagian jenis jabatan.

NO	Jenis	Jumlah PNS	Bobot Dimensi Disiplin	%
1	JABATAN STRUKTURAL	410	4,96	0,36
2	JABATAN FUNGSIONAL	4123	4,99	3,68
3	PELAKSANA	1061	4,95	0,94
	Total			4,98

Sasaran 3 : Meningkatnya keterbukaan informasi dan pelayanan publik

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.13 berikut ini:

Tabel 3.13
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 3

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Kategori keterbukaan terhadap informasi publik	tanpa satuan	93	99.92	107.44
2.	Indek Kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik	tanpa satuan	82	82.65	100.79
Rata-rata Capaian					104,12

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 2 sebesar 104,12%. Pencapaian sasaran strategis 2 termasuk predikat **Sangat Baik**.

1. Kategori keterbukaan terhadap informasi publik

Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang **Keterbukaan Informasi Publik** adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. **Keterbukaan informasi publik didasarkan pada pertimbangan :**

- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- d. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Adapun tujuan dari **Keterbukaan informasi publik adalah** untuk :

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi dalam penilaiannya menggunakan 4 indikator, yaitu:

1. Mengumumkan Informasi Publik berbobot 25%;
2. Menyediakan Informasi Publik berbobot 20%;
3. Pelayanan Informasi Publik berbobot 25%; dan
4. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik berbobot 30%.

Tabel kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik

NO	KUALIFIKASI	NILAI
1	Informatif	97-100
2	Menuju Informatif	80-96
3	Cukup Informatif	60-79
4	Kurang Informatif	40-59
5	Tidak Informatif	<39

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat Nomor : 05/KEP/KI-PSB/XII/2022 Tentang Penetapan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2022. Hasil perolehan penetapan kualifikasi Pemingkatan dan Pemberian yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022 dengan nilai **99,92** dalam kategori **Informatif** dan meraih juara 1 se Provinsi Sumatera Barat.

Berikut tabel 3.14, realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kategori Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022.

Tabel 3.14
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kategori Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Kategori keterbukaan informasi publik	tanpa satuan	93	99,92	107,44

Formulasi capaian indikator kinerja Kategori Keterbukaan Informasi Publik

Penilaian Keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat.

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

$$\text{Capaian Kategori keterbukaan informasi publik Tahun 2021 : } \frac{99,92}{93} \times 100\% = 107,44\%$$

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Kategori keterbukaan informasi publik Tahun 2022 ditargetkan 93 (informatif) dan terealisasi sebesar 99,92 (informatif) dengan capaian kinerja sebesar 107,44%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**

Dalam pencapaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 menyediakan :

1. Pengumuman Informasi Publik yang disampaikan :

Daftar Informasi Publik (DIP) terdiri dari OPD = 4.488, Kecamatan = 1.824 dan Nagari = 3.017
Total DIP 9.329

2. Informasi Publik yang disediakan dan Jenis-jenis informasi :
 - a. Informasi Berkala
 - b. Informasi Setiap Saat
 - c. Informasi Serta Merta
 - d. Informasi Dikecualikan

Dalam melaksanakan pencapaian indikator keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan didukung/ditunjang oleh 2 (dua) yaitu Program Informasi & Komunikasi Publik dengan besaran anggaran sebesar Rp. 798.278.800 dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan besaran anggaran sebesar Rp. 3.878.796.774. Total keseluruhan anggaran sebesar Rp. 4.677.075.574 (96.77 %) terealisasi Rp. 4.526.071.595 (3.23%).

3. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
 - Dokumentasi Informasi Publik (DIP)
Kabupaten Pesisir Selatan untuk ke lima kalinya mendapatkan nilai "Informatif"



1. *Indek Kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik*

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat memerlukan data atau informasi kepuasan masyarakat, yang diukur secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 yang mengamanatkan bahwa seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Survey kepuasan sebagai tolak ukur keberhasilan

penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, dimana kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat diketahui dari persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan karena pelayanan publik merupakan indikator keberhasilan pemerintah yang dapat dirasakan masyarakat.

Berikut tabel 3.15, realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik Tahun 2022.

Tabel 3.15
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik	tanpa satuan	82	82.65	100.79

Formulasi capaian indikator kinerja Indeks kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik

$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$
Dimana :
$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Capaian Indeks kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik Tahun 2022 :	$\frac{82.65}{82}$	X	100%	=	100,79 %
---	--------------------	---	------	---	----------

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Indeks kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik Tahun 2022 target 82 dan realisasi 82,65 dengan capaian kinerja adalah 100,79%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terdiri atas 10 (sepuluh) unsur yang harus ada dalam Unsur SKM diantaranya : (1) Kejelasan Persyaratan, (2) Persyaratan Pelayanan, (3) Sistem, Mekanisme dan Prosedur, (4) waktu Pelayanan, (5) Biaya/Tarif Layanan, (6) Sarana dan Prasarana Pelayanan, (7) Perilaku Pelaksana, (8) Kompetisi Pelaksana, (9) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (10) Hasil Produk Layanan.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022 melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan survey kepuasan masyarakat kepada perangkat daerah/unit kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yakni Unit Pelayanan Teknis Puskesmas sebanyak 7 (tujuh) Puskesmas sebagai berikut :

1. Puskesmas Tarusan
2. Puskesmas Koto Berapak
3. Puskesmas Surantih
4. Puskesmas Kambang
5. Puskesmas Balai Selasa
6. Puskesmas Airhaji
7. Puskesmas Tanjung Beringin

Survei Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mendapatkan feed back/umpan balik atas kinerja/kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat guna perbaikan/peningkatan kinerja/kualitas pelayanan secara berkesinambungan. Program ini diselenggarakan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya IKM Kabupaten Pesisir Selatan 2022 dalam mewujudkan kepemimpinan yang baik (good governance).

Maksud dilakukan survey indek kepuasan masyarakat pada 7 (tujuh) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud adalah untuk mengetahui penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan. Sedangkan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah :

1. Terukurnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ada pada 7 Puskesmas Rawat Inap (Unit Kerja/ Satker) di Kabupaten Pesisir Selatan
2. Untuk mengetahui perkembangan kinerja pelayanan pada 7 Puskesmas Rawat Inap (Unit Kerja/ Satker) di Kabupaten Pesisir Selatan secara periodik.
3. Hasil pengukuran dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik selanjutnya.
4. Sebagai bahan dalam penetapan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pencapaian indikator makro Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Sebagai ukuran dasar dalam menilai penilaian pencapaian kinerja pelayanan pada tahun berikutnya.

Kategori pelayanan dibedakan dengan interval sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Nilai Indeks Kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan pada Pelayanan Puskesmas Tarusan, Puskesmas Koto Berapak, Puskesmas Surantih, Puskesmas Kambang, Puskesmas Balai Selasa, Puskesmas Air Haji dan Puskesmas Tanjung Beringin di Kabupaten Pesisir Selatan Selatan adalah :

- a. Nilai IKM setelah dikonversi = $3,306 \times 25 = 82,65$
- b. Mutu Pelayanan = **B**
- c. Kinerja Unit Pelayanan = **BAIK**

Bila diurut satu persatu dari unsur pelayanan, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.16
IKM atas Masing-Masing Unsur Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Nilai RR Unsur	Dikalikan 25
1	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0,363	9,073
2	Biaya/ Tarif Pelayanan	0,357	8,898
3	Hasil Produk Layanan	0,330	8,257
4	Perilaku Pelaksana	0,326	8,152
5	Kejelasan Persyaratan	0,325	8,127
6	Kompetisi Pelaksana	0,324	8,119
7	Sistem, Mekanisme Prosedur	0,322	8,057
8	Persyaratan Pelayanan	0,322	8,052
9	Sarana dan Prasarana	0,319	7,978
10	Waktu Pelayanan	0,316	7,907
Jumlah		3,306	82,649

Rekapitulasi Daftar Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No.	Unit Kerja Pelayanan Publik	Jumlah Responden	Nilai IKM	Kategori
1	2	3	4	5
1	Puskesmas Air Haji	150	86,265	Baik
2	Puskesmas Balai Selasa	150	84,067	Baik
3	Puskesmas Koto Berapak	150	82,683	Baik
4	Puskesmas Tarusan	150	81,667	Baik
5	Puskesmas Tanjung Beringin	150	81,433	Baik
6	Puskesmas Surantih	150	81,367	Baik
7	Puskesmas Kambang	150	81,067	Baik
Jumlah Nilai IKM		1.050	578,549	

Karena penilaian masyarakat ini masih berada pada nilai kategori B dan **BAIK**. Untuk itu perlu terus dilakukan perbaikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kedisiplinan petugas dan menjadikan kedisiplinan/kehadiran secara terukur.
2. Ketersediaan layanan pengaduan masyarakat.
3. Tindak lanjut dari keluhan pengaduan/saran masyarakat.
4. Memfasilitasi pengaduan masyarakat melalui form dan kotak pengaduan (diisi tanpa harus memberikan identitas), dan di evaluasi setiap hari.
5. Melakukan penelusuran atas pengaduan yang diterima.
6. Merespon pengaduan secepat mungkin.
7. Prosedur pelayanan di publikasikan (dalam bentuk papan, poster dan brosur).
8. Kejelasan tahapan pelayanan.
9. Kesederhanaan/kemudahan tahapan pelayanan/proses pelayanan.
10. Kecepatan pendaftaran pelayanan.
11. Diperlukan kemampuan menjelaskan dengan mudah kepada masyarakat tentang tahapan pelayanan dan dibantu dengan adanya poster/brosur. Dalam hal peningkatan kemampuan ini, pelatihan komunikasi dan service menjadi hal yang dibutuhkan oleh jajaran pelayanan Puskesmas Tarusan, Puskesmas Koto Berapak, Puskesmas Surantih, Puskesmas Kambang, Puskesmas Balai Selasa, Puskesmas Air Haji dan Puskesmas Tanjung Beringin di Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Jika diperlukan menata ulang sistem pendaftaran atau menambah loket pelayanan agar mempermudah kecepatan pelayanan dan memperpendek antrian pada loket antrian Puskesmas Tarusan, Puskesmas Koto Berapak, Puskesmas Surantih, Puskesmas Kambang, Puskesmas Balai Selasa, Puskesmas Air Haji dan Puskesmas Tanjung Beringin di Kabupaten Pesisir Selatan
12. Sarana dan prasarana penunjang pada Puskesmas Tarusan, Puskesmas Koto Berapak, Puskesmas Surantih, Puskesmas Kambang, Puskesmas Balai Selasa, Puskesmas Air Haji dan Puskesmas Tanjung Beringin di Kabupaten Pesisir Selatan, seperti ruangan pelayanan yang memadai dan nyaman, ruangan tunggu yang memadai, kafetaria, ruangan shalat dan WC umum.
13. Penyediaan Genset sebagai antisipasi bila pasokan listrik dari PLN mengalami gangguan.
14. Dibuat dan ditetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan. Standar pelayanan ini setidaknya-tidaknya memuat tentang persyaratan pelayanan, sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya dan produk pelayanan.
15. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga masyarakat memahami bagaimana proses penyelenggaraan pelayanan kependudukan sampai jangka waktu penyelesaian pelayanan.
16. Penambahan tenaga IT dibidang pelayanan dan pengoperasian peralatan pelayanan.

17. Peningkatan kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat yang dilayani, sehingga menimbulkan empati dari masyarakat yang dilayani.
18. Kejelasan petugas dan pembagian tugas dalam pelayanan.
19. Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsur pelayanan yang masih mendapat persepsi kepuasan terendah atau dibawah rata-rata, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat lebih baik lagi.
20. Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan *service excellent* (pelayanan prima) khususnya bagi petugas yang melayani masyarakat secara langsung, untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi internal mengenai sikap layanan dan disiplin kerja.
21. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna layanan terhadap petugas dalam memberikan pelayanan. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah :
 - a. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas.
 - b. Memberikan informasi secara komunikatif baik secara langsung maupun melalui media kepada pengguna layanan.
 - c. Memberikan penghargaan (reward) dan sanksi (*punishment*) kepada petugas.
22. Diperlukan penambahan petugas yang melayani masyarakat secara langsung, agar kecepatan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Disamping itu juga dapat melakukan pendistribusian petugas secara tepat agar produktifitas untuk masing-masing petugas pelayanan bisa lebih maksimal.
23. Diharapkan setelah mendapatkan Juara Harapan I Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik tingkat Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan lebih meningkatkan kinerja, agar Inovasi tersebut dapat menjadi acuan oleh Kabupaten/Kota lain.
24. Diperlukan upaya oleh masing-masing unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan kemudahan pelanggan dalam mengajukan keluhan melalui pembentukan Tim Kerja yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelanggan serta menyediakan media yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna layanan seperti memanfaatkan Sistem Informasi yang menyangkut kesehatan pada Kecamatan, telephone, SMS Center, Email, dan/atau penempatan Kotak Saran.

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 4 terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.17 berikut ini:

Tabel 3.17
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 4

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup	8	9	87,50
2.	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	95	144	48,42
3.	Prevalensi stunting	Persen	10,92	7	135,90
4.	Angka kesakitan	Persen	15,95	15,16*	95,05
Rata-rata Capaian					91,72

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran strategis 4 sebesar 91,72%. Pencapaian sasaran strategis 4 termasuk predikat **Sangat Baik**.

1. Angka Kematian Bayi

Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB), dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18
Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup	8	9	87,50%

Formulasi capaian indikator kinerja Angka kematian bayi

$$AKB = (D0 - \leq 1th) / (\Sigma \text{Lahir Hidup}) \times 1000$$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Capaian Indikator AKB ini termasuk dalam kategori **prediket Sangat Baik**. Gambaran Pencapaian indikator tersebut diatas jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 s.d 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19
Angka Kematian Bayi (AKB)
Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2022

Indikator	2020			2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Angka KematianBayi (AKB) / 1000 KH	8	6.9	119.25	8	7	112.5	8	9	87,50

Dari table diatas dapat dilihat bahwa, ada peningkatan jumlah realisasi Angka Kematian bayi (AKB) dari tahun 2021 sebanyak 7/1000 KH menjadi 9/1000 KH pada tahun 2022.

Tabel 3.20
Tabel : Jumlah Kematian Bayi di Puskesmas
Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020-2022

NO	PUSKESMAS	Jumlah Kelahiran			Jumlah Kematian Bayi		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Barung2 Belantai	397	320	329	4	3	0
2	Tarusan	515	482	547	9	2	4
3	Pasar Baru	413	389	420	2	2	2
4	Koto Berapak	333	321	330	2	4	6
5	Asam Kumbang	122	120	135	2	1	1
6	Salido	637	603	618	3	8	9
7	Lumpo	212	189	216	0	3	5
8	Pasar Kuok	383	318	385	7	4	8
9	IV Koto Mudik	171	168	161	6	4	1
10	Surantih	984	989	796	5	2	7
11	Kayu gadang			200			3
12	Kambang	746	698	645	1	2	1
13	Koto Baru	273	264	247	2	1	2
14	Balai Selasa	543	492	510	3	5	4
15	Air Haji	888	796	811	4	1	1
16	Air Pura	347	477	314	0	1	4
17	Indera Pura	501	309	463	1	5	5
18	Tapan	271	270	276	5	0	0
19	Rahul	278	277	258	2	0	2
20	Tanjung Beringin	393	408	387	4	7	1
21	Tanjung Makmur	257	284	288	2	3	4
	JUMLAH	9070	8664	8336	64	58	75

Jumlah Kematian bayi paling tinggi pada tahun 2022 ada di Puskesmas Salido, yaitu berjumlah 9 orang. Dari 75 bayi yang meninggal, penyebabnya antara lain BBLR, Asfiksia, pneumonia, Kelainan Bawaan, dan lainnya.

Terjadi peningkatan jumlah kematian bayi dari tahun 2021 s/d tahun 2022. yaitu dari 58 orang di tahun 2021 menjadi 75 orang di tahun 2022. Sedangkan jumlah kelahiran pada tahun 2022 adalah 8.336 orang.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan kematian ibu dan bayi tersebut. Kebijakan teknis yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam upaya menurunkan kematian ibu dan bayi adalah :

1. Mengalokasikan anggaran persalinan (Jampersal) bagi masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan lainnya.
2. Menyediakan rumah tunggu dan menyediakan konsumsi bagi pasien dan keluarga yang berdomisili jauh dari RSUD M. Zein Painan.
3. Menyediakan biaya transportasi bagi pasien yang akan dirujuk ke pelayanan yang lebih tinggi / ke M. Djamil Padang.
4. Mengadakan Audit Maternal Perinatal (AMP) berkoordinasi dengan dokter spesialis obgyn dan spesialis anak RSUD M. Zein Painan yang dilaksanakan tiap triwulan
5. Pelatihan Blended Learning Dokter dan Bidan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan.
6. Meningkatkan universal access dan coverage untuk pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) termasuk Keluarga Berencana.
7. Pelayanan Antenatal yang sesuai dengan standar
8. Pelaksanaan kelas ibu hamil dan kelas balita yang telah dilaksanakan di seluruh Puskesmas.
9. Melakukan kunjungan ke rumah ibu hamil resiko tinggi yang dilaksanakan oleh tenaga Puskesmas.
10. mengaktifkan Program Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) pada masing-masing nagari Siaga
11. Dengan melakukan audit kematian ke Puskesmas terkait.
12. Mendorong persalinan dengan tenaga kesehatan di fasyankes.
13. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan emergensi PONEK (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Komprehensif) dan PONED (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Dasar)
14. Meningkatkan kualitas in service training dan distribusi tenaga kesehatan : Bidan, perawat, dokter, dokter spesialis (tugas belajar, pengiriman residen, sister hospital)
15. Meningkatkan ketersediaan sumber daya kesehatan : Obat program dan bahan habis pakai, sarana/alat PONEK dan PONEK.
16. Menerapkan standar pelayanan kesehatan di Poskesdes / Polindes, Pustu (Puskesmas Pembantu, Puskesmas dan Rumah Sakit)
17. Memberdayakan keluarga dan masyarakat dalam KIA untuk meningkatkan health care seeking.
18. Peningkatan pemanfaatan pembiayaan kesehatan yang ada melalui dana dekonsentrasi, tugas perbantuan, Dana Alokasi Khusus, Jamkesmas dan Jampersal.
19. Peningkatan kerjasama dengan organisasi profesi, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Perguruan tinggi dan swasta.

2. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah : Banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per

100.000 kelahiran hidup. Pencapaian Indikator dari sasaran strategis ini terlihat pada tabel :

Tabel 3.21
Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	target	Realisasi	Capaian
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	/100.000 KH	95	144	48,42

Formulasi capaian indikator kinerja Angka Kematian Ibu

$$AKI = \frac{JKI}{JLH} \times 100.000$$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Capaian indikator AKI sebesar 100,69% dan masuk dalam kategori “*gagal*”. Gambaran Pencapaian indikator tersebut diatas jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22
Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020 s/d 2022

Indikator	2020			2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Angka Kematian Ibu (AKI) / 100.000 KH	92/100.000 KH	105/100.000 KH	93%	100/100.000 KH	172/100.000 KH	28%	95/100.000 KH	144/100.000 KH	48,42%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi Angka Kematian Ibu dari tahun 2021 ke tahun 2022 terjadi penurunan yaitu dari 172/100.000 KH pada tahun 2021 turun menjadi 144/100.000 KH pada tahun 2022 dari 8.336 orang Kelahiran Hidup. Angka Kematian Ibu pada Kabupaten Pesisir Selatan ini berada dibawah Target AKI RPJMN Tahun 2024 yakni 183/100.000 KH . Begitu juga jika dilihat dari jumlah ibu yang meninggal terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 14 orang pada tahun 2021 menjadi 12 orang pada tahun 2022. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Pesisir Selatan tersebar di beberapa Puskesmas seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.23
Jumlah Kematian Ibu (AKI) Per-Puskesmas
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2022

NO	PUSKESMAS	Jumlah Kelahiran			Jumlah Kematian Ibu		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Barung2 Belantai	397	320	329	0	1	1
2	Tarusan	515	482	547	1	1	0

3	Pasar Baru	413	389	420	1	1	0
4	Koto Berapak	333	321	330	0	0	0
5	Asam Kumbang	122	120	135	0	0	0
6	Salido	637	603	618	1	2	0
7	Lumpo	212	189	216	0	0	0
8	Pasar Kuok	383	318	385	1	0	0
9	IV Koto Mudik	171	168	161	0	0	0
10	Surantih	984	989	796	1	1	0
11	Kayu gadang			200			0
12	Kambang	746	698	645	0	0	1
13	Koto Baru	273	264	247	0	1	0
14	Balai Selasa	543	492	510	1	2	1
15	Air Haji	888	796	811	0	3	3
16	Air Pura	347	477	314	1	0	0
17	Inderapura	501	309	463	0	1	3
18	Tapan	271	270	276	0	0	1
19	Rahul	278	277	258	1	1	2
20	Tanjung Beringin	393	408	387	0	0	0
21	Tanjung Makmur	257	284	288	1	0	1
	JUMLAH	9070	8664	8336	9	14	12

Jika dilihat dari jumlah kematian ibu yang ada di Puskesmas se Kabupaten Pesisir Selatan, dapat dilihat bahwa jumlah kematian ibu pada tahun 2022 sebanyak 12 orang, terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2021. Kasus Kematian Ibu disebabkan oleh 4 (empat) orang disebabkan oleh Perdarahan, 1 (satu) orang disebabkan oleh Hipertensi dalam Kehamilan, 1 (satu) orang disebabkan oleh infeksi nifas, 1 (satu) orang disebabkan karena kelainan jantung, serta 5 (lima) orang gangguan cerebravovaskular.

3. Prevalensi Stunting

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005.

Indikator ini mengukur persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak, dan bukti menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda, khususnya pada

perkembangan otak, sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima gizi yang tepat.

Selain itu anak yang mengalami stunting beresiko lebih besar menderita penyakit menular dan tidak menular pada usia dewasa seperti jantung, diabetes, dan penyakit pembuluh darah. Oleh karena itu, indikator ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak. Berikut data prevalensi stunting di Kabupaten Pesisir Selatan 3 tahun terakhir:

Tabel 3.24
Realisasi Prevalensi Stunting
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2022

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
		2020	2021	2022
1. Prevalensi stunting	Persen	11,8	12,3	7

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa data prevalensi stunting di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 terealisasi sebesar 11,8% kemudian naik menjadi 12,3% pada tahun 2021. Namun kondisi ini pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 7%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Rendahnya capaian Kesehatan anakbalita (0-59 bulan) selama periode pandemic tahun 2020, sehingga berdampak pada kegiatan program Kesehatan anak pada tahun 2021.
2. Balita dengan imunisasi dasar lengkap (IDL) Sebagian besar tidak dibawa oleh orang tuanya untuk dilakukan stimulasi, Deteksi dan intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) sebagai salah satu pelayanan yang semestinya didapatkan oleh balita.
3. Masih rendahnya kualitas Puskesmas dalam manajemen kegiatan-kegiatan Kesehatan masyarakat dikarenakan salah satunya kurangnya tenaga Kesehatan sebagai sumberdaya penunjang kegiatan di Puskesmas.
4. Banyaknya tupoksi yang diemban oleh pengelola program yang ada di Puskesmas.
5. Kegiatan penanggulangan dan vaksinasi covid-19 yang mengganggu pelaksanaan kegiatan lainnya yang ada di Puskesmas.

Berikut tabel 3.25, realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Prevalensi Stunting Tahun 2022.

Tabel 3.25
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Prevalensi Stunting
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Prevalensi Stunting	Persen	10,92	7	135,90

Formulasi capaian indikator kinerja Prevalensi Stunting

$$\text{PAB(2)SPstunting} = \frac{(\text{JPKKJAB(2)SPstunting})}{(\text{JAB(2)})} \times 100\%$$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Prevalensi Stunting Tahun 2022 ditargetkan 10,92% dan terealisasi sebesar 7 % dengan capaian kinerja sebesar 135,90%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Upaya yang dilakukan untuk menyukseskan pencapaian indikator ini adalah :

- Pelaksanaan aksi konvergensi/integrasi penurunan stunting dengan TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting).
- Melakukan validasi data yang berkesinambungan perpuskesmas.
- Pelaksanaan supervisi pada posyandu terutama penggunaan antropometri yang baik dan standar.

4. Angka Kesakitan

Angka kesakitan (morbidity) merupakan indikator penting yang digunakan untuk penilaian dan perencanaan program yang bertujuan untuk menurunkan kesakitan dan kematian di suatu wilayah. Angka kesakitan ialah jumlah kejadian suatu penyakit yang dirumuskan sebagai jumlah anak yang sakit per 1000 anak yang bisa terkena penyakit. Angka ini dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan kesehatan secara umum, mengetahui keberhasilan program pemberantasan penyakit, dan sanitasi lingkungan serta memperoleh gambaran pengetahuan penduduk terhadap pelayanan kesehatan .

Untuk mengetahui angka kesakitan penduduk, data dapat bersumber dari sarana pelayanan kesehatan yang diperoleh dari laporan rutin yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Dalam pengumpulan data angka kesakitan, terdapat dua ukuran utama yang terdiri dari angka insidensi maupun angka prevalensi.

Berikut data angka kesakitan di Kabupaten Pesisir Selatan selama 3 tahun terakhir:

Tabel 3.26
Realisasi Angka Kesakitan
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2022

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
		2020	2021	2022
1. Angka Kesakitan	Persen	16,57	15,16	15,16*

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa angka kesakitan di Kabupaten Pesisir Selatan 2 tahun terakhir mengalami penurunan dimana tahun 2020 angka kesakitan sebesar 16,57. Pada tahun 2021 menurun hingga mencapai

angka 15,16. Sedangkan untuk tahun 2022 angka kesakitan masih menggunakan data tahun 2021 karena data angka kesakitan ini belum dipublikasi oleh BPS.

Berikut tabel 3.27, realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Angka Kesakitan Tahun 2022.

Tabel 3.27
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Angka Kesakitan
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Angka Kesakitan	Persen	15,95	15,16	95,05

Formulasi capaian indikator kinerja Angka kesakitan

$$AM = \frac{JKK}{JK} \times 100\%$$
$$AM = (\text{Angka Kesakitan})$$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Angka Kesakitan Tahun 2022 ditargetkan 15,95% dan terealisasi sebesar 15,16% dengan capaian kinerja sebesar 95,05%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Sasaran 5 : Meningkatnya perlindungan kesehatan masyarakat

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 5 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.28 berikut ini:

Tabel 3.28
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan	Persen	80.00	79.00	99.00
Rata-rata Capaian					99.00

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 5 sebesar 99,00%. Pencapaian sasaran strategis 5 termasuk predikat **Sangat Baik**.

5. Persentase Masyarakat yang Terlindungi Hak Layanan Kesehatan

Hak atas kesehatan adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hak-Hak dalam Kesehatan yaitu:

- Hak memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- Hak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- Berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;

Upaya pemenuhan hak atas kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yang meliputi pencegahan dan penyembuhan. Upaya pencegahan meliputi penciptaan kondisi yang layak bagi kesehatan baik menjamin ketersediaan pangan dan pekerjaan, perumahan yang baik, dan lingkungan yang sehat.

Tabel 3.29
Realisasi indikator Persentase Masyarakat yang Terlindungi Hak Layanan Kesehatan Tahun 2020 s.d 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
		2020	2021	2022
1. Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan	Persen	70,19	64,70	79,00

Dari table diatas realisasi tahun 2022 ada peningkatan persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan Kesehatan dibandingkan dengan tahun 2021, atau terjadi peningkatan persentase peserta JKN-KIS di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu dari 64,70% tahun 2021 meningkat menjadi 79,00% tahun 2022.

Penurunan ini disebabkan oleh terbitnya Permensos No. 92/HUK/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Tahun 2021. Akibat dari Permensos tersebut pengurangan kuota peserta PBI JKN-KIS dari anggaran APBN di kabupaten Pesisir Selatan yaitu sebanyak 50.000 jiwa. Tujuan dari Permensos ini adalah untuk pembersihan data peserta yang ganda, meninggal, yang sudah mampu dan NIK yang tidak update untuk divalidasi dan verifikasi oleh Dinas Sosial PPrAKabupaten Pesisir Selatan.

Berikut tabel 3.30, realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan Tahun 2022.

Tabel 3.30
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan	persen	80,00	79,00	99,00

Formulasi capaian indikator kinerja Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan

$$\frac{(\text{Jumlah peserta BPJS kesehatan} + \text{BPJS Ketenagakerjaan} + \text{JKN} + \text{Jamkesda})}{(\text{Jumlah penduduk})} \times 100\%$$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Capaian Angka Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan Tahun 2022 :	79,00	X	100%	=	98,75%
	80,00				

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan Tahun 2022 ditargetkan 80,00% dan terealisasi sebesar 79,00% dengan capaian kinerja sebesar 98,75%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Sasaran 6 : Meningkatnya perlindungan Sosial Masyarakat

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 6 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.31 berikut ini:

Tabel 3.31
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 6

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	53	66,21	124,92
Rata-rata Capaian					124,92

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 6 sebesar 124,92%. Pencapaian sasaran strategis 6 termasuk predikat **Sangat Baik**.

Formulasi capaian indikator kinerja Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar

$$\frac{\text{Persentase PPKS yang memperoleh Bansos untuk pemenuhan dasar}}{\text{Jumlah keseluruhan PPKS}} \times 100\%$$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

1. Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Definis operasional dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan

fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Jenis-jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS):

- 1) Anak balita terlantar
 - a) terlantar/ tanpa asuhan yang layak;
 - b) berasal dari keluarga sangat miskin / miskin;
 - c) kehilangan hak asuh dari orangtua/ keluarga;
 - d) Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga;
 - e) Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan
 - f) Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang
- 2) Anak terlantar
 - a) berasal dari keluarga fakir miskin;
 - b) anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
 - c) anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- 3) Anak yang hadapan dengan hukum
 - a) disangka;
 - b) didakwa; atau
 - c) dijatuhi pidana
- 4) Anak jalanan
 - a) menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun ditempattempat umum; atau
 - b) mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempattempat umum.
- 5) Anak dengan Kedisabilitas (ADK)
 - a) Anak dengan disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara
 - b) Anak dengan disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik
 - c) Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda
 - d) Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.
- 6) Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah
 - a) anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
 - b) sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis;
 - c) pernah dianiaya dan/atau diperkosa; dan
 - d) dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya)
- 7) Pengemis
- 8) Gelandangan
- 9) Pemulung

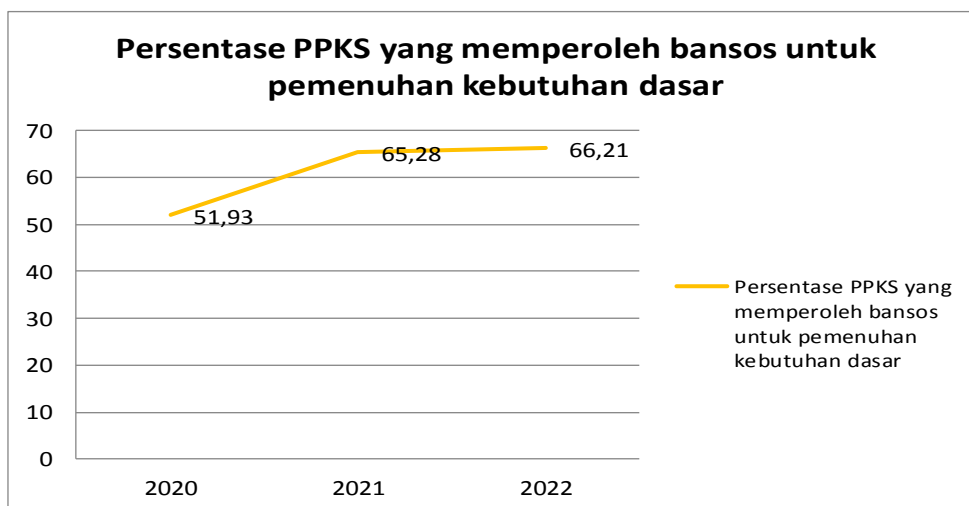
Masyarakat yang masuk dalam jenis-jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial diatas, berhak memperoleh Bantuan Sosial diantaranya Bantuan Program PKH, Program Sembako, Bantuan Iuran dan lain-lain untuk pemenuhan kebutuhan dasar baik dari kementerian sosial, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Capaian yang diperoleh dengan membandingkan

jumlah bantuan yang diperoleh masyarakat dengan jumlah masyarakat yang terdata dalam DTKS.

Tercapainya target Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dapat berhasil juga dikarenakan dukungan oleh bantuan yang berasal dari kementerian Sosial berupa bantuan Sembako, Bantuan Program PKH dan bantuan Iuran PBI APBN.

Tabel 3.32
Data Perkembangan Realisasi PPKS yang memperoleh Bantuan Tahun 2020 s.d. 2022

Uraian	Satuan	Tahun		
		2020	2021	2022
1 Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	51,93%	65,28%	66,21%



Gambar 3.2. Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap pencapaian target indikator Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar diantaranya :

a. Faktor Keberhasilan/Peningkatan

Faktor keberhasilan dalam penyaluran bansos adalah kerjasama semua pihak, khususnya tenaga di pemerintahan terendah terkait data penerima yang sudah tidak update dikarenakan meninggal dunia, pindah domisili dan sudah masuk dalam kategori mampu. Verifikasi dan validasi secara berkala sepanjang tahun sangat menentukan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial ini.

b. Faktor Kegagalan/Penurunan

Faktor kegagalan adalah masih adanya data penerima yang belum update sehingga penyaluran bantuan sosial ini tidak bisa maksimal 100%, adanya bantuan yang tidak dapat disalurkan merupakan indikasi

kegagalan dan penurunan dalam pemberian dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

c. Efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya terdiri dari penggunaan sumber daya manusia berupa tenaga pekerja sosial di kecamatan dan dipemerintahan nagari, koordinasi yang kuat dan intens sangat diperlukan. Efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dilakukan dengan refocusing anggaran pada rekening belanja yang sangat diperlukan dalam penyaluran bantuan sosial sampai kepada masyarakat.

Program/kegiatan penunjang sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Program Pendukung terdiri dari:

1. Program rehabilitasi sosial, dengan target anggaran Rp. 87.889.110,- dan realisasi sebesar Rp. 87.552.225,-, atau capaian 99,61%.
2. Program perlindungan dan jaminan sosial, dengan target anggaran sebesar Rp. 3.494.773.716, dan realisasi sebesar Rp. 2.867.111.625,-, atau capaian 82,04%.
3. Program penanganan bencana, dengan target anggaran sebesar Rp. 74.548.870,- dan realisasi sebesar Rp. 74.235.950,-, atau capaian 99,58%.

Berdasarkan uraian program diatas diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 ditargetkan anggaran sebesar Rp. 3.657.211.696 dengan realisasi Rp. 3.028.899.800, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 628.311.896 atau 17,18 %.

Sasaran 7 : Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 7 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.33 berikut ini:

Tabel 3.33
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 7

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pencapaian skor pola pangan harapan	Persen	87,00	80,4	92,41
2.	Pengeluaran per kapita	Rp./org/thn	9,369,000	9.686.000	103,38
Rata-rata Capaian					97,90

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 7 sebesar 97,90%. Pencapaian sasaran strategis 7 termasuk predikat **Sangat Baik**.

1. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan

PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Skor PPH merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan program ketahanan pangan melalui kondisi/situasi konsumsi pangan masyarakat dilakukan analisis situasi konsumsi pangan dapat menggambarkan akses masyarakat terhadap pangan, status gizi dan kesejahteraannya, yang dinyatakan dalam nilai skor mutu pangan atau skor pola Pangan Harapan (PPH). Pola Pangan Harapan adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya baik secara absolut maupun relative terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mencakup kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, aroma dan cita rasa. Defenisi PPH konsumai adalah proporsi kelompok pangan yang menggambarkan keberagaman pangan dalam kondisi konsumsi pangan. Jumlah skor PPH konsumsi maksimal 100.

Langkah-langkah menghitung Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah sebagai berikut :

1. Mengelompokkan jenis pangan ke dalam delapan kelompok pangan.
2. Menghitung jumlah energi masing-masing kelompok pangan dengan DKBM (Daftar Komposisi Bahan Makanan)
3. Menghitung persentase masing-masing kelompok pangan terhadap total energi per hari.
4. Skor PPH dihitung dengan mengalikan persen energi dari kelompok pangan dengan bobot.

Sembilan kelompok pangan antara lain : padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah dan biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta lain-lain.

Formulasi capaian indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan

$$\text{PPH} = \% \text{ Angka Kecukupan Gizi (AKG)} \times \text{bobot masing-masing kelompok pangan}$$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Urusan Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri atas subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Berikut data realisasi dan capaian indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2022:

Tabel 3.34
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Skor Pola Pangan
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Skor Pola Pangan Harapan	persen	87	80.4	92.41

Capaian Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2022 :	$\frac{80.4}{87} \times 100\% = 92.41\%$
---	--

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2022 ditargetkan 87% dan terealisasi sebesar 80,4% dengan capaian kinerja sebesar 92,41%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini dengan predikat **Sangat Baik**.

Berikut tabel Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2020-2022 :

Tabel 3.35
Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan
Tahun 2020-2022

No	Uraian	Target			Realisasi		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.	Skor Pola Pangan Harapan	82	86,5	87	86,4	81,7	80,4

Pada tahun 2020 skor pola pangan harapan mencapai 86,4, angka ini melebihi dari target tahun tersebut sebesar 82. Sementara tahun 2021 terjadi penurunan dari target 86,5 menjadi 81,7. Sedangkan pada tahun 2022 kembali terjadi penurunan angka skor Pola Pangan Harapan dari target 87 menjadi 80,4.

Dari table diatas menunjukkan adanya penurunan pencapaian target konsumsi di 3 tahun terakhir. Berikut dapat dijelaskan perbandingan skor pola pangan harapan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Skor Maksimal Pola Pangan Harapan tahun 2020 hingga 2022, seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.36
Perbandingan Skor PPH Kabupaten Pesisir Selatan
dengan Skor Maksimal PPH (tahun 2020,2021,2022)

No	Kelompok pangan	Skor Maks PPH	Skor PPH 2020	Skor PPH 2021	Skor PPH 2022
1	Padi-padian	25,0	25,0	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	2,5	0,6	0,6	0,7
3	Pangan Hewani	24,0	19,0	20,2	18,9
4	Minyak dan Lemak	5,0	5,0	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	1,0	1,0	1,0	1,0

6	Kacang-kacangan	10,0	3,8	2,6	2,5
7	Gula	2,5	2,4	1,9	1,8
8	Sayur dan Buah	30,0	29,6	25,4	25,6
9	Lain-lain	0,0	0,0	0,0	0,0
	Jumlah	100,0	86,4	81,7	80,4

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa kelompok pangan yang mengalami penurunan dibandingkan dengan skor yang telah ditetapkan. Untuk kelompok padi-padian cenderung stabil. Tingginya konsumsi kelompok padi-padian khusus beras, kemungkinan disebabkan oleh pola makan masyarakat yang masih tergantung pada beras sebagai sumber energi dan didukung oleh produksi dan ketersediaan beras yang cukup tinggi. Sedangkan konsumsi 8 (delapan) kelompok pangan lainnya baik kuantitas, kualitas maupun tingkat keragamannya relatif masih rendah jika dibandingkan dengan standar konsumsi pangan nasional. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal seperti bahan pangan yang relatif masih dan rendahnya daya beli masyarakat.

2. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu yang lalu, sedangkan untuk bukan makanan dihitung selama sebulan dan 12 bulan yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka-angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengkonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.

Tabel 3.37
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Pengeluaran Perkapita
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pengeluaran perkapita	Rp./org/thn	9,369,000	9.686, 000	103,38

Formulasi capaian indikator kinerja Pengeluaran Perkapita

$$Y^* = \frac{Y}{IHK} \times 100\%$$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Capaian pengeluaran Perkapita Tahun 2022	=	$\frac{\text{Rp.9,369,000}}{\text{Rp.9,686,000}}$	X	100%	=	103,38%
--	---	---	---	------	---	---------

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja Pengeluaran Perkapita Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 9,369,000 dan terealisasi sebesar Rp. 9,2686,000 dengan capaian kinerja sebesar 103,38%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Tabel 3.38
Realisasi Pengeluaran Perkapita Tahun 2020-2022

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
		2020	2021	2022
Pengeluaran perkapita	Rp./org/thn	9.212.000`	9.270.000	9.686.000



Gambar 3.3. Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2022

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa Pengeluaran Per Kapita sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan tren positif yang baik untuk kemajuan Kabupaten

Pesisir Selatan. Beberapa faktor yang mendorong meningkatnya pengeluaran per kapita diantaranya adalah bertambahnya pendapatan masyarakat, meningkatnya kebutuhan, tingkat inflasi serta pulihnya kondisi ekonomi masyarakat setelah selesainya pandemi covid 19.

Seiring dengan bertambahnya pendapatan dapat mendorong kemampuan daya beli yang akan menstimulasi peningkatan konsumsi masyarakat. Konsumsi pokok yang paling dibutuhkan masyarakat adalah bahan pangan. Harga bahan pangan dipengaruhi ketersediaan barang atau keseimbangan tingkat permintaan dan penawaran. Bila terjadi kesenjangan antara tingkat permintaan dan penawaran maka akan mengakibatkan inflasi harga barang. Semakin tinggi kesenjangan maka akan semakin tinggi tingkat inflasi yang terjadi. Hal ini akan berdampak pada kenaikan harga barang dan akan berakibat pada bertambahnya pengeluaran masyarakat untuk memberi barang-barang yang dibutuhkannya. Konsumsi merupakan salah satu faktor penggerak pertumbuhan ekonomi.

Tingkat konsumsi masyarakat akan turut menentukan kecepatan akselerasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan. Hal yang harus diperhatikan adalah pertumbuhan ekonomi harus berimbangan dengan terciptanya pemerataan pendapatan. Artinya pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja baru, pengurangan pengangguran dan pengurangan kemiskinan. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 menunjukan pertumbuhan dapat menciptakan lapangan kerja baru, yang berkolerasi dengan turunnya tingkat pengangguran terbuka, mengecilnya kesenjangan pendapatan sehingga menurunkan tingkat kemiskinan. Terjadi peningkatan pendapatan berbanding lurus dengan peningkatan konsumsi/pengeluaran masyarakat tapi tingkat inflasi relatif kecil dan terkendali, ini menunjukan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan menjadi lebih baik.

Sasaran 8 : Meningkatkan Investasi PMA dan PMDN

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 8 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.39 berikut ini:

Tabel 3.39
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 8

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai investasi swasta dan masyarakat	Juta Rp.	310,000,000,000	679.243.825.238	219,11
<i>Rata-rata Capaian</i>					219,11

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 8 sebesar 219,11%. Pencapaian sasaran strategis 8 termasuk predikat **Sangat Baik**.

1. Nilai Investasi swasta dan masyarakat

Investasi adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Seorang yang berinvestasi disebut dengan investor atau penanam modal. Sedangkan nilai investasi itu sendiri yaitu (investment value) adalah nilai dari suatu perusahaan atau saham (business interest) atau kepentingan dalam perusahaan yang bersifat spesifik terhadap seorang investor, didasarkan pada atau terkait dengan persyaratan tertentu dari seorang atau kelompok investor.

Sedangkan indikator nilai investasi swasta dan masyarakat digunakan untuk melihat besarnya jumlah investasi swasta dan investasi masyarakat yang ditanamkan di daerah. (Semua Investasi di luar Investasi Pemerintah)

Pendataan realisasi investasi swasta dan masyarakat didapatkan dari 15 Kecamatan. Pendataan ini terlaksana berkat koordinasi Penanaman Modal ke BKPM RI dan BKP Provinsi. Serta terselenggaranya Operasional Tim Task Force Investasi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal dan regulasi kemudahan berusaha di Kabupaten Pesisir Selatan.

Nilai investasi yang ada sekarang di Kabupaten Pesisir Selatan, merupakan nilai investasi swasta. Sementara untuk nilai investasi masyarakat belum ada dilakukan penghitungan. Berikut perkembangan nilai investasi swasta di Kabupaten Pesisir Selatan 3 tahun terakhir dari tahun 2020 s.d. 2022:

Tabel. 3.40
Perkembangan Nilai Investasi di Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020 s.d. 2022

Tahun	Uraian		Total nilai investasi
	Swasta	Masyarakat	
2020	704.435.368.737	Nihil	704.435.368.737
2021	1.767.753.324.797	Nihil	1.767.753.324.797
2022	679.243.825.238	Nihil	679.243.825.238

Sumber data : Dinas DPMPSTP Kabupaten Pesisir Selatan

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan nilai investasi di Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun ke tahun terjadi fluktuasi. Tahun 2020 investasi di kabupaten pesisir selatan terrealisasi sebesar

Rp. 704.435.368.737 dengan jumlah investor sebanyak 162 investor, yang terdiri dari 13 PMA dan 149 PMDN.

Selanjutnya pada tahun 2021, investasi di kabupaten pesisir selatan terrealisasi sebesar Rp. 1.767.753.342.796 dengan jumlah investor sebanyak 162 investor, yang terdiri dari 13 PMA dan 149 PMDN. Sedangkan tahun 2022 investasi di kabupaten pesisir selatan terrealisasi sebesar Rp.679.243.825.238 dengan jumlah investor sebanyak 37 investor, yang terdiri dari PMA dan PMDN. Terjadi penurunan nilai investasi pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

1. Pada tahun 2021 pelaporan kegiatan usaha melalui sistem manual dan sistem SPIPISE sampai kondisi agustus 2021. Pada pertengahan agustus 2021 sistem penyampaian pelaporan beralih ke Sistem OSS RBA melalui Web LKPM pada saat penyampaian laporan, pelaku usaha melaporkan seluruh modal usaha (baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan modal tetap maupun modal kerja). Akan tetapi terjadi pelaporan ganda yang dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga realisasi investasi menjadi tinggi.
2. Untuk tahun 2022 pelaporan LKPM hanya mengatur kepada pelaku usaha yang nilai investasi sampai dengan 5 M (untuk pelaku usaha yang beraktifitas pada tahun 2022), sementara pelaku usaha yang beraktifitas pada tahun sebelumnya tidak di hitung dalam realisasi investasi tahun 2022.
3. Faktor menurun lainnya disebabkan masih kurangnya sumberdaya manusia yang memahami tentang cara pelaporan LKPM dengan menggunakan Aplikasi.

Adapun program pendukung dalam pencapaian target indikator nilai investasi swasta dan masyarakat pada tahun 2022 yaitu Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Dengan target anggaran Rp. 415.374.936 Dan realisasi sebesar Rp. 312.047.846 Atau capaian 75,12%) berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.103.327.090 atau 33,11%.

Sasaran 9 : Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 9 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.41 berikut ini:

Tabel 3.41
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 9

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	Triliun Rp.	3.61	3.74	103.60
2.	Nilai PDRB Sektor Industri (ADHK)	Milyar Rp.	707.32	741.26	104.80
Rata-rata Capaian					104,20

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 9 sebesar 104,20%. Pencapaian sasaran strategis 9 termasuk predikat **Sangat Baik**.

1. Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)

Indikator Nilai PDRB Sektor Pertanian termasuk indikator yang mempunyai peran penting dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 karena peran sektor pertanian ini semakin penting dan strategis dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pertanian pada negara berkembang dapat dilihat sebagai suatu sektor ekonomi yang sangat potensial. Ada 4 (empat) kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan dan pembangunan yaitu:

1. Sektor pertanian merupakan ekspansi dari sektor ekonomi lainnya baik dari sisi permintaan sebagai sumber pemasok makanan yang secara kontinyu mengikuti pertumbuhan penduduk
2. Sektor pertanian berperan sebagai sumber permintaan domestik bagi produk produk sektor ekonomi dalam memberikan kontribusi pasar
3. Sebagai sumber modal untuk investasi, karena proses pembangunan ekonomi terjadi transfer surplus tenaga kerja dari pertanian ke industri
4. Sebagai sumber surplus neraca perdagangan, baik lewat ekspor hasil pertanian maupun dengan peningkatan produksi pertanian

Terkait dengan capaian Nilai PDRB Sektor pertanian tahun 2022, dalam laporan kinerja ini akan dijabarkan dalam beberapa sub sektor pertanian yang memberikan kontribusi terhadap nilai PDRB tersebut. Nilai PDRB itu sendiri dihitung oleh Badan Pusat Statistik dengan menggunakan metoda-metoda tertentu dengan beberapa faktor yang menjadi tolak ukur. Namun demikian ada beberapa indikator yang dapat digambarkan untuk menjawab pencapaian indikator Nilai PDRB Sektor Pertanian yang berkaitan langsung dengan kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut indikator indikator sub sektor pertanian yang memberikan kontribusi diantaranya pada tabel 3.42 berikut ini:

Tabel 3.42
Capaian indikator kinerja Sub Sektor Pertanian

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA 2022		
			TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	1.1. Jumlah Produksi Pertanian	Ton	719.816	752.837,81	104,59
	a. Padi	Ton	187.314	156.430,30	83,51
	b. Jagung	Ton	140.849	208.010,52	147,68
	c. Cabe Merah	Ton	4.599	5.041,90	109,63
	d. Bawang merah	Ton	205	146,30	71,37
	e. Jengkol	Ton	2.385	5.746,60	240,95
	f. Jeruk	Ton	17.204	4.465,10	25,95
	g. Manggis	Ton	2.468	4.695,10	190,24
	h. Durian	Ton	8.446	18.482,00	218,83
	i. Kelapa Sawit	Ton	344.558	338.348,86	98,20
	j. Kopi	Ton	2.366	2.372,90	100,29
	k. Gambir	Ton	5.861	5.944,49	101,42
	l. Kelapa Dalam	Ton	3.561	3.153,76	88,56
	1.2. Persentase Peningkatan Populasi Ternak	%	1,20	4,78	398,06
	a. Sapi Potong	%	1,00	0,04	4,00
	b. Itik	%	1,80	10,84	602,22
	c. Ayam Buras	%	0,80	3,45	431,25
	1.3. Jumlah Produksi Perikanan		48.977	50.184	102,46

1. Peningkatan Produksi Utama Padi

Produksi Padi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 s.d 2022

Kabupaten/ Kota	TAHUN 2021			TAHUN 2022*)		
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kw/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kw/Ha)
1	2	3	4	5	6	7
Kepulauan Mentawai	376,77	940,98	24,97	603,61	1.423,29	23,58
Pesisir Selatan	30.440,73	146.140,73	48,01	28.779,19	156.430,34	54,36
Solok	32.553,83	171.335,32	52,63	32.901,89	173.816,33	52,83
Sijunjung	13.591,03	49.837,55	36,67	14.031,40	50.704,96	36,14
Tanah Datar	32.375,24	182.566,15	56,39	31.023,69	167.001,84	53,83
Padang Pariaman	25.461,11	115.529,25	45,37	27.244,15	132.047,54	48,47
Agam	29.690,65	152.606,78	51,40	27.780,60	140.831,03	50,69
Lima Puluh Kota	28.119,14	123.703,37	43,99	25.526,84	115.353,82	45,19
Pasaman	28.220,58	129.629,39	45,93	29.509,35	138.324,72	46,87
Solok Selatan	13.693,36	54.869,13	40,07	12.047,91	50.487,43	41,91
Dharmasraya	5.226,46	25.537,80	48,86	9.984,60	45.975,14	46,05
Pasaman Barat	11.023,77	52.247,64	47,40	10.025,27	49.826,76	49,70
Padang	9.370,93	47.258,32	50,43	8.857,74	44.193,45	49,89
Solok	2.175,86	12.775,72	58,72	2.156,94	13.792,83	63,95

Sawah Lunto	1.457,89	7.896,95	54,17	1.852,64	10.855,66	58,60
Padang Panjang	784,29	4.933,85	62,91	826,83	5.549,37	67,12
Bukittinggi	479,69	3.325,28	69,32	617,78	3.978,76	64,40
Payakumbuh	4.969,59	24.857,83	50,02	4.950,72	25.825,58	52,17
Pariaman	2.381,03	11.217,34	47,11	3.161,96	16.208,96	51,26
SUMATERA BARAT	272.391,95	1.317.209,38	48,36	282.234,22	1.393.242,54	49,36

Dari tabel diatas dapat dilihat terjadi peningkatan produksi padi dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 sebesar 7,04%. peningkatan produksi ini di pengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

a) Peningkatan penggunaan benih padi unggul

Benih unggul bermutu menjadi syarat utama dalam memaksimalkan hasil produksi tanaman padi, selain dengan penanganan faktor-faktor agronomi. Benih bermutu merupakan benih dengan tingkat kemurnian dan daya tumbuh yang tinggi. Di Kabupaten Pesisir Selatan persentase penggunaan benih padi unggul meningkat dari Tahun ke Tahun. Pada Tahun 2020 penggunaan benih padi unggul hanya sebesar 10%, Tahun 2021 sebesar 12% dan Tahun 2022 ini penggunaan benih unggul meningkat menjadi 20,50% dari total luas tanam 38.810 Ha.

b) Penggunaan Pupuk Yang Berimbang

Pupuk merupakan faktor pendukung peningkatan produktivitas pertanian. Pada dasarnya, pupuk merupakan makanan bagi tanaman. Seperti manusia, jika asupan gizi cukup, maka pertumbuhan manusia akan bagus dan kualitas dari manusia itupun juga akan bagus. Begitu juga dengan padi, jika hara yang dibutuhkan lengkap maka peningkatan produksi juga akan lebih mudah tercapai.

Di bawah ini dapat dilihat tingkat penyaluran pupuk bersubsidi Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 :

NO	JENIS PUPUK	ALOKASI (TON)	DISTRIBUSI (TON)	CAPAIAN (%)
1	Urea	7.622	7.162	93,96
2	NPK Phonska	6.600	6.600	99,99
3	Organik	622	622	99,95
Jumlah		14.222	13.762	96,76

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa penyerapan pupuk bersubsidi oleh petani/kelompok tani **sangat baik**. Dari 3 (tiga) jenis pupuk bersubsidi yang dialokasikan sebesar 14.222 ton dan realisasi penyerapan oleh petani/kelompok tani sebesar 13.762 ton atau sebesar 96,76%.

c) Ketersediaan dan Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian

Ketersediaan dan Pemanfaatan alat dan mesin pertanian dapat mendorong petani dalam transformasi teknologi kearah yang lebih modern, efektif dan ramah lingkungan. Dengan penerapan mekanisasi pertanian, dapat meningkatkan mutu pengelolaan tanah, meningkatkan indeks pertanaman padi, mengurangi kehilangan hasil, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian yang bermuara pada peningkatan produksi padi dan pendapatan petani.

d) Pendampingan dan pembinaan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)

Penyuluh Pertanian Lapangan melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap petani/kelompok tani dalam budidaya padi. Pendampingan dan pembinaan dilakukan mulai dari pra tanam sampai panen dan penanganan pasca panen.

2. Jagung

Produksi Jagung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 s/d 2022

NO	KABUPATEN/KOTA	PRODUKSI (TON)		
		2020	2021	2022*)
1	Kab. Mentawai	37,50	134,00	121,58
2	Kab. Pesisir Selatan	241.163,07	189.636,00	208.010,52
3	Kab. Solok	4.059,06	3.255,74	2.488,38
4	Kab. Sijunjung	5.469,82	7.663,81	7.208,81
5	Kab. Tanah Datar	34.040,31	28.451,28	26.999,63
6	Kab. Padang Pariaman	35.007,31	53.462,03	51.700,86
7	Kab. Agam	106.579,64	119.623,71	121.130,72
8	Kab. Lima Puluh Kota	46.400,79	42.636,05	50.459,84
9	Kab. Pasaman	69.529,33	106.073,11	114.099,69
10	Kab. Solok Selatan	77.845,21	80.414,06	103.385,08
11	Kab. Dharmasraya	4.042,36	14.694,37	2.559,11
12	Kab. Pasaman Barat	262.284,36	276.183,84	222.557,75
13	Kota Padang	115,00	119,26	224,29
14	Kota Solok	903,87	700,90	554,13
15	Kota Sawahlunto	144,50	310,21	791,41
16	Kota Padang Panjang	-	-	-
17	Kota Bukittinggi	121,77	169,51	156,70
18	Kota Payakumbuh	1.533,81	1.846,77	2.932,78
19	Kota Pariaman	1.602,01	1.380,06	1.253,46
Jumlah		890.879,73	926.754,74	916.634,75

Dari Tabel diatas dapat dilihat produksi jagung di Kabupaten Pesisir Selatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir berfluktuatif. Pada Tahun 2020 produksi jagung Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 241.163,07 ton terjadi penurunan pada Tahun 2021 sebesar 27,31% atau hanya sebesar 189.636 ton. Tahun 2022 terjadi peningkatan produksi jagung sebesar 9,69% atau sebanyak 208.010,52 ton.

Faktor peningkatan produksi jagung ini hampir sama dengan faktor peningkatan produksi padi yaitu: 1) penggunaan benih jagung hibrida, 2) pemupukan yang berimbang, 3) pemanfaatan alsintan, dan 4) pendampingan dan pembinaan oleh PPL dalam budidaya jagung.

3. Cabe Merah

Produksi Cabe Merah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 s.d Tahun 2022

NO	KABUPATEN/KOTA	PRODUKSI (TON)		
		2020	2021	2022*)
1	Kab. Mentawai	14,00	1,00	3,83
2	Kab. Pesisir Selatan	5.506,00	5.513,20	5.041,90
3	Kab. Solok	32.775,00	25.997,44	34.254,96
4	Kab. Sijunjung	399,00	775,74	993,96
5	Kab. Tanah Datar	19.917,00	20.664,98	21.517,23
6	Kab. Padang Pariaman	1.668,00	1.681,80	1.115,00
7	Kab. Agam	33.464,00	33.479,08	34.932,10
8	Kab. Lima Puluh Kota	19.819,00	8.321,64	10.611,92
9	Kab. Pasaman	576,00	762,43	910,58
10	Kab. Solok Selatan	5.428,00	8.576,30	9.649,13
11	Kab. Dharmasraya	358,00	419,63	363,10
12	Kab. Pasaman Barat	9.559,00	5.689,30	5.223,30
13	Kota Padang	700,00	338,50	172,00
14	Kota Solok	76,00	185,26	55,00
15	Kota Sawahlunto	725,00	1.071,85	415,89
16	Kota Padang Panjang	930,00	712,73	673,33
17	Kota Bukittinggi	579,00	590,30	608,70
18	Kota Payakumbuh	645,00	883,96	1.522,48
19	Kota Pariaman	54,00	61,30	153,42
Jumlah		133.192,00	115.726,43	128.217,81

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa produksi cabe merah Kabupaten Pesisir Selatan cenderung berfluktuatif. Pada Tahun 2020 produksi cabe merah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 5.506 ton, Tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 5.513,20 ton dan Tahun 2022 terjadi penurunan produksi sebesar 8,55% atau menjadi 5.041,9 ton. Penurunan produksi ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

- Pada periode Maret s.d Agustus Tahun 2022 terjadi musim kemarau yang cukup panjang, sehingga banyak petani cabe merah yang gagal panen.

- b) Masih tingginya serangan hama dan penyakit utama tanaman cabe merah seperti virus kuning dan keriting yang disebabkan oleh serangga dan tungau.
- c) Banyak petani yang alih komoditi selain cabe merah.

4. Daging

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tujuan meningkatnya kesejahteraan masyarakat tani, yang dimana sasaran strategis meningkatnya produksi pertanian tahun 2022 menjadi salah satu pendukung tujuan tersebut. Untuk mencapai sasaran strategis diatas, peningkatan populasi ternak menjadi salah satu target kinerja yang harus dicapai. Tentunya selain sapi potong, itik dan ayam buras yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dalam upaya peningkatan populasi ternak, secara umum Kabupaten Pesisir Selatan masih memiliki jenis ternak lain yang juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi pertanian.

Berikut ini dijelaskan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tani melalui peningkatan populasi ternak, produksi daging, produksi telur dan faktor penghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat tani yaitu kematian ternak dan penyakit zoonosis sebagai berikut :

Tabel 3.43
Jumlah Populasi Ternak Tahun 2021 s.d 2022
Di Kabupaten Pesisir Selatan

NO	KECAMATAN	SAPI		KUDA		KERBAU		KAMBING	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Silaut	4.324	3.967	-	-	20	20	1.201	1.204
2	Lunang	2.300	2.101	-	-	145	97	1.501	1.509
3	BAB Tapan	1.310	1.403	-	-	1.719	1.728	2.867	2.888
4	Rahul Tapan	1.075	1.179	-	-	1.387	1.498	2.978	2.990
5	Pancung Soal	5.103	4.794	-	-	598	574	921	939
6	Airpura	4.613	4.159	-	-	779	680	805	900
7	Linggo Sari Baganti	6.083	8.979	-	-	624	633	595	941
8	Ranah Pesisir	11.347	10.736	2	2	225	271	556	656
9	Lengayang	14.423	14.945	-	1	478	475	4.360	4.253
10	Sutera	10.487	9.033	-	-	470	461	2.726	2.346
11	Batang Kapas	7.182	7.444	-	-	1.276	1.344	2.905	2.980
12	IV Jurai	5.330	5.514	2	2	58	47	2.755	2.882
13	Bayang	5.291	4.924	3	3	289	236	3.541	3.440
14	Bayang Utara	630	434	-	-	-	-	62	53
15	Koto XI Tarusan	7.095	7.018	-	-	740	752	1.010	1.018
Jumlah (ekor)		86.593	86.630	7	8	8.808	8.816	28.783	28.999

Sumber : Bidang Peternakan, 2022

Berdasarkan tabel 3.43 di atas dapat dilihat bahwa dari 4 (empat) jenis ternak tersebut diatas rata-rata terjadi peningkatan populasi pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021. Peningkatan populasi ini didorong oleh semakin meningkatnya pengelolaan ternak oleh peternak, baik itu pengelolaan ternak itu sendiri maupun lingkungan ternak berada seperti ketersediaan hijauan pakan ternak/pakan, obat-obatan, Inseminasi Buatan (IB) dan kandang yang sesuai persyaratan teknis.

Tabel 3.44
Jumlah Populasi Ternak Unggas Tahun 2021 s.d 2022
Di Kabupaten Pesisir Selatan

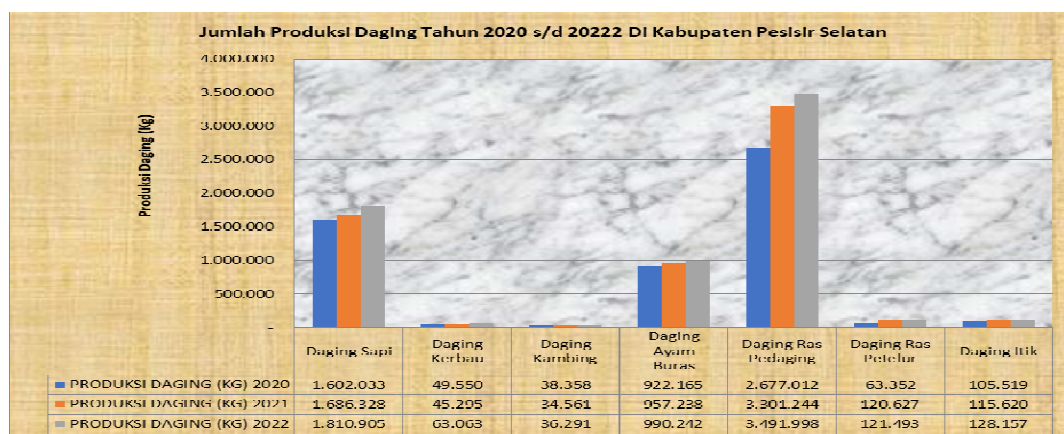
NO	KECAMATAN	AYAM BURAS		AYAM RAS PEDAGING		AYAM RAS PETELUR		ITIK	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Silaut	31.920	30.930	-	-	30.000	18.000	1.003	1.300
2	Lunang	36.241	36.818	-	-	-	386	911	812
3	BAB Tapan	39.470	40.220	82.000	84.000	4.200	4.500	9.430	10.660
4	Rahul Tapan	40.180	41.360	-	-	1.200	1.500	5.210	6.600
5	Pancung Soal	37.898	38.005	245.000	305.000	-	-	2.501	2.513
6	Airpura	26.552	26.420	564.000	564.000	7.800	8.000	1.911	1.496
7	Linggo Sari Baganti	6.956	13.498	15.000	18.000	3.000	-	241	7.199
8	Ranah Pesisir	58.000	57.690	250.000	250.000	6.500	8.000	10.130	11.190
9	Lengayang	140.832	141.536	-	-	4.700	8.300	46.932	46.900
10	Sutera	42.791	46.626	272.000	312.000	12.500	13.000	5.179	4.787
11	Batang Kapas	47.315	49.450	327.000	350.000	-	-	26.100	28.400
12	IV Jurai	101.600	108.650	595.000	640.000	38.000	42.000	18.610	22.400
13	Bayang	110.163	114.466	13.000	-	-	-	63.505	149
14	Bayang Utara	7.550	7.588	-	13.000	-	-	350	68.680
15	Koto XI Tarusan	49.511	50.511	631.000	631.000	1.500	6.500	4.620	4.868
Jumlah (ekor)		776.979	803.768	2.994.000	3.167.000	109.400	110.186	196.633	217.954

Dari tabel 3.44 diatas dapat dilihat bahwa dari 4 (empat) jenis ternak unggas tersebut diatas terjadi peningkatan populasi pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2022. Peningkatan populasi tertinggi yaitu itik sebesar 10,84% dan yang terendah adalah ayam petelur sebesar 0.72%. Peningkatan populasi ini didorong oleh semakin meningkatnya pengelolaan ternak unggas oleh peternak, baik itu pengelolaan ternak itu sendiri maupun lingkungan ternak berada seperti ketersediaan pakan ternak, obat-obatan, dan kandang yang sesuai persyaratan teknis.

Tabel 3.45
Jumlah Produksi Daging Tahun 2020 s.d 2022
Di Kabupaten Pesisir Selatan

NO	JENIS DAGING	PRODUKSI DAGING (KG)		
		2020	2021	2022
1	Daging Sapi	1.602.033	1.686.328	1.810.905
2	Daging Kerbau	49.550	45.295	63.063
3	Daging Kambing	38.358	34.561	36.291
4	Daging Ayam Buras	922.165	957.238	990.242
5	Daging Ras Pedaging	2.677.012	3.301.244	3.491.998
6	Daging Ras Petelur	63.352	120.627	121.493
7	Daging Itik	105.519	115.620	128.157
Jumlah		5.457.989	6.260.912	6.642.149

Pada tabel diatas dapat dilihat produksi daging setiap jenis semuanya mengalami kenaikan kecuali daging kerbau yang fluktuasi dan daging kambing mengalami penurunan setiap tahunnya. Lebih jelasnya dapat kita lihat dalam grafik dibawah ini :



Gambar 3.4. Jumlah Produksi Daging di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2022

Daging ayam ras pedaging menjadi jenis daging yang memiliki jumlah terbanyak dan peningkatan yang cukup baik setiap tahunnya. Pada tahun 2021 jumlah ayam pedaging sebanyak 3.301.244 Kg dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 3.491.998 Kg. Jumlah terbesar kedua adalah jenis daging sapi yang juga meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022 produksi daging sapi tahun 2022 mencapai jumlah 1.810.905 kg, jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 1.686.328 kg.

a. Sapi Potong

Populasi Sapi Potong Tahun 2020 s/d 2022 di Kabupaten Pesisir Selatan

NO	KECAMATAN	JUMLAH SAPI (EKOR)		
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022*)
1	Silaut	4.097	4.324	3.967
2	Lunang	2.235	2.300	2.101
3	BAB Tapan	1.240	1.310	1.403
4	Rahul Tapan	969	1.075	1.179
5	Pancung Soal	4.861	5.103	4.794
6	Airpura	4.404	4.613	4.159
7	Linggo Sari Baganti	7.333	6.083	8.979
8	Ranah Pesisir	10.794	11.347	10.736
9	Lengayang	14.288	14.423	14.945
10	Sutera	10.477	10.487	9.033
11	Batang Kapas	6.656	7.182	7.444
12	IV Jurai	4.960	5.330	5.514
13	Bayang	4.724	5.291	4.924
14	Bayang Utara	512	630	434
15	Koto XI Tarusan	6.137	7.095	7.018
Jumlah		83.687	86.593	86.630

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam 3 (tiga) tahun terakhir populasi ternak di Kabupaten Pesisir Selatan terus naik. Kenaikan tertinggi terjadi pada Tahun 2021 sebesar 3,41% (dari 83.687 ekor pada Tahun 2020 menjadi 86.593 pada Tahun 2021). pada Tahun 2022 kenaikan populasi hanya mencapai 0,04%, hal ini dikarenakan pada Tahun 2022 terjadi kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Surra dan Jembrana yang sangat mempengaruhi populasi ternak sapi. Dibawah ini dapat dilihat jumlah ternak mati berdasarkan sebab kematiannya.

NO	URAIAN	SEBAB KEMATIAN (EKOR)				TOTAL (EKOR)	PENYEBAB
		MATI SAKIT	POTONG PAKSA	BENCANA ALAM	DAN LAIN-LAIN		
1	Sapi Potong	3.905	1.491	58	22	5.476	Penyakit Mulut dan Kuku, Surra dan Jembrana
Jumlah		3.905	1.491	58	22	5.476	

Selain itu kelahiran, pematangan, pemasukan dan pengeluaran ternak juga sangat mempengaruhi populasi ternak sapi.

b. Itik

Populasi Itik Tahun 2020 s/d 2022 di Kabupaten Pesisir Selatan

NO	KECAMATAN	JUMLAH ITIK (EKOR)		
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022*)
1	Silaut	999	1.003	1.300
2	Lunang	619	911	812
3	BAB Tapan	7.280	9.430	10.660
4	Rahul Tapan	3.725	5.210	6.600
5	Pancung Soal	2.321	2.501	2.513
6	Airpura	1.866	1.911	1.496
7	Linggo Sari Baganti	2.934	241	7.199
8	Ranah Pesisir	11.170	10.130	11.190
9	Lengayang	47.772	46.932	46.900
10	Sutera	5.286	5.179	4.787
11	Batang Kapas	22.649	26.100	28.400
12	IV Jurai	15.230	18.610	22.400
13	Bayang	52.794	63.505	68.680
14	Bayang Utara	550	350	149
15	Koto XI Tarusan	4.250	4.620	4.868
Jumlah		179.445	196.633	217.954

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam 3 (tiga) tahun terakhir populasi itik di Kabupaten Pesisir Selatan selalu meningkat, peningkatan populasi ini didorong semakin baiknya pengelolaan budidaya itik yang dilakukan peternak. Disamping itu juga adanya bantuan itik dari kegiatan APBD Kabupaten dan APBD Provinsi. Pada Tahun 2022 ini bantuan itik dari APBD Kabupaten dan APBD Provinsi sebanyak 9.840 ekor.

c. Ayam Buras

Populasi Ayam Buras Tahun 2020 s/d 2022 di Kabupaten Pesisir Selatan

NO	KECAMATAN	JUMLAH (EKOR)		
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022*)
1	Silaut	31.849	31.920	30.930
2	Lunang	36.241	36.241	36.818
3	BAB Tapan	38.210	39.470	40.220
4	Rahul Tapan	39.115	40.180	41.360
5	Pancung Soal	37.697	37.898	38.005
6	Airpura	26.487	26.552	26.420
7	Linggo Sari Baganti	6.854	6.956	13.498
8	Ranah Pesisir	60.000	58.000	57.690
9	Lengayang	140.777	140.832	141.536
10	Sutera	43.060	42.791	46.626
11	Batang Kapas	31.726	47.315	49.450
12	IV Jurai	100.865	101.600	108.650
13	Bayang	8.700	110.163	114.466
14	Bayang Utara	101.616	7.550	7.588
15	Koto XI Tarusan	49.453	49.511	50.511
Jumlah		752.650	776.979	803.768

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 populasi ayam buras semakin meningkat, peningkatannya populasi dari Tahun 2020 ke Tahun 2021 sebesar 3,23% dan dari tahun 2021 ke Tahun 2022 sebesar 3,45%. salah satu faktor peningkatan populasi ini adalah adanya bantuan ayam buras dari APBD Provinsi Tahun 2022 sebanyak 31.000 ekor. Dan disamping itu pengelolaan budidaya ayam buras semakin baik yang dilakukan oleh peternak.

5. Produksi Telor

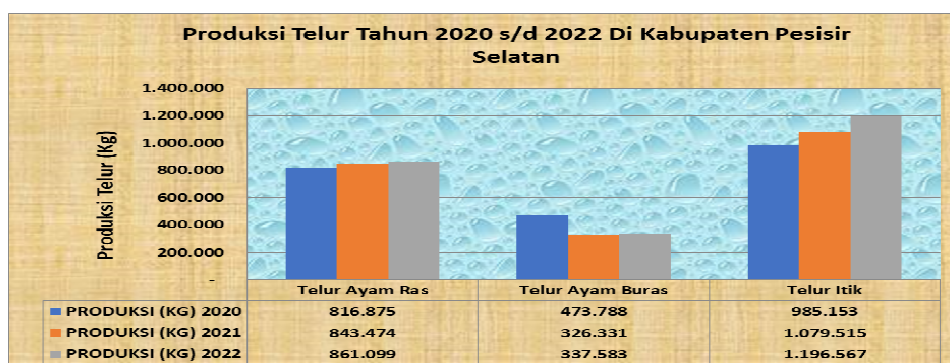
Pada tahun 2022 jumlah produksi tiga jenis telur kompak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Telur ayam meningkat yang pada tahun 2021 hanya 843.475 kg, meningkat pada tahun 2022 sebesar 861.099 kg. Sehingga jika tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021, produksi telur ayam ras mengalami peningkatan 2,09 %.

Sedangkan untuk ayam buras juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 hanya berjumlah 326.331 kg menjadi sebesar 337.583 kg pada tahun 2022. Peningkatan produksi ayam buras dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 3,45%. Lalu untuk telur itik menjadi jenis telur yang memiliki peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 paling besar, yaitu 10,84%. Dimana produksi pada tahun 2022 berjumlah 1.196.567 kg, angka ini lebih besar bila dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 1.079.515 kg. Untuk lebih jelasnya gambaran perkembangan produksi telur tahun 2020 s.d 2022 dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini :

Tabel 3.46
Jumlah Produksi Telur Tahun 2020 s.d 2022
Di Kabupaten Pesisir Selatan

NO	JENIS TELOR	PRODUKSI (KG)		
		2020	2021	2022
1	Telur Ayam Ras	816.875	843.474	861.099
2	Telur Ayam Buras	473.788	326.331	337.583
3	Telur Itik	985.153	1.079.515	1.196.567
Jumlah		2.275.816	2.249.320	2.395.249

Sumber : Bidang Peternakan, 2022



Gambar 3.5 : Produksi Telur Tahun 2020 s.d 2022
di Kabupaten Pesisir Selatan

6. Produksi Ikan

Pada tahun 2022 Produksi perikanan mengalami peningkatan dibanding tahun 2021, dimana produksi perikanan berjumlah 50.184 ton. Sedangkan pada tahun 2021 sebesar 49.641 ton. Peningkatan produksi perikanan ini dikarenakan meningkatnya jumlah tangkapan nelayan dan pembudidaya ikan dan bantuan alat penangkapan seperti Perahu Jukung, Mesin tempel dan long tail, Alat tangkap ikan serta alat bantu penangkapan ikan baik bersumber APBD, APBD Provinsi dan DAK. Data perkembangan produksi perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dalam tabel tersebut :

Tabel 3.47
Perkembangan Produksi Ikan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2022

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
		2020	2021	2022
1 Peningkatan produksi ikan	Ton	35.479	49.641	50.184,82

Produksi Perikanan ini didukung oleh Produksi Perikanan Budidaya dan Produksi Perikanan Tangkap yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.48
Capaian Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan
Tahun 2021 dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
			2021	2022
1.	Jumlah Produksi Perikaan Budidaya	Ton	14.092	14.277,82
2.	Jumlah Produksi Perikaan Tangkap	Ton	35.549	35.907,00

a. Produksi Perikanan Budidaya

Pada Tahun 2022 produksi perikanan budidaya berjumlah 14.277,82 ton sedangkan realisasi produksi perikanan budidaya pada tahun 2021 sebesar 14.092 ton. Hal ini menunjukkan peningkatan produksi perikanan budidaya tahun 2022 lebih tinggi dari pada tahun 2021. Produksi perikanan budidaya pada tahun 2022 melebihi dari target ini disebabkan banyaknya masyarakat yang sudah mulai berusaha budidaya ikan di air tawar dengan membuat kolam baik swadaya maupun berkelompok. Dismaping itu bantuan benih ikan dan pakan sudah dibantu oleh pemerintah. (BBI)

b. Produksi Perikanan Tangkap

Pada Tahun 2022 produksi perikanan tangkap sejumlah 35.907 ton, sedangkan realisasi produksi perikanan tangkap pada tahun 2021 sebesar 35.549 ton. Data ini menunjukkan bahwa produksi perikanan

tangkap pada tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan terjadi disebabkan telah selesainya. Keberhasilan ini didukung oleh kondisi new normal ditengan pandemic Covid 19 yang memungkinkan aktifitas pelaku usaha perikanan mulai berjalan normal.

2. Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)

Industri Pengolahan merupakan aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. PDRB sendiri merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, sedangkan PDRB sektor Industri Pengolahan adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha sektor pengolahan. Sedangkan Indikator Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan diformulasikan oleh Badan Pusat Statistik.

Lingkup Industri pengolahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah Industri Kecil Menengah /IKM (UMK sektor pengolahan menurut UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja) sedangkan Industri Besar (Usaha Menengah dan Besar menurut UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja) merupakan tanggung jawab Provinsi, lingkup tanggung jawab Pemerintah Kabupaten hanya pengawasan. Berikut Data Dukung Pencapaian Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan :

A. Data Industri Kecil dan Menengah (IKM) Sektor Pengolahan :

NO	JENIS INDUSTRI	DATA INDUSTRI KECIL DAN MENEGAH		
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1.	Jumlah IKM	2.503	3.879	4.971
2.	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	9.796	11.879	13.797
3.	Nilai Investasi (Rp.)	100.412.401.000	127.583.320.000	145.385.535.000
4.	Nilai Produksi (Rp.)	433.303.325.000	441.090.628.700	462.181.592.000
5.	Nilai Bahan Baku (Rp.)	216.526.551.000	236.799.132.400	253.239.031.000
6.	Omset (Rp.)	498.905.842.550	532.850.652.400	576.726.784.000

B. Data Legalitas dan Sertifikat Tahun 2021-2026

Rekapitulasi Jumlah IKM yang difasilitasi Sertifikasi, Standarisasi Produk IKM dan Izin Usaha Industri Tahun 2021-2022

No	Jenis Izin	Izin yang difasilitasi tahun	
		2021	2022
1	LEGALITAS USAHA		
	IUI-K (IKM)	6	2
2	LEGALITAS PRODUK		

	MD	1	1
	Halal	8	6
	Merek	4	15
	SNI (Sukarela)	0	0
	Barcode	0	0
	Total Legalitas Produk	19	24

Rekapitulasi Sertifikasi, Standarisasi Produk IKM dan Izin Usaha Industri yang Terbit Tahun 2021-2022

No	Jenis Izin	Jumlah Izin yang diterbitkan tahun -	
		2021	2022
1	LEGALITAS USAHA		
	IUI-K (IKM)	6	2
2	LEGALITAS PRODUK		
	MD	1	1
	Halal	8	5
	Merek	4	0
	SNI (Sukarela)	0	0
	Barcode	0	0
	Total Legalitas Produk	19	8
	Total Legalitas yang difasilitasi Dinas (Tanpa PIRT)	19	8

Data fasilitasi sentra IKM 2020-2022

NO.	SENTRA IKM	2020	2021	2022
1.	1 (satu) Unit Bangunan Sentra IKM Perikanan di Carocok Anau Kec. Koto XI Tarusan	-	Pembangunan Tahap 3 (Peralatan dan gedung penunjang lainnya)	Pembangunan Sentra IKM Minyak Atsiri

REKAPITULASI DIREKTORI PERUSAHAAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) BERDASARKAN CABANG INDUSTRI DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	KLASIFIKASI INDUSTRI	JUMLAH IKM	TENAGA KERJA	INVESTASI	NILAI PRODUKSI	NILAI BAHAN BAKU	OMSET
1	INDUSTRI MAKANAN	1,723	4,616	35,812,135,000	185,323,863,500	104,100,784,000	226,881,706,500
2	INDUSTRI MINUMAN	142	365	9,907,350,000	8,967,145,000	3,689,318,000	11,965,553,000
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	-	-	-	-	-	-



	TEBKAU						
4	INDUSTRI TEKSTIL	120	684	4,818,391,000	7,781,314,000	4,847,649,000	9,475,136,000
5	INDUSTRI PAKAIAN JADI	310	808	5,377,249,000	12,931,654,500	8,562,199,000	16,980,836,000
6	INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI	12	26	389,635,000	990,535,000	607,250,000	1,209,379,000
7	INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR) DAN BARANG ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN DAN SEJENISNYA	158	318	1,263,782,000	4,063,350,000	1,804,395,000	5,153,369,500
8	INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS	-	-	-	-	-	-
9	INDUSTRI PENCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN	17	61	2,235,022,000	1,514,630,000	1,106,800,000	2,411,636,000
10	INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI	-	-	-	-	-	-
11	INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA	1,357	3,743	36,641,024,000	77,526,227,000	32,929,664,000	94,966,986,000
12	INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL	4	15	35,000,000	101,160,000	46,900,000	121,480,000
13	INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK	3	7	114,500,000	204,000,000	146,933,000	234,600,000
14	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM	339	802	6,654,297,000	22,377,819,000	12,411,712,000	30,143,554,000
15	INDUSTRI LOGAM DASAR	-	-	-	-	-	-
16	INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA	156	394	7,383,734,000	19,975,759,000	16,180,938,000	24,280,019,000
17	INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK	-	-	-	-	-	-
18	INDUSTRI PERALATAN	-	-	-	-	-	-

	LISTRIK						
19	INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN YTDL	5	11	368,800,000	1,749,600,000	969,460,000	1,895,350,000
20	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER	17	81	1,767,950,000	4,653,800,000	1,953,687,000	5,809,020,000
21	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA	20	54	1,556,100,000	1,551,000,000	883,900,000	1,831,900,000
22	INDUSTRI FURNITUR	518	1,595	28,872,206,000	103,000,230,000	58,719,556,000	129,595,171,000
23	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	70	217	2,188,360,000	9,469,505,000	4,277,886,000	13,771,088,000
24	REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	4,971	13,797	145,385,535,000	462,181,592,000	253,239,031,000	576,726,784,000

Tabel 3.49
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Nilai PDRB Sektor
Industri Pengolahan (ADHK) 3 Tahun terakhir
(2020 s.d 2022)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
			2020	2021	2022
9,2	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Milyar Rp.	700,37	725,44	741,26

Pada tabel diatas dapat kita lihat kontribusi sektor industri selalu meningkat setiap tahunnya. Tahun 2020, PDRB pada sektor Industri Pengolahan sebesar Rp.700,37 Milyar, dan meningkat pada tahun 2021 sebesar Rp. 725,44 Miliar. Dan pada tahun 2022 kontribusi sektor industri pada PDRB Kabupaten Pesisir Selatan meningkat kembali hingga mencapai angka Rp. 741,26 Milyar. Grafik dan penjelasan level sumbar.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/provinsi

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Pesisir Selatan			Prov Sumatera Barat		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
9,2	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Milyar Rp.	700,37	725,44	741,26	16 031,82	16 628,38	16 917,97

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target indikator Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK) yaitu :

- a. Faktor Keberhasilan/ Peningkatan
 - Pemulihan ekonomi pasca covid-19 yang cukup cepat, terutamanya IKM yang bergerak dibidang sandang dan pangan. Perubahan cara konsumsi masyarakat semenjak pandemi, telah membuka alternatif perluasan pasar produk IKM. Dengan memanfaatkan media online, para pelaku IKM mampu memperluas pangsa pasar produk
 - Adanya dukungan dari Pusat dalam hal pembangunan sarana dan prasarana IKM
- b. Hambatan
 - Kurangnya kompetensi ASN yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan
 - Ketidaksiesuaian penganggaran dengan perencanaan
- c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - Kemitraan dan pemanfaatan CSR dalam pelaksanaan pembinaan IKM, diantaranya :
 - a. Kelas Inkubasi Bisnis dengan Universitas Negeri Padang (UNP) di IKM Lokana
 - b. Temu pelaku Bisnis IKM di Gedung PCC yang disponsori oleh Bank Nagari Painan
 - c. Webinar konsultasi bisnis IKM dengan Ruang 412
 - Pelaksanaan Inovasi OPD, yaitu :
 1. Forum Industri Kecil dan Menengah (FIKMA) Pesisir Selatan
 2. Galeri dan Pusat Informasi IKM Pesisir Selatan
 3. Pengembangan Website “Laku Bana”
 4. Dilaksanakannya retribusi perdagangan secara non tunai (on progress)
 5. “Tanggap Pasar”, yaitu layanan grup Whatsapp yang memberikan kesempatan kepada mantri pasar untuk membagikan permasalahan di pasar serta memperoleh solusi dari pihak yang tepat.
 6. Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi melalui BUMNag dalam hal penggunaan asset di kawasan transmigrasi

Program/kegiatan pendukung pencapaian indikator ini yaitu; program (1) Perencanaan dan Pembangunan Industri Dengan target anggaran Rp 17.119.295.961 Dan realisasi sebesar Rp 16.738.730.758 Atau capaian 97,77 % (2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan target anggaran Rp 25.000.000 Dan realisasi sebesar Rp 24.643.500 Atau capaian 98,57 % (3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan target anggaran Rp 63.299.880 Dan realisasi sebesar Rp 63.237.900 Atau capaian 99,90 %.

Total anggaran yang dibutuhkan dalam pencapaian indicator ini adalah sebesar Rp. 17.207.595.841, dengan realisasi sebesar Rp 16.826.612.158 Atau capaian 97,79%.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 terdapat efisiensi sebesar 2,21%.

Sasaran 10 : Menurunnya Pengangguran

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 10 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.50 berikut ini:

Tabel 3.50
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 10

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,85	4,61	132,70
Rata-rata Capaian					132,70

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 10 sebesar 132,70%. Pencapaian sasaran strategis 10 termasuk predikat **Sangat Baik**.

Formulasi capaian indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka

$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Pengangguran terbuka terdiri dari mereka yang sedang aktif mencari pekerjaan, mereka yang sedang mempersiapkan usaha namun usahanya belum mulai berjalan, mereka yang sengaja tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkannya, dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka terdiri dari :

a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.

➤ **Mencari pekerjaan** adalah kegiatan seseorang yang pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti mereka:

a. Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

b. Yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.

c. Yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.

Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan, jadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan asalkan seminggu yang lalu masih mengharapkan pekerjaan yang dicari.

Mereka yang sedang bekerja dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lain tidak dapat disebut sebagai penganggur terbuka.

- b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- **Mempersiapkan suatu usaha** adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/ pekerjaan yang "**baru**", yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/ keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila "**tindakannya nyata**" , seperti: mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan.
 - Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat, dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha.
 - Mempersiapkan suatu usaha yang nantinya cenderung pada pekerjaan sebagai berusaha sendiri (*own account worker*) atau sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar atau sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sedangkan Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka pada suatu daerah termasuk Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Nilai investasi
3. Angka upah minimum daerah
4. Jumlah penyaluran kredit usaha rakyat
5. Jumlah pelatihan peningkatan keterampilan/softkill

Berikut data perkembangan realisasi dan capaian tingkat pengangguran terbuka dalam 3 (tiga) tahun terakhir di Kabupaten Pesisir selatan:

Tabel 3.51
Realisasi Capaian Kinerja Indikator Tingkat Pengangguran
Terbuka di Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020 s.d 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
			2020	2021	2022
10,1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,00	5,97	4,61

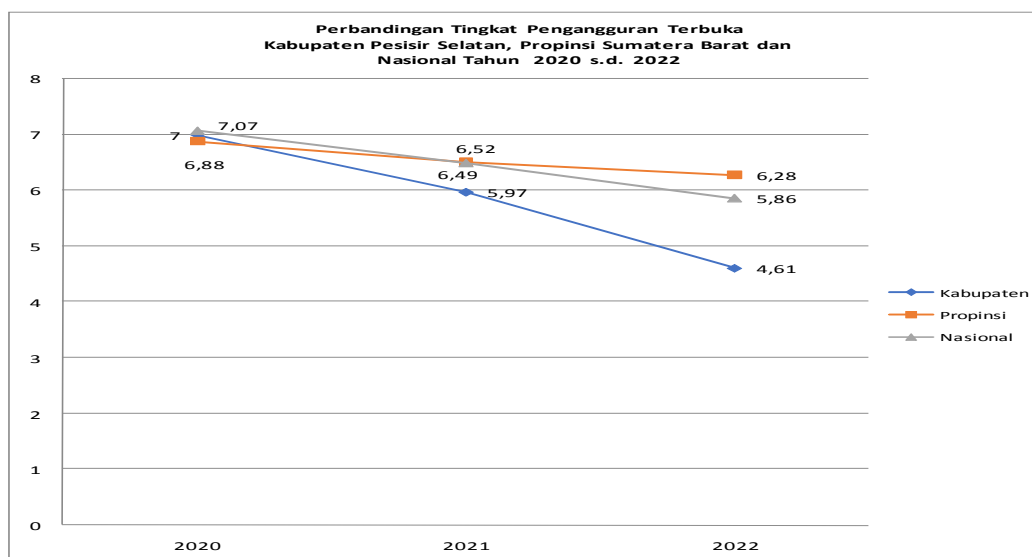
Pada tabel diatas, dapat dilihat kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2022 dari tahun ke tahun terjadi penurunan angka Tingkat Pengangguran Terbuka. Hal ini memperlihatkan bahwa ketersediaan lapangan kerja di Kabupaten Pesisir Selatan juga terus meningkat, namun demikian upaya penciptaan lapangan kerja dan usaha harus terus ditingkatkan agar tingkat pengangguran dapat semakin ditekan guna mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.52
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat
dan Nasional Tahun 2020 s.d. 2022

No	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Kabupaten	7,00	5,97	4,61
2	Propinsi	6,88	6,52	6,28
3	Nasional	7,07	6,49	5,86

Sumber Data : Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2023

Bila dibandingkan dengan realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi dan Nasional terkonfirmasi capaian bahwa Kabupaten Pesisir Selatan di bawah rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka skala provinsi yang mencapai 6,28% dan nasional yang sebesar 5,86%. Dan selama tiga tahun terakhir Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pesisir Selatan konsisten dibawah tingkat nasional.



Gambar 3.6 : Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera
Barat dan Nasional Tahun 2020 s.d. 2022

Seiring berjalannya waktu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sangat bekerja keras dalam menurunkan angka pengangguran. Melalui berbagai macam program kerjanya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berhasil menurunkan angka pengangguran dengan jumlah yang cukup signifikan.

Ada beberapa faktor penyebab keberhasilan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka :

1. Semakin banyak program pelatihan kerja. Pemerintah memang sangat gencar dalam mengadakan program pelatihan kerja, baik program pelatihan tata rias, tata boga, garmen dan sebagainya. Saat masyarakat memiliki bakat atau kemampuan, maka mereka bisa semakin mandiri dan bisa mendapatkan penghasilan dari bakat yang dimiliki tersebut.
2. Menanamkan jiwa wirausaha, karena jumlah tenaga kerja yang semakin meningkat dan tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia, maka pemerintah berusaha untuk membuat masyarakat lebih mandiri dengan menjalani wirausaha. Saat menjalankan sebuah bisnis, maka masyarakat tidak hanya tergantung dengan lapangan pekerjaan yang disediakan pemerintah. Mereka justru akan lebih mandiri dalam menghasilkan pendapatan dengan bisnis yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bahkan, nantinya para pengusaha ini bisa membuka kesempatan kerja bagi masyarakat yang lain.
3. Faktor demografis, seiring meningkatnya populasi penduduk usia kerja.
4. Meningkatkan keterampilan dan kualitas tenaga kerja menuju profesionalisme.
5. Penempatan Tenaga Kerja yang memiliki kompetensi dengan kualitas yang memadai di Luar Negeri.
6. Adanya *jobfair* (bursa kerja)

Dalam mencapai indikator kinerja ini, terdapat beberapa kendala dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, antara lain :

1. Internal :
 - a. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, seperti : belum tersedianya penginapan bagi peserta pelatihan, sehingga pencari kerja yang dilatih hanya yang berada disekitar Kecamatan IV Jurai.
 - b. Terbatasnya Instruktur yang bersertifikat kompetensi.
 - c. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM Pembina.
2. Eksternal :
 - a. Pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja.
 - b. Kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja.
 - c. Jumlah lapangan kerja dan tenaga kerja yang kurang seimbang.
 - d. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
 - e. Jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak merata
 - f. Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang disebabkan akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang

- menghambat investasi, hambatan dalam proses ekspor-impor.
- g. Kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja.

Pada tahun 2022, Balai Latihan Kerja (BLK) sudah berubah menjadi UPTD-BLK. dibawah Bidang Ketenagakerjaan, UPTD juga dipimpin oleh seorang Kepala UPTD serta 1 (satu) orang Tata Usaha.

Eksistensi BLK pada saat ini cukup penting mengingat ini tingkat pengangguran yang semakin tinggi dan lapangan kerja yang terbatas, maka dengan adanya lembaga-lembaga pelatihan keterampilan ini selain itu diharapkan juga akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri yang berguna bagi pencari kerja.

Kebutuhan yang begitu besar pelatihan tenaga kerja mendorong OPD untuk semaksimal mungkin mengusahakan keinginan masyarakat akan kebutuhan ini. Pelatihan untuk tenaga kerja dilaksanakan guna menyiapkan tenaga kerja terlatih bagi pencari kerja agar memiliki daya saing dalam memasuki dunia kerja. Kebutuhan yang begitu besar bagi tenaga kerja terlatih mendorong OPD untuk semaksimal mungkin mengusahakan keinginan masyarakat akan kebutuhan ini. Dalam hal ini Pemerintah Daerah juga mendukung program dengan mengalokasikan anggaran. Untuk pelatihan berbasis masyarakat diutamakan bagi kelompok keluarga miskin, penganggur, diajukan oleh pemerintah desa setempat, pendidikan minimal, sedangkan pelatihan berbasis kompetensi diutamakan bagi yang telah mempunyai keterampilan khusus dan tinggal memoles serta meningkatkan keterampilan supaya bisa bersaing didunia kerja.

Indikator ini didukung oleh 3 (tiga) program, yaitu : program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, dan program hubungan industrial. Dengan target anggaran Rp. 110.042.180, dan realisasi sebesar Rp. 109.338.120,- atau capaian 99,36%. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.704.060,- atau 0,64%.

Sasaran 11 : Meningkatnya kualitas infrastruktur

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 11 terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.53 berikut ini:

Tabel 3.53
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 11

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase jalan kabupaten kondisi baik	Persen	31.90	32.34	101.38
2	Rasio konektivitas	Persen	57	58	101.75
3	Proporsi lahan sawah beririgasi baik	Persen	59.20	59.49	100.49
Rata-rata Capaian					101,21

sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis 11 sebesar 101,21%. Pencapaian sasaran strategis 11 termasuk predikat **Sangat Baik**.

1. Persentase jalan kabupaten kondisi baik

Persentase jalan kondisi baik di peroleh dari data inspeksi kondisi jalan tahun 2022 dan pemutakhiran *data base* jalan dengan panjang jalan kabupaten adalah 2.333,32 km. Target indikator Persentase jalan kondisi baik pada tahun 2022 adalah 31,90%, dengan realisasi 32,34% atau dengan capaian sebesar 101,38%. Pemutakhiran data base jalan merupakan akumulasi dari hasil kegiatan fisik jalan, yaitu pekerjaan perbaikan/pemeliharaan/ peningkatan/kualitas jalan. Data kondisi ini menyajikan total panjang jalan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, sedang, rusak dan rusak berat.

Berdasarkan kondisi jalan tersebut di atas, dapat dihitung persentase jalan dalam kondisi baik. Berikut tabel 3.54 rincian jalan berdasarkan jenis dan kondisi jalan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2022.

Tabel 3.54
Panjang Jalan Kabupaten berdasarkan Jenis dan Kondisi Jalan
Tahun 2020-2022

No.	Jenis dan Kondisi Jalan	Realisasi					
		2020		2021		2022	
		(Km)	(%)	(Km)	(%)	(Km)	(%)
1.	Baik	689,47	29,55	718,11	30,78	754,59	32,34
2.	Sedang	252,28	10,18	255,56	10,95	245,38	10,52
3.	Rusak	382,85	16,41	382,64	16,40	371,56	15,92
4.	RusakBerat	1.008,58	43,23	976,87	41,87	961,78	41,22
Jumlah		2.333,18	100,00	2.333,18	100,00	2.333,32	100,00

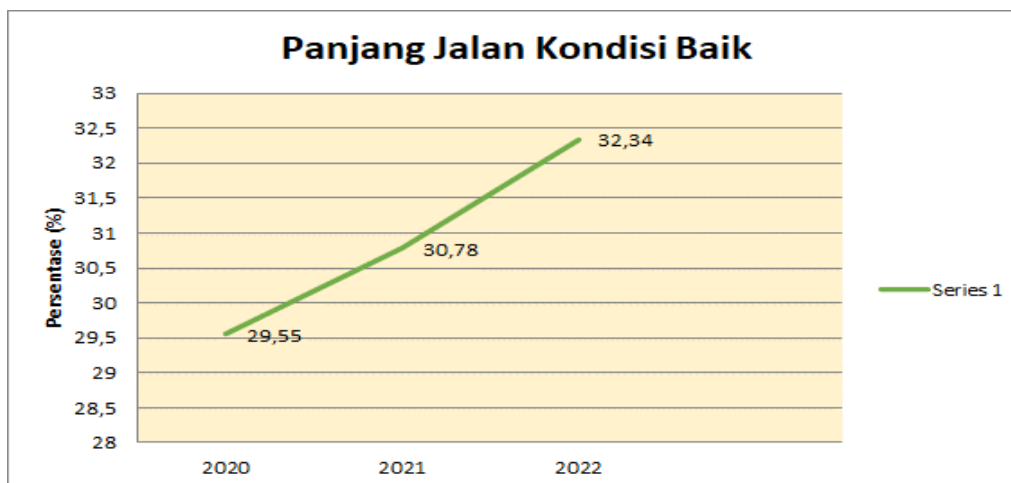
Sumber :LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan kondisi jalan baik dari 718,11km (30,78%) tahun 2021 menjadi 754,59 km (32,34%) pada tahun 2022 atau meningkat sebesar (1,56%). Bertambahnya kondisi jalan baik di Kabupaten Pesisir Selatan disebabkan karena makin berkurangnya kondisi jalan rusak berat. Bila dibandingkan pada tahun 2021 kondisi jalan rusak berat mengalami penurunan dari 976,87 km menjadi 961,78 km pada tahun 2022.

Tabel 3. 55
Target dan Realisasi Jalan Kondisi Baik Tahun 2020-2022

No.	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Target Capaian Setiap Tahun (%)	29,90	30,90	31,90
2.	Realisasi (%)	29,55	30,77	32,34

Sumber :LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022



Sumber :LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

Gambar 3.7 : Target dan realisasi per tahun jalan kondisi baik Tahun 2020-2022

Dari tabel dan ga,bar di atas dapat di jelaskan bahwa capaian indikator Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik untuk tahun 2022 termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan data kondisi jalan tersebut dapat di hitung persentase panjang jalan status kabupaten dalam kondisi baik dan kondisi baik tahun 2022. Berikut data realisasi dan capaian indikator kinerja persentase jalan kondisi baik tahun 2022.

**Tabel 3.56
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Persentase Jalan Kondisi Baik Tahun2022**

No.	Uraian	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	31,90	32,34	101,38

Sumber :LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

Formulasi capaian indikator kinerja Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik

$$\frac{\text{(Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik)}}{\text{(Panjang Jalan Kabupaten)}} \times 100\%$$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

$$\text{Capaian Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik Tahun 2022 : } \frac{32,34}{31,90} \times 100\% = 101,38\%$$

Berdasarkan pencapaian kondisi jalan baik di atas, klasifikasi penilaian indicator kinerja persentase jalan kondisi baik adalah predikat **Sangat Baik**. Pelaksanaan kegiatan untuk mendukung indikator persentase jalan dalam kondisi baik dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3.8 : Peningkatan Jalan Ruas Cimpu Sei-Sirah, Kec. Sutera Tahun 2022



Gambar 3.9 : Peningkatan Jalan Labuhan Tanjak – Sei Sirah Hilir Kec. Pancung Soal Tahun 2022

**Tabel 3.57
 Jenis, Kondisi dan Status Jalan di Kabupaten Pesisir Selatan
 Tahun 2020 s.d. 2022**

No.	JenisKondisi	Status Jalan JalanKabupaten		
		2020 Km	2021 Km	2022 Km
A	Jenis Permukaan			
	1. Aspal	680,11	687,53	721,10
	2. Kerikil	722,01	700,38	669,84
	3. Beton	706,50	215,91	235,47
	4. Tanah	224,56	707,21	706,77
	Jumlah	2.333,18	2.333,18	2.333,18

B	Kondisi Jalan			
	1. Baik	689.47	718.11	754.59
	2. Sedang	252.28	255.56	245.38
	3. Rusak	382.85	382.64	371.56
	4. Rusak Berat	1008.58	976.87	961.78
	Jumlah	2.333,18	2333.18	2333.32
C	Panjang Jalan			
	1. Kelas I	-	-	-
	2. Kelas jalan II	-	-	-
	3. Kelas Jalan III	232.90	232.90	232.90
	4. Kelas Jalan IIIA	376.50	376.50	376.50
	5. Kelas Jalan IIIB	413.26	413.26	413.26
	6. Kelas Jalan IIIC	-	-	-
	7. Kelas Tidak Rinci	1.310,52	1.310,52	1.310,52
	Jumlah	2.333,18	2.333,18	2.333,18

Sumber :Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKab. Pesisir Selatan, 2022

Capaian Indikator ini ditunjang oleh Progam *Penyelenggaraan Jalan* dengan target anggaran sebesar Rp. 129.185.258.177,- dan terealisasi sebesar Rp. 127.710.293.866,- atau 98,86 %. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program *Penyelenggaraan Jalan* terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.474.964.311 atau 1,14 %.

Adapun kendala dan upaya dalam pencapaian indikator Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik adalah sebagai berikut :

Kendala :

1. Database jalan belum terupdate secara maksimal
2. Kegiatan Inspeksi kondisi jalan belum optimal dilaksanakan untuk semua jalan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

Strategi/ Upaya pemecahan masalah adalah:

1. Penyiapan dokumen pemetaan jaringan jalan yang terupdate sesuai kebutuhan setiap tahunnya.
2. Inspeksi kondisi jalan harus dilaksanakan secara rutin
3. Pelaksanaan kualitas sumber daya aparatur dan penyedia jasa sebagai unsur pelaksanaan pembangunan melalui diklat teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan fisik jalan.

2. Rasio Konektivitas

Konektivitas adalah terhubungnya suatu wilayah dalam suatu daerah. Rasio Konektivitas merupakan pengukuran akan wilayah yang terlayani angkutan, baik angkutan jalan maupun angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Meningkatkan konektivitas suatu wilayah dapat dilakukan dengan cara membangun jalan, pelabuhan, dan pembangunan angkutan massal. Manfaat dari adanya konektivitas adalah untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, dimana daerah yang dulunya sulit untuk dijangkau tapi dengan adanya konektivitas daerah tersebut bisa keluar dari keterisoliran, sehingga semua aspek akan mudah dijangkau seperti, aspek pendidikan, aspek ekonomi dan juga aspek kesehatan.

Penghitungan Rasio konektivitas Kabupaten berdasarkan kepada:

1. Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP
2. Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu
3. Jumlah Lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintas perintis ditambah lintasan komersil
4. Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu IK1 (Angkutan Jalan) IK2 (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan
5. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70 wilayah yang tidak memiliki angkutan laut dan penyeberangan (bobot angkutan SDP=0, bobot angkutan jalan = 100)

Sedangkan untuk bobot trayek dan lintas adalah sebagai berikut:

- a. Bobot Trayek Lintas dengan frekwensi tinggi (>5X dalam seminggu), bobot = 1
- b. Bobot Trayek Lintas dengan frekwensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0,8
- c. Bobot Trayek Lintas dengan frekwensi rendah (<3 dalam seminggu), bobot = 0,5

Untuk lebih jelasnya realisasi dan capaian kinerja Rasio Konektivitas Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.58. dibawah ini:

Tabel 3.58
Realisasi dan Capaian Indikator Rasio Konektivitas
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Rasio Konektivitas	Persen	57	58	101,75

Sumber data : Dinas Perhubungan, 2022

Formulasi capaian indikator kinerja Rasio Konektivitas

$$\text{Rasio konektivitas} = (\text{IK1} \times \text{bobot angkutan jalan}) + (\text{IK2} \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$$

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

$$\text{Capaian Rasio Konektivitas Tahun 2022 : } \frac{58}{57} \times 100\% = 101,75\%$$

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Rasio konektivitas Tahun 2022 yaitu 57% dan terealisasi sebesar 58% atau dengan capaian kinerja sebesar 101,75%. Hasil Capaian kinerja rasio konektivitas ini termasuk kategori *sangat baik*.

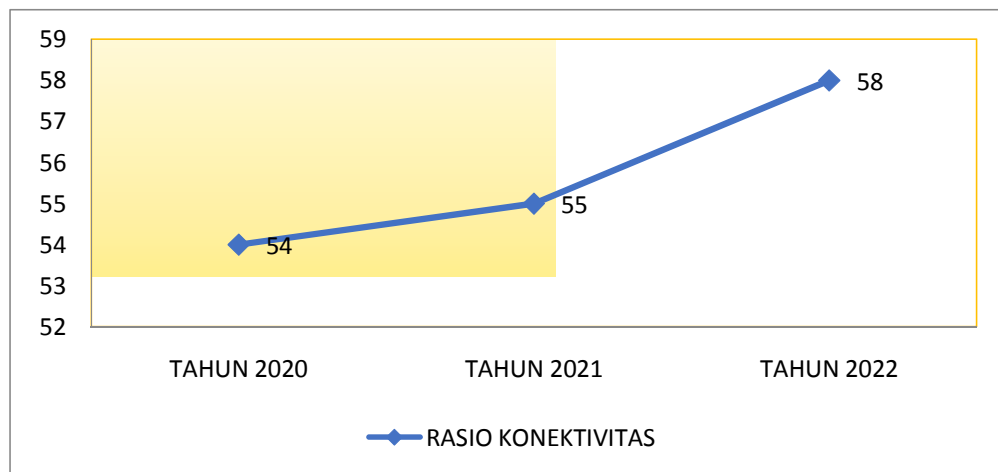
Berikut realisasi indikator kinerja rasio konektivitas tahun 2020-2022:

Tabel 3.59
Realisasi Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian %		
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Rasio Konektivitas	Persen	54	55	58	100	100	101,75

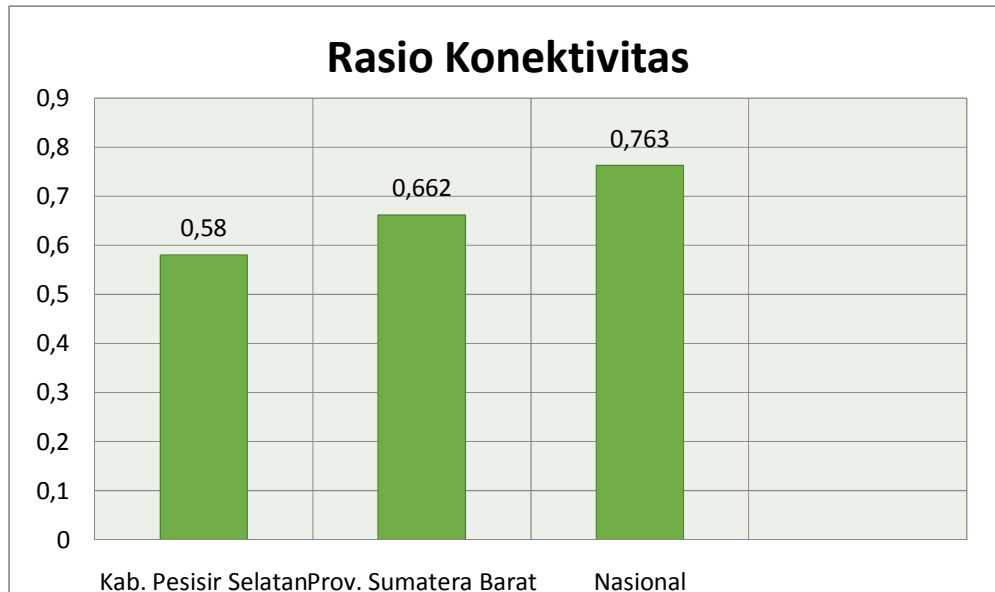
Sumber :Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, pertumbuhan Indikator kinerja Rasio Konektivitas Kabupaten Pesisir Selatan sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2020 rasio konektivitas berada pada angka 54 % dan pada Tahun 2022 meningkat menjadi 58 %. Berikut gambaran peningkatan rasio konektivitas selama 3 (tiga) tahun:



Gambar 3.10. Peningkatan Rasio Konektivitas tahun 2020-2022

Berikut data perbandingan realisasi Rasio Konektivitas Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional pada tahun 2022:



Gambar 3.11. Perbandingan Rasio Konektivitas Kab. Pesisir Selatan dengan Provinsi dan Nasional

Dari gambar di atas dapat di jelaskan bahwa Rasio Konektivitas Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 58%. Sedangkan Rasio Konektivitas Provinsi adalah sebesar 66,2% dan Nasional sebesar 76,3%. Berdasarkan data tersebut maka Kabupaten Pesisir Selatan masih berada di bawah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator kinerja Rasio Konektivitas di kabupaten Pesisir Selatan adalah :

- Meningkatnya Kesadaran masyarakat terhadap penggunaan transportasi umum
- Meningkatnya fasilitas moda transportasi
- Pelaksanaan pendataan pelayanan trayek angkutan
- Sumber daya manusia yang kompeten.

Indikator ini didukung oleh beberapa program yaitu program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan program Pengelolaan Pelayaran dengan total anggaran sebesar 9.884.467.917,- dan realisasi sebesar 9.557.848.216,-. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan program Pengelolaan Pelayaran terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 326.619701,- atau 3,3 %.

3. Proporsi Lahan sawah beririgasi baik

Luas irigasi di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai **20.907 Ha** dengan jumlah Daerah Irigasi (DI) sebanyak **249** buah yang merupakan kewenangan Kabupaten, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria – Kriteria dan Penetapan Status Daerah

Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu luas irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar **18.800 Ha** dan luas irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang lokasinya berada di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai **22.540 Ha** sehingga total luas irigasi di Kabupaten Pesisir Selatan menjadi **62.647 Ha**.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 maka dilaksanakan pemetaan terhadap areal sawah yang ada serta untuk merevisi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria – Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kabupaten Pesisir Selatan telah mengusulkan DI baru sebanyak **67 DI** sehingga total DI Kabupaten Pesisir Selatan menjadi **313 DI**.

Adapun luas usulan DI Kabupaten Pesisir Selatan adalah Luas baku **14.514,67 Ha**, luas potensial **10.662,42 Ha** dan luas fungsional adalah **10.269,79 Ha**. Sedang total luas fungsional Kabupaten Pesisir Selatan baik kewenangan kabupaten, kewenangan propinsi dan kewenangan pusat seluas **23.837 Ha** (kesepakatan Dinas PSDA, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Badan Pertanahan Nasional Painan dan Badan Pusat Statistik Painan). Data usulan ini telah di ajukan dan diverifikasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, Bidang irigasi mempunyai beberapa indikator yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut :

1. Indeks pertanaman padi (Kali/Tahun)
2. Persentase Irigasi Kondisi Baik
3. Jumlah P3A aktif (Kelompok)
4. Penanganan Bendung (Unit) :
 - Rehabilitasi Ringan/sedang
 - Rehabilitasi berat/ Total
 - Pembangunan Baru
5. Penanganan Bendung (Unit)
 - Rehabilitasi ringan/sedang
 - Peningkatan Kualitas saluran irigasi (saluran tanah menjadi pasangan)
6. Jumlah klasifikasi irigasi yang ditingkatkan (DI)
7. Daerah Irigasi yang dilakukan OP (DI)
8. Jumlah P3A yneg berbadan hukum
9. Jumlah P3A yang dilakukan pembinaan.

Realisasi dari kinerja bidang irigasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Indeks Pertanaman Padi

Indeks pertanaman padi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 adalah sebesar **1,95** dan meningkat menjadi **1,97** pada tahun 2021, sedang pada tahun 2021 bertambah menjadi **1,99**. atau mengalami peningkatan sebesar **0,04** dari tahun 2021 ke tahun 2022. Peningkatan ini akan berpengaruh terhadap produksi pertanian yang merupakan mayoritas penghasilan penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Indeks Kinerja Sistem Irigasi

Indeks Kinerja Sistem irigasi merupakan indeks yang menilai beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan hasil pertanian, adapun faktor tersebut adalah prasarana fisik, produktivitas (padi), sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi dan perkumpulan P3A/GP3A/IP3A. Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 adalah sebesar **59,03** meningkat menjadi **59,32** pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 bertambah menjadi **59,52** atau mengalami peningkatan sebesar **0,49** dari tahun 2020 ke tahun 2022.

C. Persentase Irigasi Kondisi Baik

Irigasi kondisi baik adalah kondisi sawah yang dapat terairi secara lancar dan teratur. Irigasi kondisi baik ini merupakan salah satu dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 - 2026. Adapun persentase irigasi kondisi baik Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 - 2022 adalah pada tahun 2020 Persentase Irigasi kondisi baik Kabupaten Pesisir Selatan adalah **57,05** meningkat menjadi **59,13** pada tahun 2021-, pada tahun 2022 naik menjadi **59,49** atau mengalami peningkatan sebesar **2,44** dari tahun 2020 ke tahun 2022. Berikut indikator bidang irigasi di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 s.d. 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini;z

Tabel 3.60
Indikator Bidang irigasi Tahun 2020-2022

No.	Indikator	Tahun		
		2020	2021	2022
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Bendung yang direhabilitasi (unit)	6	6	11
2.	Panjang Saluran irigasi yang direhabilitasi (m)	8.565	8.519,97	6.153,49
3.	Jumlah klasifikasi Irigasi yg ditingkatkan (DI)	2	1	5
4.	Daerah irigasi yang dilaksanakan OP (DI)	21	7	3
5.	Jumlah P3A yang berbadan hukum (Klp)	28	19	20
6.	Jumlah P3A yang dilakukan pembinaan (Klp)	-	28	68

Sumber :LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

Jumlah penanganan bendung baik rehabilitasi ringan/sedang, rehabilitasi berat maupun pembangunan baru dalam rentang waktu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebanyak 23 unit dengan rincian tahun 2020 sebanyak 6 unit, tahun 2021 sebanyak 6 unit serta tahun 2022 sebanyak 11 unit.

Tabel 3.61
Capaian Kinerja Indikator Proposi Lahan Sawah Beririgasi Baik Tahun 2021 s.d 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian %		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
Proposi Lahan Sawah Beririgasi Baik	%	59.03	59.13	59.49	100.05	99.88	100.49

Sumber :LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022



Sumber :LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

Gambar 3.12. Proporsi Sawah Beririgasi di Kabupaten Pesisir Selatan

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator Proposi Lahan Sawah Beririgasi Baik dalam pelaksanaan RPJMD masih dalam kategori baik . Berikut data realisasi dan capaian indikator kinerja Proporsi Lahan sawah beririgasi Baik Tahun 2022 :

Tabel 3.62
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Proporsi Lahan sawah beririgasi Baik Tahun 2022

No.	Uraian	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Proporsi lahan sawah beririgasi baik	%	59.20	59.49	100.49

Sumber :LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

Formulasi capaian indikator kinerja Proporsi lahan sawah beririgasi baik

$$\frac{(\text{Luas lahan fungsional sawah beririgasi baik})}{(\text{Luas lahan fungsional sawah keseluruhan})} \times 100\%$$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Capaian Proporsi lahan sawah beririgasi Baik Tahun 2022 :	$\frac{59,49}{59,20}$	X	100%	=	100,49%
---	-----------------------	---	------	---	---------

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022, target proporsi lahan sawah beririgasi baik di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebesar 59,20%, dengan realisasi sebesar 59,49% atau capaian sebesar 100,49%. Berdasarkan pencapaian indikator Proporsi lahan sawah beririgasi Baik di atas, maka klasifikasi penilaian indikator kinerja tersebut termasuk kategori **Sangat Baik**.

Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebutuhan irigasi kondisi baik adalah :

1. Adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan oleh Direksi Pekerjaan sehingga setiap kendala dan permasalahan pekerjaan segera ditindaklanjuti dan dicari solusinya.
2. Koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait antara Direksi Pekerjaan dengan Pengamat dan Juru Pengairan serta kelompok masyarakat petani.

Indikator ini didukung oleh program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Dengan target anggaran **Rp. 21.575.951.646,-** dan realisasi sebesar **Rp. 17.839.968.635** atau capaian **82,68%**. berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) terdapat efisiensi anggaran sebesar **3.735983.011,-** atau **17,32 %**.



Gambar 3.13. Bendung DI. Sei. Kuyung Pancung Soal (2022)



Gambar 3.14. DI. Sawah Liek (2022)

Saluran irigasi sangat penting kegunaannya karena akan membawa aliran air dari bendung menuju areal sawah, oleh karena itu bidang irigasi telah melakukan rehabilitasi saluran irigasi baik rehabilitasi ringan, sedang maupun berat. Adapun panjang saluran irigasi yang telah direhab pada tahun 2019 sepanjang 6.149 m, pada tahun 2020 panjang saluran irigasi yang telah direhab adalah 8.565 m serta tahun 2021 sepanjang 8.519,97 m sehingga total panjang saluran irigasi yang direhabilitasi rentang tahun 2019 sampai dengan 2021 sepanjang 23.233,97 m.



Gambar 3.15. Perbaikan Sayap Bendung Daerah Irigasi (DI) Damar Rumpit



Gambar 3.16 Rehabilitasi Saluran DI Damar Rumpit

Dalam pengelolaan jaringan irigasi tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah tetapi peran serta masyarakat terutama masyarakat petani harus ikut berperan aktif atau partisipasi masyarakat. Kelompok masyarakat bergabung menjadi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), antara P3A bergabung menjadi Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) dan beberapa GP3A bersatu menjadi Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A). Selama tiga tahun jumlah P3A yang sudah berbadan hukum adalah sebanyak 67 kelompok dengan rincian tahun 2020 sebanyak 28 kelompok dan tahun 2021 sebanyak 19 kelompok serta pada tahun 2022 sebanyak 20 Kelompok P3A.

Selain pembangunan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Pesisir Selatan, irigasi kewenangan provinsi dan pusat pada rentang tahun 2019 sampai tahun 2021 juga banyak pembangunan yang dikerjakan. Adapun pekerjaan yang cukup besar adalah Pembangunan Lanjutan Saluran Irigasi DI Kawasan Sawah Laweh di kecamatan Koto XI Tarusan dan DI Malepang Ampang Tulak di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang merupakan kewenangan pusat, dimana pembangunan bendung telah selesai dilaksanakan sedang pekerjaan saluran masih dikerjakan sampai sekarang.

Sasaran 12 : Terjaminnya kelestarian lingkungan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 12 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.63 berikut ini:

Tabel 3.63
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 12

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indek kualitas lingkungan hidup	tanpa satuan	86.85	77.94	89,74
Rata-rata Capaian					89,74

sumber :LKJ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup,2022

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 12 sebesar 89,74%. Pencapaian sasaran strategis 12 termasuk predikat **Sangat Baik**.

Formulasi capaian indikator kinerja Indek Kualitas Lingkungan Hidup

$$\frac{\text{Indeks Pencemaran Air} + \text{Indeks Pencemaran Udara} + \text{Indeks Tutupan Lahan}}{\text{Indeks Pencemaran Air} + \text{Indeks Pencemaran Udara} + \text{Indeks Tutupan Lahan}}$$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

$$\text{Capaian Indek kualitas lingkungan hidup Tahun 2022 : } \frac{77,94}{86,85} \times 100\% = 89,74 \%$$

1. Indek Kualitas Lingkungan Hidup

Upaya mengendalikan Pencemaran dan kerusakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan komponen masyarakat masih belum dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kabupaten Pesisir Selatan. Berbagai inisiatif dilakukan dan ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak lagi pemangku kepentingan, namun hal yang menjadi krusial adalah penentuan tolak ukur pencapaian yang dapat dengan mudah dipahami dan bersifat implementasi.

Kementerian Lingkungan Hidup pada Tahun 2009 telah mengembangkan alat ukur yang mudah di pahami dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup sehingga menghasilkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indek ini terfokus pada media lingkungan air, Udara dan lahan. IKLH adalah perwujudan parameter Lingkungan Hidup yang kompleks namun tetap mempertahankan makna esensi dari masing-masing indikator pada setiap Lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), rumusannya adalah sebagai berikut :

Untuk IKLH Kabupaten/Kota $(0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$

Perhitungan Pencapaian IKLH Tahun 2022.

$$\begin{aligned} \text{IKLH diperoleh} &= (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL}) \\ &= (0,376 \times 66,83) + (0,405 \times 92,43) + (0,219 \times 70,21) \\ &= 25,13 + 37,43 + 15,36 \end{aligned}$$

$$\text{IKLH} = 77,94 \text{ (baik)}$$

Keterangan :

1. IKU = Indek Kualitas Udara
2. IKL = Indek Kualitas Lahan
3. IKA = Indek Kualitas Air

Status IKLH Kabupaten Pesisir Selatan berada pada angka 77.94. Hal ini menunjukkan bahwa IKLH Kabupaten Pesisir Selatan termasuk kategori baik. Parameter yang di uji pada IKA ini adalah untuk parameter fisika pH, TSS, dan TDS sedangkan parameter kimia BOD, COD dan Fosfat . Pemantauan Kualitas Air pada sumber air dilakukan paling sedikit 1 x 6 bulan di Musim Hujan dan Musim Kemarau. Pada peraturan Menteri Negara Lingkungan

Hidup No 1 Tahun 2010 Pasal 31 menjelaskan bahwa pemantauan terhadap kualitas air dilakukan dengan tujuan untuk menentukan status mutu dari air sungai yang merupakan dasar untuk evaluasi terhadap pengaruh lingkungan sekitar.

Parameter yang diukur Dinas Lingkungan Hidup Pada Tahun 2022 antara lain : DO, BOD, COD, TSS, Fosfat, Caliform E.Coli dan Pemantauan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun pada bagian hulu dan hilir sungai di 8 (delapan) Sungai yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.64
Titik Pantau Pengambilan Sampel Pemantauan Kualitas Air
Tahun 2022

No	Sungai	Lokasi
1	Batang Tarusan	Kec. Koto XI Tarusan
2	Batang Bayag	Kec. Bayang
3	Batang Batang Kapas	Kec. Batang kapas
4	Batang Kambang	Kec.Lengayang
5	Batang InderaPura	Kec. Pangkalan
6	Batang Tapan	Kec. BAB Tapan





Gambar 3.17. Pengujian Kualitas Air di Laboratorium UPD Lingkungan Hidup Kab.Pesisir Selatan

Sasaran Strategis **Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup** juga didukung dengan Indikator (1) Indeks Kualitas Udara dan (2) Indeks Kualitas Lahan. Kedua indeks ini diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Program Kegiatan yang mendukung Pencapaian sasaran strategis 12 (Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup) adalah: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati. Program Pengelolaan Persampahan di berlakukan di seluruh pelosok kabupaten dengan membersihkan sampah dan mengumpulkan sampah serta mengangkut sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Program Keanekaragaman Hayati dengan memelihara, merawat dan menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.65
Perkembangan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2020–2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Capaian %		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Tanpa satuan	72,458	86,74	86,85	119,7	87,39	89,74

Analisis hasil capaian kinerja 3 tahun terakhir untuk indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan IKLH karena ada perubahan formula dan target kinerja yang diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan surat edaran No.SE.4/MenLHK/Setjen/KUM.14/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Berwawasan Lingkungan. Kemudian Perbandingan capaian 2021 ke Tahun 2022 mengalami peningkatan dengan hasil IKLH Baik. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Kota Lain Capaian Kinerja Dinas Perkintan LH berada di posisi 2 terbaik di Sumatera Barat dengan posisi 1 adalah Kabupaten Pasaman dengan Capaian IKLH 78.07. Berikut dapat dilihat hasil capaian Kinerja Kabupaten Kota ses Sumatera Barat Tahun 2022.

No	Kabupaten/Kota	Provinsi	IKA	IKU	IKL	IKLH	Target	Rating
1	Kabupaten Agam	Sumatera Barat	61.28	90.94	48.01	70.39	67.8	BAIK
2	Kabupaten Dharmas Raya	Sumatera Barat	51.38	85.32	42.7	63.23	64.93	SEDANG
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat	0	92.68	93.21	57.95	79.51	SEDANG
4	Kabupaten Lima Puluh Kota	Sumatera Barat	55.63	92	62.53	71.87	71.02	BAIK
5	Kabupaten Padang Pariaman	Sumatera Barat	53.81	93.89	39.76	66.97	67.89	SEDANG
6	Kabupaten Pasaman	Sumatera Barat	62.38	93.44	76.56	78.07	74.64	BAIK
7	Kabupaten Pasaman Barat	Sumatera Barat	61.25	94.36	46.81	71.5	68.74	BAIK
8	Kabupaten Pesisir Selatan	Sumatera Barat	66.83	92.43	70.21	77.94	72.45	BAIK
9	Kabupaten Sijunjung	Sumatera Barat	57.64	94.51	65.58	74.31	70.79	BAIK
10	Kabupaten Solok	Sumatera Barat	54.17	90.55	72.96	73.02	69.28	BAIK
11	Kabupaten Solok Selatan	Sumatera Barat	56.67	91.9	75.07	74.97	79.74	BAIK
12	Kabupaten Tanah Datar	Sumatera Barat	57.39	91.06	52.26	69.9	68.01	SEDANG
13	Kota Bukittinggi	Sumatera Barat	30	87.89	22.38	51.77	56.8	SEDANG
14	Kota Padang	Sumatera Barat	66.67	73.87	72.34	70.83	66.84	BAIK
15	Kota Padang Panjang	Sumatera Barat	46.07	91.29	56.18	66.6	72.64	SEDANG
16	Kota Pariaman	Sumatera Barat	33.33	95.09	24.24	56.35	63.6	SEDANG

17	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	55.14	93.11	25.78	64.09	58.75	SEDANG
18	Kota Sawah Lunto	Sumatera Barat	52	87	37.01	62.89	65.7	SEDANG
19	Kota Solok	Sumatera Barat	50.83	91.07	38.3	64.38	69.6	SEDANG

Sebagai Monitoring dan Evaluasi dalam mencapai sasaran strategis diatas dilakukan Pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang telah diberikan rekomendasi izin Lingkungan yang diharapkan dari pengawasan ini Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup bisa melakukan pembinaan , sosialisasi sekaligus menindak lanjuti pengaduan yang terkait dengan masalah lingkungan, di samping itu dari hasil Monitoring ini Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup bisa melakukan pembinaan dan mengusulkan terkait dengan peningkatan Peringkat Perusahaan (proper) dan sosialisasi mengenai kewajiban perusahaan kepada lingkungan sekitar perusahaan dengan program CS dan melakukan pengendalian terhadap bahan Berbahaya dan Beracun(B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun(Limbah B3) melalui Program Pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun(B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun(Limbah B3)

Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH dan Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/Kota. Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPL. Izin ini dapat dilihat dari Dokumen Lingkungan dan SPPL yang sudah mendapat persetujuan dari DinasLingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Dokumen UKL-UPL sebanyak 52 (Lima Puluh Dua) dokumen terdiri atas usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Ruas Jalan, Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani dan lain-lain
2. Persetujuan SPPL sebanyak 10 (Sepuluh) buah yang terdiri atas usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Menara, Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK) Peningkatan Jaringan Irigasi dan lain-lain.

Indikator ini didukung oleh program Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan target anggaran Rp. 396,646,545 dan realisasi sebesar Rp 360,948,796 atau capaian 91%, berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 35.697.749 atau 9,9 %.

Adapun prestasi yang sudah di peroleh dari program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat dengan kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup, melalui pembinaan ke sekolah-sekolah dengan program Adiwiyata.

Pada tahun 2022 sekolah yang mendapat Adiwiyata Tingkat Kabupaten yaitu SMP Negeri 8 Koto XI Tarusan, SD Negeri 22 Palangai Gadang Kecamatan

Ranah Pesisir, SMA Negeri 1 Pancung Soal. Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional yaitu UPT SMPN 3 Ranah Pesisir dan Sekolah Adiwiyata Tingkat Mandiri diraih oleh SMAN 3 Painan.



Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Mandiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sasaran 13 : Pesisir Selatan menjadi Daerah Tujuan Wisata Favorit di Pantai Barat Indonesia

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 13 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.66 berikut ini:

Tabel 3.66
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 13

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	1.200.000	942.240	78.52
2.	Lama tinggal wisatawan	Hari	1.25	1.25	100.00
Rata-rata Capaian					89,26

sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ; 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 13 sebesar 89,26%. Pencapaian sasaran strategis 13 termasuk predikat **Sangat Baik**.

2. Jumlah kunjungan wisatawan

Indikator Jumlah kunjungan wisatawan ini digunakan untuk menilai peran serta pemerintah dalam upaya meningkatkan jumlah wisatawan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara yang berkunjung ke daya tarik wisata. Formulasinya Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara baik yang berbayar maupun yang tidak berbayar.

Pada tahun 2022 realisasi jumlah kunjungan wisatawan diambil dari pengunjung yang berkunjung ke destinasi wisata yang dijadikan sampel, diantaranya : Pantai Carocok Painan, Kawasan Mandeh, Jembatan Akar, Air Terjun Bayang Sani, Pulau Penyau Amping Parak, Pantai Pasir Putih Kambang, Pantai Pasar Lama Muaro Air Haji, Sako Tapan, Rumah Gadang Mande Rubiah dan Pantai Sambungo Silaut. Jumlah pengunjung yang berwisata ke Pesisir Selatan sebanyak 942.240 orang (78,52%) dari target sebanyak 1.200.000 orang. Jumlah pengunjung terdiri dari wisatawan nusantara sebanyak **942.240** orang dan wisatawan mancanegara sebanyak **124** orang.

Tabel 3.67
Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2022

No	Wisatawan Mancanegara (Wisman)	Wisatawan Nusantara (Wisnu)	Jumlah total
1	120	942.120	942.240

sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ; 2022

Banyaknya wisatawan yang berkunjung menjadikan sektor pariwisata berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk lebih jelasnya realisasi dan capaian kinerja jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.68 dibawah ini:

Tabel 3.68
Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Kunjungan
Wisatawan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	1.200.000	942,240	78,52 %

sumber : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga ; 2022

Formulasi capaian indikator kinerja Jumlah kunjungan wisatawan

Jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke objek wisata berbayar di Pesisir Selatan dalam 1 (satu) tahun

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

Capaian Jumlah kunjungan wisatawan Tahun 2022 :	942.240	X	100%	=	78,52%
	1.200.000				

Tabel 3.69
Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Kunjungan Wisatawan
Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian		
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	177.283	344.297	942.240	17,71%	34,43%	78,52%

sumber : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga ; 2022

Selama 3 tahun terakhir realisasi indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan yang datang ke Kabupaten Pesisir Selatan yaitu, tahun 2020 realisasi sekitar 177.283 orang, tahun 2021 jumlah realisasi Wisatawan mencapai 344.297 orang, sedangkan pada pada tahun 2022 berjumlah 942.240 orang, dengan capaian tahun 2020 sebesar 17,71 % tahun 2021 sebesar 34,43% dan tahun 2022 sebesar 78,52 %.

Tabel 3.70
Perbandingan realisasi Capaian Indikator Jumlah Kunjungan
Wisatawan Tahun 2022 dengan standar provinsi
Tahun 2020 - 2022

No	Wilayah	2020	2021	2022
1	Kabupaten Pesisir Selatan	177.283	344.297	942.240
2	Provinsi Sumatera Barat	8.052.742	4.806.599	4.783.664

sumber : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga ; 2022

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perbandingan jumlah kunjungan wisatawan kabupaten Pesisir Selatan telah mengalami peningkatan selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Faktor-faktor yang Mendukung Keberhasilan Pariwisata :

1. Adanya pelonggaran aturan pembatasan Covid-19 yang telah dimulai sejak tahun 2022, dimana pembatasan perjalanan bagi turis lokal maupun turis mancanegara sudah tidak banyak ditemukan pembatasan secara ketat.
2. Semakin banyaknya kelompok sadar wisata (Pok darwis) di kabupaten Pesisir Selatan yang berjumlah 30 pok darwis dengan menyiapkan iven berbasis potensi desa.
3. Promosi yang dilaksanakan dengan melibatkan media sosial dan internet.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata secara umum yaitu :

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara, menjaga dan memanfaatkan potensi wisata.
- b. Inflasi yang terjadi dampak kenaikan BBM.
- c. Kurangnya iven untuk promosi dan publikasi pariwisata.
- d. Masih terbatasnya SDM yang memiliki keahlian dalam bidang kepariwisataan terutama dalam penguasaan bahasa asing.

Dalam DPA 2022, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga memperoleh alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan di bidang pariwisata sebesar Rp 9.210.094.110. Anggaran tersebut terdistribusi ke dalam komponen dan sub komponen dengan bentuk kegiatan yang telah dilakukan meliputi penyediaan sarana prasarana pariwisata dan olahraga serta perencanaannya, peningkatan sumber daya manusia bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dan iven pariwisata.

Sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga selalu berupaya untuk meningkatkan capaian kinerja sesuai target dalam dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) yang ditetapkan pada setiap awal tahunnya. Namun demikian, upaya tersebut disadari tidaklah mudah, terutama karena dipengaruhi oleh dinamika lingkungan internal maupun eksternal organisasi sebagai bagian dari wujud peningkatan pelayanan kepada pemangku kepentingan utama (stake holders).

Melalui mekanisme evaluasi atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh segenap jajaran pimpinan unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, telah dilakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran, yang berpengaruh pada capaian kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. Perubahan ini disebabkan oleh pengaruh kondisi keuangan daerah yang menyebabkan perlunya perubahan tersebut. Hal ini dapat dipahami sebagai arah kebijakan untuk melakukan perbaikan, inovasi dan kreativitas organisasi dalam mencapai peningkatan capaian kinerja.

Indikator ini ditunjang oleh program *Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata* Dengan target anggaran Rp. 8.148.019.752 Dan realisasi sebesar 8.013.886.560 atau capaian 98,35% berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program *Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata* terdapat efisiensi anggaran sebesar 134.113.192 atau 1,64 %.

Adapun prestasi yang di peroleh adalah peringkat III Daya Tarik Wisata Halal Tahun 2022 Mesjid Samudera Illahi di Kawasan Pantai Carocok Painan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tanggal 27 September 2022 di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Barat.



3. Lama tinggal wisatawan

Lama tinggal wisatawan yang berwisata ke Kabupaten Pesisir Selatan masih statis/sama seperti tahun sebelumnya, selama 1.25 hari. Kondisi ini berkorelasi dengan tingkat hunian kamar yang tidak sebanding dengan ketersediaan kamar yakni sekitar 15%. Jumlah hunian kamar ini juga dipengaruhi oleh masih banyak penginapan yang tidak melaporkan jumlah kamar yang ter huni oleh para tamunya dengan berbagai alasan. Selain itu juga dipengaruhi oleh jumlah ivent pariwisata berskala besar yang berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan ke Pesisir Selatan.

Pada tahun 2022, realisasi lama tinggal wisatawan di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 1.25 hari dari 942.240 Jumlah kunjungan wisatawa. Jumlah kunjungan ini tidak sampai pada target yang ditetapkan yaitu 1.200.000 orang. Hal ini disebabkan karena kurangnya ivent untuk promosi dan publikasi pariwisata serta semakin banyaknya tempat objek wisata yang ditawarkan daerah lain serta semakin berlomba-lombanya kabupaten/kota lain dalam mengembangkan pariwisata, sehingga kunjungan wisatawan yang datang Kabupaten Pesisir Selatan menjadi terbagi.

Perhitungan lama tinggal wisatawan dengan mempertimbangkan penghitungan kapasitas/kemampuan hunian pertahun. Kemampuan hunian tersebut seperti hotel, homestay dan wisman di Kabupaten Pesisir Selatan dapat menampung sebanyak 248.565 orang dengan jumlah penginapan sebanyak 124 buah dan jumlah kamar sebanyak 36.206 kamar. Untuk lebih jelasnya

realisasi dan capaian kinerja jumlah Lama tinggal wisatawan di Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.71 dibawah ini:

Tabel 3.71
Realisasi dan Capaian Indikator Lama Tinggal Wisatawan
Tahun 2022 di Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1,25	1,25	100

sumber : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga ; 2022

Formulasi capaian indikator kinerja Lama tinggal wisatawan wisatawan

Jumlah hari yang dihabiskan wisatawan yang berkunjung ke Pesisir selatan untuk tinggal di hotel/penginapan

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

$$\text{Capaian Lama Tinggal Wisatawan Tahun 2022 : } \frac{1,25}{1,25} \times 100\% = 100\%$$

Lama tinggal wisatawan dapat tercapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan kamar pada hotel dan homestay dapat memenuhi jumlah wisatawan yang berkunjung. Sebagian besar wisatawan yang berkunjung ke Pesisir Selatan lebih banyak menginap di Kota Padang. Hali ini disebabkan karena ketersediaan akomodasi dan jarak tempuh yang relatif tidak jauh dari Kota Painan. Sementara itu pertumbuhan penginapan, homestay dan resort di Kabupten Pesisir Selatan cukup pesat terutama di Kawasan Mandeh pada beberapa tahun terakhir.

Jumlah kunjungan wisatawan dan akomodasi sangat berpengaruh pada pengembangan industri pariwisata dan pendapatan asli daerah. Dengan adanya dukungan alokasi dana melalui ivent, promosi dan publikasi melalui media serta pengembangan dan pemeliharaan fasilitas di destinasi wisata maka jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal memberikan kontribusi positif dalam pendapatan asli daerah.

Tabel 3.72
Realisasi Indikator Kinerja Lama Tinggal Wisatawan
Tahun2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian		
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1,5	1,25	1,25	120%	100%	100%

sumber : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga ; 2022

Selama 3 tahun terakhir realisasi indikator Lama Tinggal Wisatawan yang datang ke Kabupaten Pesisir Selatan cenderung turun yaitu, tahun 2020 realisasi sebesar 1,5 hari sedangkan pada tahun 2021 jumlah realisasi mencapai 1,25 hari, dan pada pada tahun 2022 berjumlah 1,25 hari, dengan capaian tahun 2020 sebesar 120 % tahun 2021 sebesar 100% dan tahun 2022 sebesar 100 %.

Tabel 3.73
Perbandingan realisasi Capaian Indikator Lama Tinggal
Wisatawan Tahun 2022 dengan standar provinsi
Tahun 2020 - 2022

No	Wilayah	2020	2021	2022
1	Kabupaten Pesisir Selatan	1,5	1,25	1,25
2	Provinsi Sumatera Barat	2,9	1,45	1,24

sumber : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga ; 2022

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator Lama Tinggal wisatawan kabupaten Pesisir Selatan cenderung fluktuatif.

Faktor-faktor yang Mendukung Keberhasilan Pariwisata :

1. Semakin banyaknya Pok darwis di setiap lokasi-lokasi wisata sehingga pengunjung wisata bisa di layani dengan baik.
2. Promosi yang dilaksanakan sudah baik dengan melibatkan media sosial dan internet.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata secara umum yaitu :

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara, menjaga dan memanfaatkan potensi wisata
- b. Kurangnya partisipasi investor dalam pengembangan objek objek wisata. Hal ini disebabkan karena sulitnya proses pembebasan lahan, aturan atau regulasi yang belum jelas tentang izin pengembangan usaha dalam bidang kepariwisataan
- c. Masih terbatasnya SDM yang memiliki keahlian dalam bidang kepariwisataan terutama dalam penguasaan bahasa asing.

Strategi/ upaya pemecahan:

1. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga, memelihara, dan memanfaatkan potensi wisata yang ada di sekitar mereka.
2. Memberikan berbagai kemudahan kepada pihak ketiga yang berniat menanamkan modalnya di sektor pariwisata. Kemudahan yang dimaksud bisa dalam bentuk memangkas tingkat hirarki perizinan, memberikan tarif yang jelas dan pasti mengenai biaya pengurusan perizinan, mengajak masyarakat untuk memanfaatkan rumahnya menjadi home stay.
3. Mengembangkan hasil kerajinan /produksi rumah tangga untuk menjadi sovenir daerah
4. Memberikan pelatihan berbahasa asing untuk menanti tamu wisawawan asing.

Indikator ini didukung oleh program *Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata* Dengan target anggaran Rp. 1.062.074.358 Dan realisasi sebesar Rp. 952.115.310 atau capaian 89,64% berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program *Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif* terdapat efisiensi anggaran sebesar 109.959.048 atau 10,35 %.

Sasaran 14 : Berkembangnya Ekonomi Kreatif

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 14 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.74 berikut ini:

Tabel 3.74
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 14

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah omset usaha ekonomi kreatif	Milyar Rp.	18	16	88,89
Rata-rata Capaian					88,89

sumber : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga ; 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 14 sebesar 88,89%. Pencapaian sasaran strategis 14 termasuk predikat **Sangat Baik**.

Formulasi capaian indikator kinerja Jumlah Omset Ekonomi Kreatif

$$\text{Omset UEK} = \sum y_{i1, 2, 3, \dots}$$

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

$$\text{Capaian Jumlah Omset Ekonomi Kreatif Tahun 2021 : } \frac{16 \text{ milyar}}{18 \text{ Milyar}} \times 100\% = 88,89\%$$

1. Jumlah omset usaha ekonomi kreatif

Jumlah omset usaha ekonomi kreatif yang ada di Pesisir Selatan berasal dari beberapa usaha yang tersebar di 15 kecamatan, baik yang tergabung dalam bentuk kelompok maupun individu. Pelaku ekonomi kreatif Pesisir Selatan terdiri dari Sub sektor kerajinan, sub sektor fashion, sub sektor kuliner, sub sektor film, animasi dan video, dan sub sektor fotografi. Realisasi omset pada tahun 2022 sebesar Rp 16 Milyar dari target yang direncanakan sebesar Rp 18 Milyar. Omset terbesar ekonomi kreatif didominasi oleh sub sektor kuliner, sub sektor kerajinan dan fashion. Hampir 95 % omset usaha ini berasal dari ketiga sub sektor tersebut. Sedangkan sub sektor yang sedang berkembang pesat saat ini adalah sub sektor fotografi dan subsektor film, animasi dan video.

Perkembangan tersebut disebabkan oleh semakin banyaknya anak muda yang bekerja di bidang industri ekonomi kreatif seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital dan internet.

Pembinaan pelaku ekonomi kreatif dilakukan melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga baik melalui dana APBD maupun APBN. Beberapa bentuk kegiatan pelatihan yang sudah dilaksanakan diantaranya:

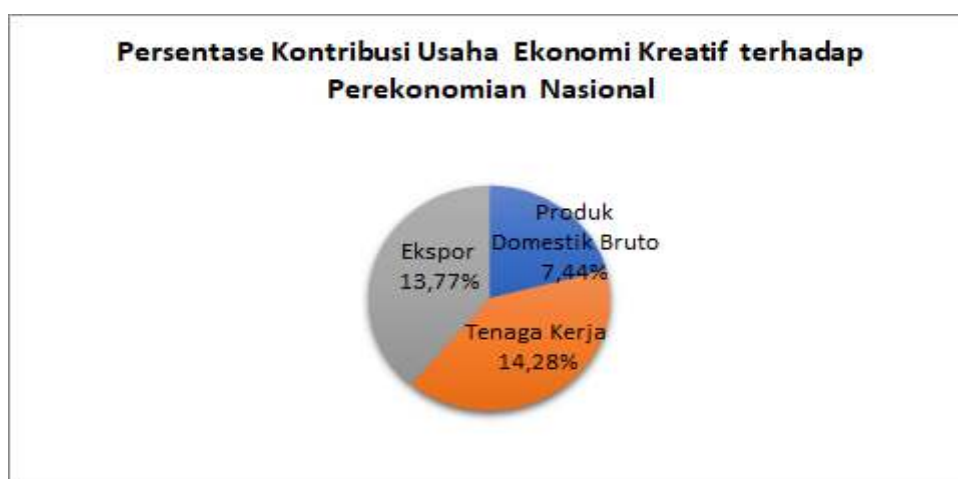
- Pelatihan digitalisasi: Branding pemasaran dan penjualan pada desa wisata, Homestay, kuliner, souvenir dan fotografer
- Pelatihan Pengelolaan Usaha Homestay/Pondok Wisata
- Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner
- Pelatihan Pemandu Ekowisata
- Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata
- Pelatihan Sadar Wisata

Tabel 3.75
Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Omset Usaha Ekonomi Kreatif
Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian		
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jumlah omset usaha ekonomi kreatif	Milyar Rp.	-	7,2	16	-	60%	88,89 %

sumber : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga ; 2022

Dari tabel diatas dapat di jelaskan bahwa selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, pertumbuhan Jumlah Omset Usaha Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Selatan sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2021 omset ekonomi kreatif sebesar Rp. 7,2 Milyar dan meningkat menjadi Rp 16 Milyar pada tahun 2022.



Gambar 3.18. Kontribusi Usaha Ekonomi Kreatif terhadap Perekonomian Nasional

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), subsektor ekonomi kreatif memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional dengan menyumbangkan 7,44% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), 14,28% tenaga kerja, dan 13,77% ekspor. Sumatera Barat mempunyai beberapa industri kreatif yang tumbuh berbasis budaya setempat yang didorong oleh industri kepariwisataan tetapi dukungan kebijakan pengembangannya belum ada. Arah kebijakan industri kreatif perlu mempertimbangkan keterkaitan antar sektor ekonomi dan rantai pasok (supply chain) untuk peningkatan daya saing dan kesinambungan. Untuk Kabupaten Pesisir Selatan sendiri terjadi peningkatan omset ekonomi kreatif seiring dengan terkendalinya pandemi Covid-19. Perekonomian semakin menggeliat dan usaha-usaha masyarakat khususnya ekonomi kreatif kembali bangkit.

Adapun faktor keberhasilan pencapaian jumlah omset ekonomi kreatif di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 yaitu:

1. Fasilitasi ruang pemasaran bagi pelaku ekonomi kreatif berupa tempat berdagang seperti TIC dan Taman Spora
2. Sinergi program pelaku ekonomi kreatif dengan Pemda berupa promosi hasil usaha pelaku Ekonomi Kreatif di berbagai media
3. Pelatihan peningkatan kapasitas bagi pelaku ekonomi kreatif
4. Peningkatan kualitas produk melalui fasilitasi sertifikasi produk
5. Fasilitasi pihak perbankan kepada pelaku usaha ekonomi kreatif.

Faktor hambatan terhadap pencapaian indikator jumlah omset usaha ekonomi kreatif yaitu :

1. Kurang optimalnya pembinaan kepada pelaku ekonomi kreatif
2. Kurangnya perhatian pada kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif dalam skala kebijakan
3. Inflasi sebagai dampak dari kenaikan BBM.

Dalam DPA 2022, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga memperoleh alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan ekonomi kreatif sebesar Rp 1.062.074.358. Anggaran tersebut terdistribusi ke dalam komponen dan sub komponen dengan bentuk kegiatan yang telah dilakukan meliputi peningkatan sumber daya manusia bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, pembinaan komunitas ekonomi kreatif serta pembelian produk ekonomi kreatif, terbatasnya anggaran untuk ekonomi kreatif ini tidak terlepas dari skala prioritas anggaran yang ditetapkan.

Indikator ini didukung oleh program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan target anggaran Rp. 1.062.074.358 dan realisasi sebesar Rp 952.115.310 atau capaian 89,65%, berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 109.959.048 atau 10,35%. Berikut beberapa prestasi yang di peroleh pelaku usaha pada tahun 2022:

Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk Batik Loempo yang diadakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Padang tanggal 9 Desember 2022

- Sertifikasi Barista untuk Klinkink Coffee dan Khawla Coffee Roastery yang diadakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Padang tanggal 3 November 2022



- Sertifikasi CHSE untuk Rumah Makan/Penginapan Dena dan Pulau Setan diadakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tanggal 2 Desember 2022



Sasaran 15 : Meningkatnya Akses Layanan Bidang Pendidikan

Dalam rangka mewujudkan sasaran Meningkatnya Akses Layanan Bidang Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan 2 (dua) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 15 yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.76. berikut ini:

Tabel 3.76
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 15

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Harapan lama sekolah	Tahun	13.40	13.35	99.63
2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8.32	8.43	101,32
Rata-rata Capaian					100,47

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 15 sebesar 100,47%. Pencapaian sasaran strategis 15 termasuk predikat **Sangat Baik**.

1. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah merupakan perhitungan untuk mengukur lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Pada tahun 2022, target indikator Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan adalah 13,40 tahun dan terealisasi sebesar 13,35 tahun dengan capaian kinerja sebesar 99,63%. Berikut table 3.77 target dan realisasi Harapan Lama Sekolah tahun 2022:

Tabel 3.77
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,40	13,35	99,63

Formulasi capaian indikator kinerja Harapan Lama Sekolah

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

Capaian Harapan Lama Sekolah Tahun 2022 :	$\frac{13,35}{13,40}$	X	100%	=	99,63%
---	-----------------------	---	------	---	--------

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa harapan lama sekolah tahun 2022 yang semula ditargetkan sebesar 13,40 tahun terealisasi sebesar 13,35 tahun atau dengan capaian 99,63%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator ini dinilai kategori **sangat baik**.

Dibandingkan tahun 2020 sampai 2022, Harapan lama sekolah Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan. Hal ini dapat di lihat pada tabel 3.78 berikut ini:

Tabel 3.78
Perkembangan Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah
Tahun 2021–2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Capaian %		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,32	13,33	13,35	98,63	99,79	99,63

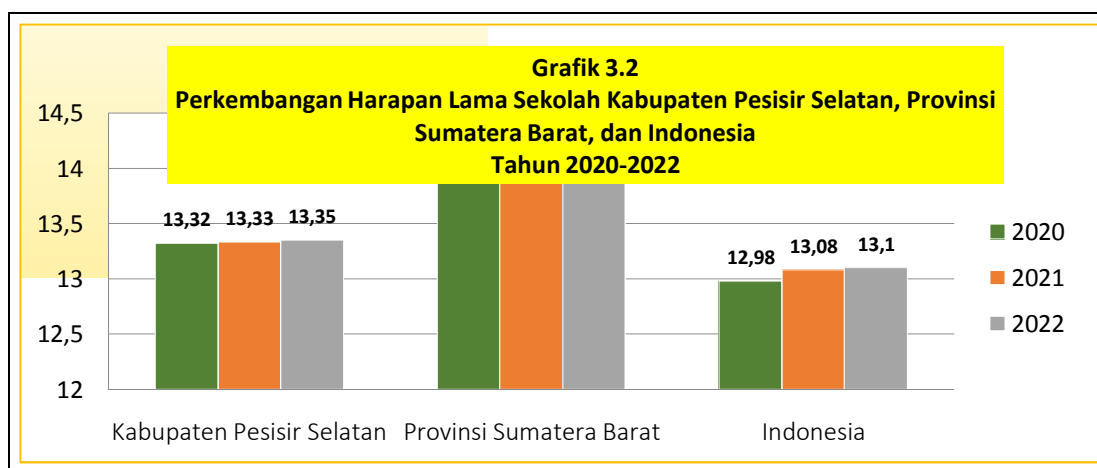
sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan, Tahun 2022

Berikut data realisasi Harapan lama Sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan, provinsi Sumatera Barat dan Nasional pada tahun 2020-2022:

Tabel 3.79
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pesisir selatan
Tahun 2020 - 2022

No	Wilayah	2020	2021	2022
1	Kabupaten Pesisir Selatan	13,32	13,33	13,35
2	Provinsi Sumatera Barat	14,02	14,09	14,10
3	Indonesia	12,98	13,08	13,10

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan , 2022



Gambar 3.19. Perkembangan Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, terlihat bahwa Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat yang sangat tinggi akan perlunya pendidikan bahkan sampai ke jenjang perguruan tinggi.

Berikut Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2020–2022:

Tabel 3.80
Perbandingan Harapan Lama Sekolah
Kabupaten/Kota Tahun 2020–2022

Kabupaten/Kota		Tahun		
		2020	2021	2022
(1)		(3)	(4)	(5)
Kabupaten				
1.	Kepulauan Mentawai	12,82	12,89	12,89
2.	Pesisir Selatan	13,32	13,33	13,35
3.	Solok	13,04	13,05	13,30
4.	Sijunjung	12,37	12,38	12,64
5.	Tanah Datar	14,33	14,34	14,59
6.	Padang Pariaman	13,67	13,68	13,93
7.	Agam	13,87	13,88	13,88
8.	Lima Puluh Kota	13,29	13,30	13,40
9.	Pasaman	12,80	12,81	13,05
10.	Solok Selatan	12,71	12,72	12,73
11.	Dharmasraya	12,43	12,44	12,51
12.	Pasaman Barat	13,61	13,68	13,69
Kota				
13.	Padang	16,52	16,53	16,54
14.	Solok	14,32	14,33	14,34
15.	Sawahlunto	13,17	13,18	13,42
16.	Padang Panjang	15,06	15,07	15,07
17.	Bukittinggi	14,97	14,98	14,99
18.	Payakumbuh	14,26	14,27	14,29
19.	Pariaman	14,54	14,55	14,61
Sumatera Barat		14,02	14,09	14,10

Sumber: Pesisir Selatan Dalam Angka, 2022

Peningkatan pendidikan terlihat pada tabel dan gambar perkembangan Harapan Lama Sekolah, dimana untuk wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 sebesar 13,32, tahun 2021 sebesar 13,33 naik menjadi 13,35 pada tahun 2022 dan untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 sebesar 14,02, tahun 2021 sebesar 14,09 naik menjadi 14,10 di tahun 2022 sedangkan untuk wilayah Indonesia pada tahun 2020 sebesar 12,98, tahun 2021 sebesar 13,08 menjadi 13,10 di tahun 2022. Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Lainnya indikator Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan berada di posisi ke- 7 (tujuh) setelah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Adapun faktor - faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja harapan Lama Sekolah adalah sebagai berikut :

a. Faktor Keberhasilan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendukung setiap guru dan siswa dalam menyalurkan kemampuan, minat dan bakat pada Program Pengelolaan Pendidikan, yaitu pada kegiatan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa. Dengan anggaran pada pembinaan SD dan SMP sebesar Rp. 298.551.540, dilaksanakan penyelenggaraan lomba-lomba baik akademis maupun non akademis, seperti, KSN, SOSN, dan FLS2N. Selanjutnya dilakukan pembinaan berkelanjutan siswa berprestasi pada tahun 2022 target dan realisasi sebanyak 6 orang.

b. Faktor Kegagalan

1. yang pertama keinginan untuk mempertahankan keseimbangan hidup bersama-sama
2. yang kedua pertimbangan atas lawan, kelompok aposisi dimana perubahan akan terjadi dari dalam maupun dari luar di suatu organisasi, baik secara perseorangan maupun kelompok
3. dan yang terakhir ketidakmampuan untuk mengadakan perubahan.

Kegiatan Penunjang dalam meningkatkan daya saing pendidikan adalah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa. Untuk mewujudkan kegiatan dimaksud, khususnya kegiatan Lomba, Festival dan Olimpiade tahun 2022 telah disusun berbagai kebijakan dan strategi yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan atau kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi, baik di tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional. Kegiatan di tingkat Nasional meliputi Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN), *Kompetisi Sains Nasional (KSN)*. Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada kegiatan tingkat Provinsi dan tingkat nasional sehingga setiap tahun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan menyeleksi beberapa cabang/jenis lomba yang diperuntukan siswa SD se-Kabupaten Pesisir Selatan .

Maksud kegiatan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki pada cabang mata pelajaran, olahraga dan seni serta memberikan wadah kepada siswa dalam meningkatkan prestasinya mulai dari tingkat sekolah, Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Tujuan kegiatan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama adalah menyeleksi siswa berprestasi dari cabang mata pelajaran, olahraga dan seni yang nantinya akan mewakili Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengikuti kegiatan serupa di tingkat yang lebih tinggi.

Indikator ini didukung oleh program Pengelolaan Pendidikan dengan target anggaran **Rp.95.950.130.443,-** dan realisasi sebesar Rp. **93.517.699.199,-** atau capaian **99,63 %**. berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program Pengelolaan Pendidikan terdapat efisiensi anggaran sebesar **2.432.431.244 ,-** atau **2,5 %**

2. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Pada tahun 2022, Kabupaten Pesisir Selatan menargetkan rata-rata lama sekolah 8,32 tahun dan terealisasi sebesar 8,43 tahun dengan capaian 101,32%. Berikut tabel 3.81 target dan realisasi rata rata lama sekolah tahun 2022:

Tabel 3.81
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,32	8,43	101,32 %

sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan, Tahun 2022

Formulasi capaian indikator kinerja Rata rata Lama Sekolah

$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$$

Capaian Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2022 :	$\frac{8,32}{8,43}$	X	100%	=	101,32%
---	---------------------	---	------	---	---------

Dari di atas dapat dijelaskan bahwa rata rata lama sekolah tahun 2022 ditargetkan sebesar 8,32 tahun, terealisasi sebesar 8,43 tahun atau dengan capaian 101,32%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator ini dinilai sangat berhasil dengan kategori **sangat baik**.

Dibandingkan tahun 2021 sampai 2022, rata rata lama sekolah Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan, seperti tabel 3.82 berikut ini:

Tabel 3.82
Perkembangan Indikator Kinerja Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2020–2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Capaian %		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,49	8,27	8,32	97,29	99,76	101,32

Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Lainnya, Rata-rata lama Sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan berada pada posisi ke-12 setelah Kabupaten Tanah Datar. Berikut tabel 3.83, perbandingan rata-rata lama sekolah 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2020–2022:

Tabel 3.83
Perbandingan Rata rata Lama Sekolah
Kabupaten/Kota Tahun 2020–2022

Kabupaten/Kota		Tahun		
		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
Kabupaten				
1.	Kepulauan Mentawai	7.09	7,20	7,48
2.	Pesisir Selatan	8.26	8,27	8,43
3.	Solok	7.86	7,87	7,89
4.	Sijunjung	8.11	8,12	8,30
5.	Tanah Datar	8.61	8,62	8,90
6.	Padang Pariaman	8.87	7,88	8,16
7.	Agam	8.96	8,97	8,98
8.	Lima Puluh Kota	7.99	8,07	8,08
9.	Pasaman	8.09	8,10	8,11
10.	Solok Selatan	8.28	8,32	8,41
11.	Dharmasraya	8.47	8,55	8,56
12.	Pasaman Barat	8.19	8,27	8,55
Kota				
13.	Padang	11.58	11,59	11,60
14.	Solok	11.03	11,04	11,35
15.	Sawahlunto	10.17	10,32	10,43
16.	Padang Panjang	11.62	11,63	11,92
17.	Bukittinggi	11.33	11,34	11,63
18.	Payakumbuh	10.73	10,81	10,82
19.	Pariaman	10.59	10,67	10,78
Sumatera Barat		8.99	9,07	9,18

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 2022

Indikator ini didukung oleh program Pengelolaan Pendidikan dengan target anggaran Rp 35.284.783.786,- dan realisasi sebesar Rp. 34.475.393.770,- atau capaian **97,71 %**. berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program Pengelolaan Pendidikan terdapat efisiensi anggaran sebesar **Rp. 809.390.016,-** atau **2,29 %**

Sasaran 16 : Meningkatkan Daya Saing Pendidikan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 16 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.84 berikut ini:

Tabel 3.84
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 16

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat propinsi	orang	4	2	50.00
2	Indek Pembangunan literasi	tanpa satuan	6.643	7.172	107.96
Rata-rata Capaian					78,98

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 16 sebesar 78,98%. Pencapaian sasaran strategis 16 termasuk predikat **Baik**.

1. Jumlah Tenaga Pendidik dan Siswa yang Berprestasi Minimal Tingkat Propinsi

Pada tahun 2022, target indikator Jumlah Tenaga Pendidik dan Siswa yang Berprestasi Minimal Tingkat Propinsi adalah 4 orang dan terealisasi sebesar 2 orang dengan capaian kinerja sebesar 50,00%. Berikut table 3.85 target dan realisasi Jumlah Tenaga Pendidik dan Siswa yang Berprestasi Minimal Tingkat Propinsi tahun 2022:

Tabel 3.85
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Tenaga Pendidik dan Siswa yang Berprestasi Minimal Tingkat Propinsi Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Tenaga Pendidik dan Siswa yang Berprestasi Minimal Tingkat Propinsi	Tahun	4	2	50.00

Formulasi capaian indikator kinerja Jumlah Tenaga Pendidik dan Siswa yang Berprestasi Minimal Tingkat Propinsi

Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang memperoleh penghargaan minimal tingkat provinsi

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

Capaian Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang memperoleh penghargaan minimal tingkat provinsi tahun 2022 :	$\frac{2}{4}$	X	100%	=	50,00%
--	---------------	---	------	---	--------

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi tingkat propinsi tahun 2022 ditargetkan sebesar 4 orang, terealisasi sebesar 2 orang atau dengan capaian 50,00%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator ini dinilai kategori **cukup**.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Perumusan kebijakan untuk mencapai tujuan dari Indikator Kinerja telah disusun dalam rencana strategis guna meningkatkan akses pendidikan dan meningkatnya daya saing pendidikan melalui Program Pengelolaan Pendidikan.

Berikut data jumlah guru se Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.86
Jumlah Guru Se-Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Guru		
		TK	SD	SMP
1	Silaut	21	144	64
2	Lunang	36	179	72
3	Basa Ampek Balai	21	156	61
4	Ranah Ampek Hulu	6	143	70
5	Pancung Soal	51	276	100
6	Airpura	31	171	101
7	Linggo Sari Baganti	51	482	222
8	Ranah Pesisir	36	369	145
9	Lengayang	58	586	228
10	Sutera	51	525	265
11	Batang Kapas	12	350	160
12	IV Jurai	41	536	245
13	Bayang	41	458	131
14	Bayang Utara	7	94	44
15	Koto XI Tarusan	37	474	253
	Jumlah	500	4.943	2.161

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk mengetahui perbandingan perkembangan realisasi indikator kinerja jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat provinsi selama 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.87
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian	
			2021	2022	2021	2022
1,1	Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal Tk. Provinsi	Orang	1	2	50%	50%

Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis “Meningkatnya Daya Saing Pendidikan” pada tahun 2022 salah satunya melalui pencapaian jumlah tenaga pendidik dan siswa berprestasi ke tingkat Nasional dengan target sebanyak 4 dan realisasi sebanyak 2 orang. Dibandingkan dengan capaian tahun 2021, angka ini mengalami peningkatan dimana sebelumnya ditargetkan sebanyak 2 orang dan terrealisasi sebanyak 1 orang.

Sasaran Akses Pendidikan diukur dengan 4 Indikator yaitu Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (PAUD, SD, SMP) dan Angka Partisipasi Murni (SD, SMP). Angka Harapan Lama Sekolah sudah sesuai target yaitu 13,33 tahun dimana capaian realisasinya adalah 100%. Angka Rata-rata Lama sekolah memiliki persentase 100,83%. Berikut adalah tabel sasaran dan indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022:

Tabel 3.88
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RELISASI
1	Meningkatnya Akses Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,33 Tahun	13,33
		Rata-rata Lama Sekolah	8,32 Tahun	8,43
		APK PAUD	62,92%	63,48
		APK SD	110,52%	101,63
		APK SMP	86,48%	102,28
		APM SD	99,53%	91,27%
		APM SMP	80,43%	82,6%
2	Meningkatnya Daya Saing Pendidikan	Lembaga Pendidik SD dan SMP akreditasi A	65%	11,13%
		inovasi pendidikan	1 inovasi	1 inovasi

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Angka Partisipasi Kasar SD memiliki target sebesar 110,52% namun realisasinya yaitu sebesar 101,63%, sedangkan Angka Partisipasi Kasar SMP memiliki target sebesar 86,48% dan terealisasi sebesar 102,28%, Namun capaian tersebut lebih tinggi dibanding dengan APK SMP Provinsi dan Nasional. Angka Partisipasi Kasar SD dan SMP merupakan ukuran yang menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. APK dihitung dengan membandingkan antara jumlah siswa SD SMP yang bersekolah di Kabupaten Pesisir Selatan dengan jumlah penduduk usia 7-15 tahun.

Angka Partisipasi Murni SD (APM SD) dalam target yaitu 99,53%, terealisasi 91,27%, untuk Angka Partisipasi Murni SMP (APM SMP) diatas target yaitu 80,43%, terealisasi 82,6%. Dimana untuk Angka Partisipasi Murni SD, persentase capaian realisasinya 90,84% dan untuk Angka Partisipasi Murni SMP, persentase capaian realisasinya 102,86% .

Berikut data perbandingan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP Kabupaten Pesisir Selatan dengan Provinsi Sumatera barat dan Nasional seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.89
Perbandingan APK di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dan Nasional

No	Angka Partisipasi Kasar	Kab. Pesisir Selatan	Sumatera Barat	Nasional
1	SD	99,13 %	101,52 %	100,74 %
2	SMP	99,99 %	105,34 %	102,17 %

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kemdikbud 2021-2022

Berikut data perbandingan capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SMP Kabupaten Pesisir Selatan dengan Provinsi Sumatera barat dan Nasional seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.90
Perbandingan APM di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat,
dan Nasional

No	Angka Partisipasi Murni	Kab. Pesisir Selatan	Sumatera Barat	Nasional
1	SD	89,00 %	91,49 %	91,84 %
2	SMP	74,95 %	79,54 %	76,13 %

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kemdikbud 2021-2022

Dari kedua tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa perbandingan APK dan APM tingkat Kabupaten Pesisir Selatan memiliki persentase yang kecil di bandingkan Sumatera Barat dan Nasional.

Beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah agar Kualitas pendidikan menuju ke kualitas yang semakin baik. Salah satu upaya tersebut antara lain yaitu dengan memperhatikan etika dan keterampilan dalam pembentukan norma dan nilai di sebuah sekolah. Untuk melakukan perubahan tidak lepas dari peran sekolah baik guru maupun kepala sekolah hendaknya dapat menciptakan visi perubahan sehingga menciptakan arah yang jelas, dengan mengkomunikasikan kemungkinan yang akan terjadi di sekolah dan peluang potensial kepada warga sekolah untuk dimanfaatkan guna memajukan sekolah.

Dukungan kepada setiap guru dan siswa dalam menyalurkan kemampuan, minat dan bakat disalurkan melalui Program Pengelolaan Pendidikan, yaitu pada kegiatan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa. Dengan anggaran pada pembinaan SD dan SMP sebesar Rp. 298.551.540, dilaksanakan penyelenggaraan lomba-lomba baik akademis maupun non akademis, seperti, KSN, SOSN, dan FLS2N. Selanjutnya dilakukan pembinaan berkelanjutan siswa berprestasi pada tahun 2022 target dan realisasi sebanyak 6 orang.

Beberapa Kegiatan Penunjang dalam meningkatkan daya saing pendidikan adalah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa. Untuk mewujudkan kegiatan dimaksud, khususnya kegiatan Lomba, Festival dan Olimpiade tahun 2022 telah disusun berbagai kebijakan dan strategi yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan atau kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi, baik di tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional. Kegiatan di tingkat Nasional meliputi Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN), *Kompetisi Sains Nasional (KSM)*. Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada kegiatan tingkat Provinsi dan tingkat nasional sehingga setiap tahun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan menyeleksi beberapa cabang/jenis lomba yang diperuntukan siswa SD se-Kabupaten Pesisir Selatan .

Maksud kegiatan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki pada cabang mata pelajaran, olahraga dan seni serta memberikan wadah kepada siswa dalam meningkatkan prestasinya mulai dari tingkat sekolah, Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Tujuan kegiatan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama adalah menyeleksi siswa berprestasi dari cabang

mata pelajaran, olahraga dan seni yang nantinya akan mewakili Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengikuti kegiatan serupa di tingkat yang lebih tinggi.

2. Indeks Pembangunan Literasi

Indek Pembangunan Literasi adalah sebuah instrumen pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Berikut data Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Tenaga Pendidik dan Siswa yang Berprestasi Minimal Tingkat Propinsi seperti pada tabel 3.91 berikut:

Tabel 3.91
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Tanpa Satuan	6,60	7,17	108.00

*Formulasi capaian indikator kinerja
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat*

Survey kajian IPLM

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

Data perkembangan indikator indeks pembangunan literasi di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.92
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Jenis Pengunjung, 2022

Jenis Pengunjung/ Type Visitor		Jumlah/ Total	
(1)		(2)	
1	Umum	19,016	
2	SD	9,651	
3	SMP	7,717	
4	SMA	17,418	
5	Mahasiswa	5,952	
6	PNS/Guru	5,376	
Jumah/Total		65,130	
		2021	61,754
		2020	15,258

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan

Tabel. 3.93
Jumlah Perpustakaan Menurut Jenis Perpustakaan dan Kecamatan
di Kabupaten Pesisir Selatan, 2022

Kecamatan/ Sub-District		Jenis Perpustakaan /Kind or Library						
		Perpustakaan Umum Daerah/ Regional Public Library	Perpustakaan Sekolah / School Library	Taman Bacaan Masyarakat	Perpustakaan Masjid	Perpustakaan Nagari	Jumlah Total	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Silaut		11	2	21	10	44	
2	Lunang		20	2	21	10	53	
3	Basa Ampek Balai Tapan		13	1	20	10	44	
4	Ranah Ampek Hulu Tapan		12	1	12	10	35	
5	Pancung Soal		17	-	24	10	51	
6	Airpura		16	-	16	10	42	
7	Linggo Sari Baganti		33	1	56	16	106	
8	Ranah Pesisir		30	2	46	10	88	
9	Lengayang		53	1	76	9	139	
10	Sutera		40	3	43	12	98	
11	Batang Kapas		34	3	34	9	80	
12	IV Jurai	1	46	4	46	20	116	
13	Bayang		42	2	41	17	102	
14	IV Nagari Bayang Utara		10	1	15	6	32	
15	Koto XI Tarusan		43	2	38	23	106	
	Jumlah /Total	2022	1	420	25	509	182	1,137
		2021	1	420		509	182	1,136
		2020	1	404	24	509	182	1,120

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan

Tabel 3.94
Jumlah judul Buku Perpustakaan Umum Daerah
Kab. Pesisir Selatan Menurut Jenis Buku Tahun 2022

Jenis Buku/Type of Books		Jumlah Judul Buku / Number of Title	Jumlah Eksemplar / Number of Copies
(1)		(2)	(3)
1	Karya Umum	2,158	4,407
2	Filsafat	168	672
3	Agama	487	1,403
4	Kesenian, Olahraga	209	419
5	Sastra	278	563

6	Sejarah	217	843
7	Ilmu Terapan	1,779	3,662
8	Teknik Kesehatan	734	1,491
9	Ilmu Ssial	865	1,791
10	Bahasa	902	1,806
11	Koleksi Referensi	107	419
12	Koleksi SMA	185	743
13	Koleksi SMP	135	427
14	Koleksi SD	135	270
15	Fiksi	1,006	2,229
Jumah/Total		2022	9,365
		2021	9,161
		2020	8,537

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan

Tabel 3.95
Hasil Perhitungan Indeks Pembangunan
Literasi Masyarakat

No	Kategori	Interval indeks
1	Kurang	$\leq 10,92$
2	Cukup	10,93 – 12,99
3	Baik	13,00 – 14,72
4	Sangat Baik	$\geq 14,73$

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan



Gambar 3.20. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan

Perbandingan realisasi indikator kinerja untuk 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.96
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2020-2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	tanpa satuan	3,45	5,93	6,60	3,45	5,93	7,17

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat setiap tahunnya meningkat walaupun secara perhitungan interval indeks masih dalam kategori kurang.

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar provinsi dan Nasional yaitu, Provinsi dengan indeks 9,00 (kategori sedang) sementara untuk Nasional dengan indeks 13,00 (kategori sangat baik).

Beberapa Faktor Keberhasilan/Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sebagai berikut :

1. Mengembangkan diversifikasi layanan perpustakaan berbasis Teknik Informasi dan Komunikasi (TIK);
2. Mengembangkan Perpustakaan yang menjangkau masyarakat luas;
3. Mengujudkan tenaga perpustakaan yang kompeten dan profesional;
4. Menggalakan sosialisasi / promosi / pemasyarakatan gemar membaca;
5. Mengembangkan infrastruktur perpustakaan yang modern;

Sedangkan Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis (hambatan) yang terdapat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Belum lengkap regulasi daerah mengenai Perpustakaan dan Kearsipan .
2. Terbatasnya SDM pengelola kearsipan dan perpustakaan (belum mempunyai arsiparis dan pustakawan baik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan maupun OPD dan unit kerja lainnya)
3. Kemajuan Informasi Teknologi belum dimanfaatkan secara proporsional untuk hal-hal yang berguna/produktif.
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta pendanaan pendukung pelayanan
5. Luasnya wilayah jangkauan untuk pelayanan baik pelayanan perpustakaan keliling.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan merujuk pada keterbatasan SDM yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan perlu dilakukan peningkatan SDM dengan melakukan/mengikuti pelatihan maupun diklat baik yang dilaksanakan oleh Provinsi maupun Pusat yang tentunya perlu adanya dukungan anggaran dalam pelaksanaannya.

Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat inididukung oleh program Pembinaan Perpustakaan dengan target anggaran Rp. 827.789.550 Dan realisasi sebesar Rp 820.509.670 Atau capaian 99,12 %sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 7.279.889 Atau 1 %.

Sasaran 17 : Meningkatnya Pengalaman Nilai nilai Agama dalam Kehidupan Masyarakat

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 17 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.97 berikut ini:

Tabel 3.97
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 17

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	persen	96.50	75,5	78.24 %
2	Tingkat partisipasi subuh berjamaah dimesjid/mushola	tanpa satuan	Rendah (≤10 orang)	Tinggi (≥35 orang)	350 %
Rata-rata Capaian					214,12

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 17 sebesar 214,12%. Pencapaian sasaran strategis 17 termasuk predikat **Sangat Baik**.

1. Pemenuhan Kewajiban Membayar Zakat Harta

Indikator kinerja persentase pemenuhan kewajiban membayar zakat harta yang dikelola oleh BAZ, ditargetkan 96,50% dan terealisasi sebesar 75,5% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 78,24%. Berdasarkan klasifikasi penilaian indikator kinerja ini termasuk **berhasil** dengan kategori penilaian **baik**.

Perhitungan dari potensi zakat pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp10.700.000.000,-(sepuluh milyar tujuh ratus juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp8.076.989.471,-(Delapan milyar tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan empat ratus tujuh puluh satu rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian zakat yang dikelola BAZ perlu terus ditingkatkan dimasa mendatang. Beberapa Potensi zakat yang dikelola oleh BAZ berasal dari PNS, karyawan swasta dan perorangan.

Tabel 3.98
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Potensi Zakat yang dikelola BAZ Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	Persen	96,50	75.5	78.24 %

Formulasi capaian indikator kinerja Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta

<i>Jumlah zakat harta</i>

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

Capaian Persentase Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta Tahun 2022 :	$\frac{75,5}{96,50}$	X	100%	=	78,24%
--	----------------------	---	------	---	--------

Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja persentase potensi zakat yang dikelola oleh BAZ Tahun 2022 yaitu :

1. Melakukan sosialisasi yang intens sehingga tumbuh kesadaran muzaki untuk berzakat.
2. Penataan administrasi yang transparan dan akuntabel
3. Penyaluran tepat sasaran sehingga manfaatnya betul betul bisa dirasakan oleh masyarakat
4. Membuka akses bagi masyarakat yang ingin tahu seputar pengelolaan zakat
5. Terjalannya kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam mengupayakan pencapaian target kinerja juga ditemukan berbagai permasalahan dan kendala diantaranya :

1. Masih ada muzaki yang membagikan zakatnya secara langsung tidak melalui BAZNAS
2. Masih ada sebagian muzaki yang enggan untuk berzakat
3. Pengetahuan dan kesadaran untuk berzakat masih kurang
4. Zakat guru sertifikasi dilingkup Dinas Pendidikan tidak lagi diambil (setor)
5. Masih ada lembaga vertikal dan lain-lainnya yang keberatan memberikan data potensi zakat.

Untuk melihat lebih jelas realisasi penerimaan BAZ Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2020 sampai dengan 2022 adalah sebagaimana tercantum pada tabel 3.99 berikut ini :

Tabel 3.99
Realisasi Penerimaan BAZ Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020–2022

No.	Tahun	Realisasi
1	2020	Rp. 12.437.494.662, –
2	2021	Rp. 8.860.881.363, –
3	2022	Rp. 8.076.989.471, –

Sumber data : BAZ Kabupaten Pesisir Selatan

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pencapaian realisasi penerimaan zakat di Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2020 ke tahun 2022 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena potensi zakat baru pada lingkup ASN. Selain itu penurunan ini juga disebabkan oleh tidak semua yang menjadi target potensi zakat dapat terpenuhi.

Pada dasarnya kesadaran masyarakat Pesisir Selatan dalam membayar zakat cukup tinggi dan potensi zakat yang menjadi target cukup besar. Namun karena disebabkan oleh beberapa faktor maka optimalisasi BAZ dalam menggali potensi zakat sedikit mengalami perlambatan. Perolehan zakat yang diterima oleh BAZ Kabupaten Pesisir Selatan telah dikelola untuk kegiatan- kegiatan yang bersifat sosial ekonomi kemasyarakatan yang direalisasikan dalam bentuk program-program kerja. Berikut realisasi program kerja yang sudah dilaksanakan oleh BAZ pada tahun 2022 sebagaimana tercantum pada tabel 3.100 berikut ini:

Tabel 3.100
Program Kerja BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan sesuai
Tahun 2022

No.	Program	Jumlah Penerima
1.	Pessel Peduli	164
	Bedah Rumah / Rehab Rumah	99
	Bantuan Biaya Hidup / Santunan Fakir	40
	Bantuan Kemanusiaan	6
	Bantuan Bencana	19
2.	Pessel Cerdas (Pendidikan)	4.676
3.	Pessel Sehat (Biaya Berobat)	875
4.	Pessel Makmur (Modal Usaha)	31
5.	Pessel Relegius	26
	Total Jumlah	6.025

Sumber data : BAZ Kabupaten Pesisir Selatan

Dari tabel di atas dapat dilihat program kerja BAZ Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada program BAZNAS, dimana program-program tersebut disalurkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan.

2. Tingkat Partisipasi Subuh Berjamaah di Masjid/Mushola

Indikator kinerja Tingkat Partisipasi Subuh Berjamaah di Masjid/Mushola, ditargetkan Rendah (≤ 10 orang) dan Terealisasi Tinggi (≥ 35 orang) dengan tingkat capaian kinerja sebesar 350%. Berdasarkan klasifikasi penilaian indikator kinerja ini termasuk **Sangat berhasil** dengan kategori penilaian **Sangat baik**.

Tabel 3.101
Realisasi dan Capaian Indikator Tingkat Partisipasi Subuh Berjamaah di Masjid/Mushola Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat Partisipasi Subuh Berjamaah di Masjid/Mushola	tanpa satuan	Rendah (≤ 10 orang)	Tinggi (≥ 35 orang)	350

Formulasi capaian indikator kinerja Tingkat Partisipasi Subuh berjamaah di Masjid/Mushola

Jumlah orang yang mengikuti shalat subuh berjamaah di masjid/mushola

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

Capaian Tingkat Partisipasi Subuh berjamaah di Masjid/Mushola Tahun 2022 :	Tinggi (> 35 orang)	X	100%	=	350%
	Rendah (≤ 10 orang)				

Tabel 3.102
Jumlah Masjid berdasarkan Tipologi di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Tipologi Masjid	Jumlah
1.	Masjid Besar	14
2.	Masjid Jami	188
3.	Masjid di Tempat Publik	345
Jumlah		547

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat

Tabel 3.103
Jumlah Mushalla berdasarkan Tipologi di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Tipologi Masjid	Jumlah
1.	Mushalla Perkantoran	15
2.	Mushalla Pendidikan	44
3.	Mushalla Perumahan	206
4.	Mushalla di Tempat Publik	660
Jumlah		925

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat

Adapun strategi untuk mewujudkan sasaran Meningkatkan Pengalaman Nilai-nilai Agama dalam Kehidupan Masyarakat yaitu dengan cara penguatan peran ulama, niniak mamak, bundo kanduang, cendikiawan dan generasi muda dalam pengembangan dan penerapan nilai-nilai ABS-SBK. Strategi ini didukung oleh beberapa arah kebijakan antara lain Peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh agama, pemangku adat dalam melakukan bimbingan kepada masyarakat, Peningkatan Pelaksanaan Event event keagamaan dan Peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga agama, lembaga sosial keagamaan dan lembaga adat dalam melakukan bimbingan kepada masyarakat.

Di Kabupaten Pesisir Selatan masjid yang aktif dalam mengelola kegiatan keagamaan termasuk subuh berjamaah sebanyak 547 masjid.

Sasaran 18 : Meningkatkan SDM kreatif dan berdaya saing

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 18 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.104 berikut ini:

Tabel 3.104
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 18

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional	Orang	10	17	170
2	Jumlah wirausahawan yang berdaya saing	Orang	500	656	131,20
<i>Rata-rata Capaian</i>					150,60

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 18 sebesar 150,60%. Pencapaian sasaran strategis 18 termasuk predikat **sangat baik**.

1. Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional

Indikator kinerja Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional, ditargetkan 10 orang dan terealisasi 17 orang dengan tingkat capaian kinerja sebesar 170%. Berdasarkan klasifikasi penilaian indikator kinerja ini termasuk **Sangat berhasil** dengan kategori penilaian **Sangat baik**.

Tabel 3.105
Realisasi dan Capaian Indikator jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
1.	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional	orang	10	17	170
Rata-rata Capaian					170

*Formulasi capaian indikator kinerja
Jumlah pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan nasional*

Jumlah pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan nasional

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-undangan Nomor 40 Tahun 2009, Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun sedangkan Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.

Indikator Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional ditetapkan untuk memantau perkembangan prestasi pemuda-pemudi di Kabupaten Pesisir Selatan, hal ini sangat penting karena berkaitan dengan peningkatan daya saing SDM khususnya generasi muda dengan Formulasi : Jumlah pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan nasional.

Pada tahun 2022 capaian realisasi indikator kinerja jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional yang semula di targetkan sebanyak 10 Orang dan terealisasi sebanyak 17 Orang atau dengan capaian 170%.

Berikut data perkembangan pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional pada tahun 2022 seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.106
Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional
Tahun 2022

No	Nama Pemuda	Prestasi
1	Rhaza Reva	Uda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022
2	Ikhsandy Satrio Wibowo	Paskibraka Provinsi Tahun 2022
3	Dinda Defahmi	Paskibraka Provinsi Tahun 2022
4	Mutia Febri Yeza	Puteri Heritage Indonesia 2022 (5 Juni 2022)
5	Rahmadani Putera	Cabang Olahraga Atletik di Pesonas tingkat Nasional di Semarang Tahun 2022
6	Muhammad Alfin	Cabang Olahraga Atletik tingkat Provinsi dan Nasional di Semarang Tahun 2022 (Provinsi 2 Emas dan 1 Perunggu, Nasional 1 Perunggu)
7	Arif Rahmat Yusuf	Kejuaraan Hapkido Tingkat Nasional (1 Emas)
8	Khairunisa Putri Hamdi	Kejuaraan Hapkido Tingkat Nasional (2 Perak)
9	Fino Nofrizal	Kejuaraan Hapkido Tingkat Nasional (1 Perunggu)
10	Rolef Leogustri	Kejuaraan Hapkido Tingkat Nasional (1 Perunggu)
11	Dariasman	Kejuaraan Catur Tingkat Provinsi (1 Emas)
12	Nofricayanti	Kejuaraan Paralayang Tingkat Provinsi (2 Perak)
13	Yoanda Putra	Kejuaraan Paralayang Tingkat Provinsi (1 Perak)
14	Ade Oktavia	Kejuaraan Paralayang Tingkat Provinsi (1 Emas)
15	Govinda	Kejuaraan Paralayang Tingkat Provinsi (1 Perak)
16	Gustia Permata Sari	Kejuaraan Paralayang Tingkat Provinsi (1 Perak)
17	Syafrijon Hendri	Kejuaraan Paralayang Tingkat Provinsi (1 Perunggu)

Sumber data : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Tabel 3.107
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
3 Tahun terakhir (2020 s.d 2022)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional	orang	-	10	17	-	100%	170%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun ini melebihi target yang telah ditetapkan dan termasuk predikat **Sangat Baik**.

Faktor Keberhasilan Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional yaitu dengan melakukan kegiatan kepemudaan dan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan maupun keolahragaan, diantaranya:

- Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
 - 1) Bantuan Pembinaan Organisasi KNPI, yang digunakan untuk Konsolidasi DPD KNPI Kabupaten Pesisir Selatan dengan OKP se-Pesisir Selatan, Pembinaan Pemuda Nagari tentang UU Kepemudaan (peserta seluruh Pemuda Nagari se-Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan di 6 kecamatan), Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi Kepemudaan di Pesisir Selatan (Peserta : OSIS SMAN 1 Painan, OSIS SMAN 2 PAINAN, BEM STAI Bayang, BEM UNP, BEM STAI Nurul Ikhlas Painan dan BEM STKIP, serta beberapa OKP), Konsolidasi DPD KNPI Pesisir Selatan dengan Pengurus Kecamatan (Peserta : Pengurus DPD KNPI Pesisir Selatan dan Pengurus Kecamatan)
 - 2) Bantuan Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Bantuan Organisasi Asosiasi Pelajar Islam Pesisir Selatan)
 - 3) Bantuan Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Bantuan Organisasi Forum Komunikasi Studi Islam Mahasiswa Pesisir Selatan Iv Jurai)
 - 4) Bantuan Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Bantuan Organisasi Pemuda Air Jernih Pd. Mandiangin)
 - 5) Bantuan Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Bantuan Organisasi Pemuda Nagari Taluak, Taluak Tigo Sakato)
 - 6) Bantuan Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Bantuan Organisasi Pemuda Sawah Lintang Pd. Panjang)
 - 7) Bantuan Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Bantuan Organisasi Pemuda Sungai Sarik)
 - 8) Bantuan Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Bantuan Organisasi Pemuda Tanjung Pondok Tapan)
 - 9) Bantuan Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Bantuan Organisasi Pemuda Tapan)
 - 10) Bantuan Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Organisasi Pemuda Koto Tuo)

- 11) Bantuan Organisasi Pemuda Kenagarian Kampung Laban Salido
- 12) Bantuan Organisasi Pemuda Kenagarian Painan

Berikut ini data organisasi kemasyarakatan pemuda pada tahun 2022:

Tabel 3.108
Organisasi Kemasyarakatan Pemuda
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No.	Nama OKP/DPK	Jumlah Personil Aktif (Orang)
1	DPD AMPI	21
2	GEMA KOSGORO	17
3	GM KOSGORO	20
4	FKPPI	26
5	HMI	20
6	IMM	21
7	IPM	18
8	PDPM	27
9	NA	18
10	PP APRI	21
11	GM SRIWIJAYA	24
12	GM TRIKORA	22
13	MAHASISWA PEMBANGUNAN INDONESIA	20
14	MAPANCAS	25
15	PEMUDA ISLAM	22
16	ANGKATAN MUDA TAREKAT INDONESIA	18
17	GERAKAN MUDA AL WASHLIYAH	27
18	HIMPUNAN MAHASISWA AL WASHLIYAH	21
19	IKATAN SARJANA AL WASHLIYAH	18
20	IKATAN PELAJAR AL WASHLIYAH	23
21	ANGKATAN PUTRI AL WASHLIYAH	20
22	GERAKAN PEMUDA KA'BAH	29
23	PEMUDA KA'BAH	25
24	BM PAN	20
25	GARDA KEADILAN	24
26	GPII	25
27	PEMUDA TARBIYAH	21
28	GP ANSOR	24
29	PMII	20
30	BKPMRI	25
31	BMK 57	24
32	GEMA LANTANG	21
33	DPK PEMUDA/KNPI KEC. KOTO XI TARUSAN	38
34	DPK PEMUDA/KNPI KEC. BAYANG	32
35	DPK PEMUDA/KNPI KEC. IV NAGARI BAYANG UTARA	26
36	DPK PEMUDA/KNPI KEC. IV JURAI	30
37	DPK PEMUDA/KNPI KEC. BATANG KAPAS	38
38	DPK PEMUDA/KNPI KEC. SUTERA	33
39	DPK PEMUDA/KNPI KEC. LENGAYANG	50
40	DPK PEMUDA/KNPI KEC. RANAH PESISIR	27
41	DPK PEMUDA/KNPI KEC. LINGGO SARI BAGANTI	25
42	DPK PEMUDA/KNPI KEC. AIRPURA	28
43	DPK PEMUDA/KNPI KEC. PANCUNG SOAL	23
44	DPK PEMUDA/KNPI KEC. BASA AMPEK BALAI TAPAN	38
45	DPK PEMUDA/KNPI KEC. BASA AMPEK HULU	28

	TAPAN	
46	DPK PEMUDA/KNPI KEC. LUNANG	20
47	DPK PEMUDA/KNPI KEC. SILAUT	41
JUMLAH		1.184

Sumber : Knpi Pesisir Selatan

Tabel 3.109
Data Pengelola Organisasi Kepemudaan yang mendapatkan Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan

No	Nama	Pelatihan yang diikuti
1	Desry Syahputra	Latihan Manajemen Organisasi Pemuda (LMOP)
2	Muhammad Firdaus	Latihan Manajemen Organisasi Pemuda (LMOP)
3	Eriyen Gustina Ulfa	Latihan Manajemen Organisasi Pemuda (LMOP)
4	Ahmad Fauzi	Latihan Manajemen Organisasi Pemuda (LMOP)

Sumber data : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

- Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
- Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
- Pengembangan Organisasi Keolahragaan (bantuan pembinaan organisasi KONI, Bantuan Alat Olahraga Bola Volly dan Net Volly (Sutera), Bantuan Bola Volly dan Bola Kaki Untuk Kelompok Olahraga di Kecamatan Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti, Bantuan Kelompok Senam Lakitan Tengah, Pelatihan Wasit Sepak Takraw dan Pelatihan Sepak Takraw (Organisasi Takraw, Bantuan Pelatihan Klub Sepak Bola Tapan, Hibah Uang kepada Club Gulat Perkasa Bayang, dan bantuan peralatan dan perlengkapan olahraga kepada club-club olahraga).

Tabel 3.110
Daftar Cabang Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan

No	CABANG OLAHRAGA	PENGURUS CABOR		
		KETUA	KETUA HARIAN	SEKRETARIS
1	AERO SPORT (FASI)	IKHWAN WILDANI		
2	ANGKAT BESI (PABBSI)	On Proses		
3	ANGKAT BERAT (PABERSI)	PATRIA WIWIK		
4	BINARAGA	On Proses		
5	ATLETIK (PASI)	MASRISAF		
6	BALAP MOTOR (IMI)	SUPRIYADI OMPRI		
7	BOLA BASKET (PERBASI)	M. ADLI		
8	BOLA VOLLEY (PBVSI)	KAPOLRES		WARDI KAMAL
9	BRIDGE (GABSI)	RUDI ANWAR		
10	BULUTANGKIS (PBSI)	DAILIPAL		
11	CATUR (PERCASI)	HERIZAL HARPEN, S.Kom		
12	DAYUNG (PODSI)	RAFLENOVA YULANDA		
13	BERKUDA (PORDASI)	HAKIMIN		
14	GULAT (PGSI)	GESTRO JONI, S.Pd		
15	JUDO (PJSI)	KAPOLRES		HARI KURNIAWAN
16	KARATE (FORKI)	DANDIM 0311		DARYULISMAN
17	KEMPO (PERKEMI)			

18	MENEMBAK (PERBAKIN)	KAPOLRES		
19	PANAHAH (PERPANI)	RIMA MELATI, S.Pd		
20	PANJAT TEBING (FPTI)	RINO YURISMANTO, ST		
21	PARALYMPIC (BPOC/NPC)	-		
22	PENCAK SILAT (IPSI)	HENGKI MUSTAF	AL ZUKRI	
23	PENTAQUE (FOPI)	FIRMAN		
24	RENANG (PRSI)	FORZIL		
25	SENAM (PERSANI)	SULIADI, S.Pd		
26	SEPAK BOLA (PSSI)	ERA SUKMA MUNAF		DONA SATRIA PUTRA
27	SEPAK TAKRAW (PSTI)	Ir. AFRIZON NAZAR, MM		
28	SEPEDA (ISSI)	SUBCANDRI, SE. M.Si		
29	SELAM	ROGENDRA MIDONA, S.Pd		
30	TAEKWONDO (TI)	YULMEDYA		JENDRI EFENDI
31	TARUNG DRAJAT (KODRAT)	CIPTO		
32	TENIS LAPANGAN (PELTI)	REVA MANSARIN		
33	TENIS MEJA (PTMSI)	PIWAL		
34	TINJU (PERTINA)	On Proses		
35	WUSHU (WI)	HERI MURIANTO, SH		
36	FUTSAL	On Proses		
37	SEPATU RODA (PERSEROSI)	On Proses		
38	BILYAR (POBSI)	On Proses Perpanjangan		
39	MUAYTHAI	ILMAN		
40	SOFT TENIS	On Proses		
41	BOLA TANGAN (ABTI)	NOVRIAL BAHRUN		REGA DESFINAL, ST
42	CRICKET (PCI)	RAFLENOVA YULANDA, SE		
43	ARUNG JERAM (FAJI)	RINO YURISMANTO, ST		
44	HAPKIDO	ROLEF		
45	KICKBOXING (KBI)	MUHASNAN		
46	E-SPORT (ESI)	KRISTIAN RINALDO		ROBI PADANG TV





Sumber data : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Indikator ini di dukung oleh program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, Pengembangan Kapasitas Kepramukaan. Dengan target anggaran Rp. 9.210.094.110 ,-. Dan realisasi sebesar Rp 8.966.001.870,- Atau capaian 97,35 %

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 244.092.240,- Atau 2,65%.

Beberapa prestasi dan keberhasilan yang di peroleh dalam menunjang pencapaian indikator jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.111
Dokumentasi Prestasi yang diperoleh pada
Tahun 2022

No	Nama Penghargaan	Tahun	Lembaga yang Memberikan	Keterangan
1	KTM Beregu Nasional Super League	2022	PEMDA Parigi Mutong Sulawesi Tengah	
2	KTM Beregu Internasional Super League	2022	PEMDA Parigi Mutong Sulawesi Tengah	
3	KTM Beregu Kejurnas dan AFA di Bali	2022	PB FASI Pusat	
4	KTM Kejurda Puncak Lawang	2022	PEMDA Agama	

Sumber data : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

3. Jumlah wirausahawan yang berdaya saing

Wirausahawan adalah orang yang mengelola dan berani memikul resiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang berusaha atau dengan kata lain mereka yang mengelola, mengembangkan dan melembagakan perusahaan miliknya sendiri. Adapun unsur-unsur wirausaha antara lain; 1). Peluang, 2). Kemampuan menangkap peluang.

Sedangkan yang dimaksud dengan berdaya saing adalah kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi standar nasional maupun internasional. Beberapa indikator daya saing dapat diukur dengan; 1). Sejauh mana suatu usaha dapat memenuhi permintaan pasar, 2). Mempertahankan pendapatan, 3). Meningkatkan kemampuan kompetitif.

Pada tahun 2022, target indikator Jumlah wirausahawan yang berdaya saing adalah 500 orang dan terrealisasi 656 orang dengan capaian kinerja sebesar 131,2%. Berikut tabel 3.112 target dan realisasi indikator kinerja Jumlah wirausahawan yang berdaya saing tahun 2022:

Tabel 3.112
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Jumlah wirausahawan yang berdaya saing Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah wirausahawan yang berdaya saing	Orang	500	656	131,20

$$\text{Capaian Jumlah wirausahawan yang berdaya saing tahun 2022 : } \frac{656}{500} \times 100\% = 131,20\%$$

Tabel 3.113
Perusahaan Industri Kecil Menengah
Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan cabang industri
Tahun 2022

No	Cabang Industri	Jumlah
1.	Industri Tekstil	34
2.	Industri Makanan	176
3.	Industri Furnitur	127
4.	Industri alat angkutan lainnya	7
5.	Industri barang galian buka logam	40
6.	Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia	5
7.	Industri percetakan dan reproduksi media rekaman	14
8.	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	21
9.	Industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer	10
10.	Industri pengolahan lainnya	6
11.	Industri pakaian jadi	39
12.	Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki	2
13.	Industri minuman	38
14.	Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya	24
15.	Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional	1
16.	Industri karet, barang dari karet dan plastik	1
17.	Cabang industri	2
Jumlah		547

Sumber data : Perdagangan dan Transmigrasi

Tabel 3.114
Data Hotel/ Penginapan/ Villa/Home Stay
Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

NO	NAMA OBJEK PENDATAAN	NAMA PEMILIK	TAHUN BERDIRI	IZIN USAHA	KECAMATAN
1	SAGA MURNI	H.FIRDAUS	2016	ADA	IV JURAI
2	PENGINAPAN AL-BARQAH	HJ.ROSNANI	2017	ADA	IV JURAI
3	LANGKISAU RESORT	ADITYAWARMAN	2014	ADA	IV JURAI
4	ANORDIO	DEWANTO	2006	ADA	IV JURAI
5	TRIZA HOTEL	FERRA YANTI	2014	ADA	IV JURAI
6	PENGINAPAN AA	EDI MELAYU	2016	ADA	IV JURAI
7	HOME STAY DENA	DENA SRI HANDAYANI	2013	ADA	IV JURAI
8	HOME STAY DORIA	MARIA	2014	ADA	IV JURAI
9	HOME STAY DELIMA	DILA	2013	ADA	IV JURAI
10	HOME STAY CIKHA	NURTINAS	2016	ADA	IV JURAI
11	HOME STAY RAPINBI	ROSNANI	2016	ADA	IV JURAI
12	HANNAH HOTEL	H.MELDIAN	2016	ADA	IV JURAI
13	GUEST HOUSE ANGGREK	NANIK IDA ISIANI	2015	ADA	IV JURAI
14	GUEST HOUSE PULAU CINGKUAK	RAHMI KARIDA	2016	ADA	IV JURAI
15	HOME STAY WISMA PURI	H.SAIDAL MASFIYUDDIN	2010	ADA	IV JURAI
16	HOME STAY RUMAH PUTI	YOGI DIRGANTARA	2014	ADA	IV JURAI
17	HOME STAY NANDA	NANDA	2015	ADA	IV JURAI
18	PENGINAPAN SIVIIA	YUSHARNI	2016	ADA	IV JURAI
19	PENGINAPAN WATI	YUNIDARWATI	2015	ADA	IV JURAI
20	PENGINAPAN SEDERHANA	JUSMAINI	2016	ADA	IV JURAI
21	PENGINAPAN MAWAR	MAWAR	2015	ADA	IV JURAI
22	HOTEL AIDA	H.MUNAF MALIN KAYO	1972	ADA	IV JURAI
23	EDOTEL	PEMDA	2006		IV JURAI
24	GISZELLA HOTEL	ROZEKMAL/NELIATI	2016	ADA	BAYANG
25	PENGINAPAN BUNGA TANJUNG	HENDRI HARIADI	1990	ADA	LINGGO SB
26	PENGINAPAN ACEH MINANG	OSIN	2015	ADA	PC. SOAL
27	PENGINAPAN BUNDA	HEL	1996	ADA	PC. SOAL
28	PENGINAPAN RRR	SUMIATI	2015	ADA	B.A.B TAPAN
29	PENGINAPAN AZIZAH	UNANG	2013	ADA	B.A.B TAPAN
30	HOTEL FELIA	MARNI	2017	ADA	B.A.B TAPAN
31	HOTEL BUNGA FACHRI	MARLINDA WATI	2015	ADA	B.A.B TAPAN
32	PENGINAPAN BAGUS	BURHANUDDIN	2016	ADA	B.A.B TAPAN
33	PENGINAPAN KASIAN OMBAK	ETI	2016	ADA	LUNANG
34	PENGINAPAN REGIL	ABU SANTO	2017	ADA	LUNANG
35	PENGINAPAN NURUL HIDAYAH	MAIHENDRA	2003	ADA	LUNANG
36	PENGINAPAN DINDA	IRFAN	2018	ADA	LUNANG
37	PENGINAPAN RINI	RINI	2017	ADA	LUNANG
38	PENGINAPAN LISA	KAR	2002	ADA	SILAUT

Sumber data : Perdagangan dan Transmigrasi

Adapun wirausaha UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2022 adalah sebanyak 583 Wirausaha UMKM.

Pencapaian indikator ini di dukung oleh program Pemberdayaan UMKM dengan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dengan anggaran Rp. 707.550.100 dengan realisasi anggaran Rp. 686.073.720 dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 21.476.380.

Sasaran 19 : Terwujudnya Keluarga Bahagia

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 19 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.15 berikut ini:

Tabel 3.115
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 19

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	Persen	0.0008	0.0058	72,50
2.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	91.0944	91.7179	100.68
Rata-rata Capaian					86,59

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 19 sebesar 86,59%. Pencapaian sasaran strategis 19 termasuk predikat **Sangat Baik**.

1. Proporsi Temuan Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan terhadap jumlah keluarga

Proporsi temuan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terhadap jumlah keluarga merupakan perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi selama satu tahun dibagi jumlah kepala keluarga. Kasus yang difasilitasi adalah kasus yang dilaporkan oleh masyarakat melalui lembaga P2TP2A dan juga kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian dengan adanya laporan ke Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada tahun 2022, target indikator Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga adalah 0,0008% dan terealisasi 0,0058% dengan capaian kinerja sebesar 72,50%. Berikut tabel 3.116 target dan realisasi indikator kinerja Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga tahun 2022:

Tabel 3.116
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	Persen	0.0008%	0.0058%	72,50

Formulasi capaian indikator kinerja Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga

$$\frac{(\text{Jumlah kasus kekerasan pada anak dan perempuan})/(\text{Jumlah keseluruhan keluarga}) \times 100\%}{}$$

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

$$\text{Capaian Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga tahun 2022 : } \frac{0,0058}{0,0008} \times 100\% = 72,50\%$$

Tabel 3.117
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 3 Tahun terakhir (2020 s.d 2022)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.	Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	Persen	0.0069%	0.0073%	0.0058%	100%	62%	72,50%

Indikator kinerja Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga tahun 2022, ditargetkan 0,0008 % dan terealisasi 0,0058 % dengan tingkat capaian kinerja sebesar 72,50%. Berdasarkan klasifikasi penilaian indikator kinerja ini termasuk klasifikasi penilaian **baik**.

Adapun faktor keberhasilan dan peningkatan Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak adalah kerjasama yang baik dengan berbagai pihak meliputi pemerintahan nagari, sekolah ramah anak, tokoh masyarakat dan lembaga organisasi masyarakat. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan dengan sosialisasi pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan layanan fasilitasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sedangkan Faktor kegagalan dan penurunan Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga adalah masih

adanya keterbatasan dalam pengungkapan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak karena kasus dalam rumah tangga masih dianggap sebagai aib keluarga sehingga ada keengganan masyarakat dalam melaporkan kasus kepada lembaga yang berwenang dan pihak yang berwajib.

Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan Satgas PPPA yang ada di Kecamatan dan mengaktifkan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di Pemerintahan Nagari sehingga cakupan jangkauan dan penyelesaian kasus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Adapun Indikator Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga ini ditunjang oleh program:

1. Program Perlindungan Perempuan dengan target anggaran Rp. 67.300.976,- dan realisasi sebesar Rp. 32.489.150,- atau capaian 48,27 %
2. Program Pemenuhan Hak Anak dengan target anggaran Rp. 44.364.360,- dan realisasi sebesar Rp. 43.535.050,- atau capaian 98,13
3. Program Perlindungan Khusus Anak dengan target anggaran Rp. 193.674.134,- dan realisasi sebesar Rp.162.119.740,- atau capaian 83,71 %

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.67.195.530,- atau 22%.

Beberapa prestasi dan keberhasilan yang di peroleh dalam menunjang pencapaian indikator Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluargadapat di lihat pada gambar berikut:

Dokumentasi Penghargaan



Gambar 3.21. Piagam Penghargaan Kabupaten Layak Anak Peringkat Madya Tahun 2022 di Jakarta 23 Juli 2022 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Cakupan Ketersediaan rumah layak huni

Rumah layak huni merupakan kondisi ideal di mana bangunan tersebut memiliki kecukupan minimal dalam unsur ruang dan luas ruangan. Selain itu, juga memperhatikan kualitas material pembangunan seperti dinding, atap untuk keselamatan serta sanitasi dan air bersih yang layak untuk kesehatan bagi siapa pun yang menempatinnya.

Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 11/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kab./Kota, maka Rumah layak huni pengertiannya adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Adapun kriteria dari rumah layak huni tersebut antara lain :

1. Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi
 - a. Struktur bawah/pondasi;
 - b. Struktur tengah/kolom dan balok
 - c. Struktur atas
2. Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi
3. Memenuhi kecukupan luas minimum, 7,2 M²/orang sampai dengan 12 M²/orang

Berikut tabel 3.118 target dan realisasi indikator kinerja cakupan ketersediaan rumah layak huni tahun 2022:

Tabel 3.118
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	91.0944	91.7179	100.68

Formulasi capaian indikator kinerja Cakupan ketersediaan rumah layak huni

$$\frac{(\text{Jumlah rumah layak huni})/(\text{Jumlah keseluruhan rumah}) \times 100\%}{}$$

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

$$\text{Capaian Cakupan ketersediaan rumah layak huni tahun 2022 : } \frac{91.7179}{91.0944} \times 100\% = 100,68\%$$

Indikator kinerja Cakupan ketersediaan rumah layak huni tahun 2022, ditargetkan 91.0944% dan terealisasi 91.7179% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100.68%. Berdasarkan klasifikasi penilaian indikator kinerja ini termasuk **Sangat berhasil** dengan kategori penilaian **Sangat baik**.

Berikut perkembangan data realisasi dan capaian indikator kinerja Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni tahun 2020 s.d. 2022

Tabel 3.119
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 s.d. 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
		2020	2021	2022
1 Cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen	99.828	90.5339	91.7179

Analisis hasil capaian untuk 3 tahun terakhir indikator Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni pada Tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan Capaian pada Tahun 2021 karena ada pendataan ulang Rumah Tidak Layak Huni pada Tahun 2020. Pada Akhir Tahun 2020 memakai data TNP2K Tahun 2016 dimana Jumlah Rumah Layak Huni di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 6.387 Unit yang berarti bahwa pada tahun 2020 berdasarkan hasil capaian kinerja 99.828 % sudah mendekati 100 % (hampir tuntas).

Pada Tahun 2021 kita memakai data baru berdasarkan hasil validasi yang dilaksanakan Satuan Kerja Perumahan provinsi Sumatera Barat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan jumlah RTLH 11.345 Unit.

Capakupan ketersediaan Rumah Layak Huni diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni} = \frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Rumah}} \times 100\%$$

$$= (105.726/115273) \times 100 \%$$
$$= 91.7179 \%$$

NO	LOKASI	JUMLAH RUMAH	JUMLAH RTLH 2021	PENANGANAN 2022	JUMLAH RTLH 2022	JUMLAH RLH 2022	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KOTO XI TARUSAN	14,685	713	27	686	13,999	
2	BAYANG	1,515	212	124	88	1,427	
3	BAYANG UTARA	9,662	710	16	694	8,968	
4	IV JURAI	7,206	815	405	410	6,796	
5	BATANG KAPAS	11,771	445	80	365	11,406	
6	SUTERA	13,433	792	121	671	12,762	
7	LENGAYANG	16,241	1,072	141	931	15,310	
8	RANAH PESISIR	10,307	789	23	766	9,541	
9	LINGGO SARI BAGANTI	7,857	1,043	121	922	6,935	
10	AIR PURA	3,253	809	27	782	2,471	
11	PANCUNG SOAL	5,235	849	50	799	4,436	
12	BASA IV BALAI TAPAN	2,485	666	47	619	1,866	

13	RANAH AMPEK HULU TAPAN	3,182	403	78	325	2,857	
14	LUNANG	5,058	946	22	924	4,134	
15	SILAUT	3,383	567	2	565	2,818	
	JUMLAH	115,273	10,831	1,284	9,547	105,726	

Sumber Data : Hasil Kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup tahun 2022

Apabila dibandingkan dengan kabupaten Kota Lain Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.120
Perbandingan Cakupan Ketersediaan
Rumah Layak Huni dengan kabupaten/kota lain pada
tahun 2020-2022

No	Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja		
		2020	2021	2022
1	Kota Padang	95.75	95.596	96.74
2	Kabupaten 50 Kota	30.38	32.44	33.52

Sumber Data : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan LH tahun 2022

Jika dibandingkan dengan Kota Padang dengan jumlah RTLH 8.400 Unit, Cakupan ketersediaan rumah layak huni Tahun 2020 Kabupaten Pesisir Selatan lebih tinggi kemudian terjadi penurunan tahun 2021 disebabkan validasi ulang data RTLH.

Dibandingkan Kabupaten 50 Kota dengan jumlah RTLH 16.991, Cakupan ketersediaan rumah layak huni Kabupaten Pesisir Selatan jauh lebih tinggi capaiannya dari Tahun 2020, 2021 dan 2022 dengan jumlah RTLH Tahun 2022 adalah 9.547 Unit.

Faktor Keberhasilan Pencapaian Cakupan Ketersediaan rumah layak huni disebabkan karena Adanya Usaha dari Dinas Perkimtan LH untuk mengajukan alokasi anggaran penanganan Rumah Tidak Layak huni di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dengan bantuan jumlah rumah yang diusulkan sebanyak 1.000 Unit dan terealisasi sebanyak 986 Unit. Badan Amil Zakat juga berkolaborasi dalam hal penanganan Rumah Tidak Layak Huni dengan penanganan RTLH Tahun 2022 sebanyak 117 Unit. Sedangkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tahun 2022 penanganan RTLH sebanyak 181 unit.

Beberapa program pendukung pencapaian indikator kinerja cakupan ketersediaan rumah layak huni yaitu; Program Pengembangan Perumahan, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dan Program Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU), dengan target anggaran Rp. 7.882.238.890 dan terealisasi Rp. 7.342.879.231 atau dengan capaian 93.16 % yang berarti bahwa terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 539.359.659.

Berikut dokumentasi Cakupan ketersediaan rumah layak huni tahun 2022 :



Rumah Tidak Layak Huni (Sebelum di rehabilitasi)



Rumah Layak Huni (Setelah di rehabilitasi)

Sasaran 20 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 20 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.121 berikut ini:

Tabel 3.121
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 20

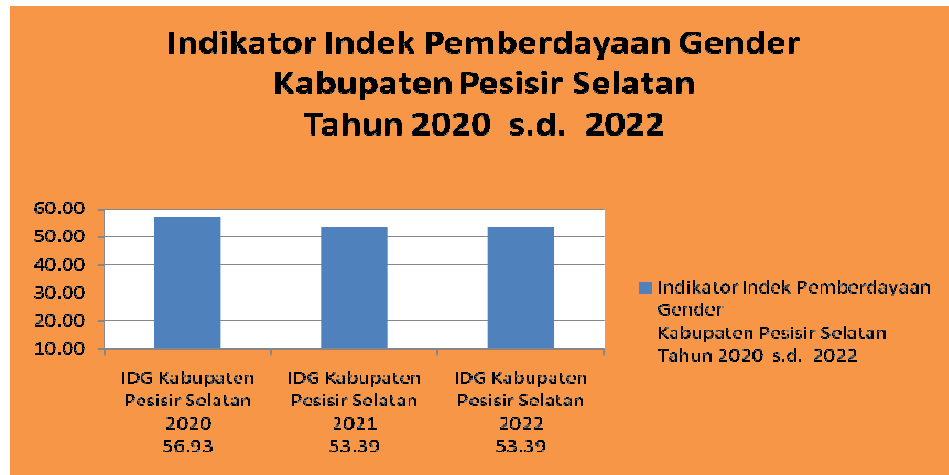
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	tanpa satuan	56.93	53,39	93,78
2.	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	Nagari	Pratama (182) Madya (0) Utama (0)	Pratama (47) Madya (0) Utama (0)	25,82
Rata-rata Capaian					59,80

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis 20 sebesar 59,80%. Pencapaian sasaran strategis 20 termasuk predikat **Cukup**.

1. Indek Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melalui Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan berupaya percepatan peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan yang diukur melalui beberapa indikator, diantaranya, angka harapan hidup, angka melek huruf, angka sumbangan pendapatan perempuan dan laki-laki maupun beberapa pengukuran lainnya.

IDG dititik beratkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang partisipasi politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi. IDG terdiri tiga dimensi yakni keterwakilan di parlemen dengan indikator persentase anggota parlemen laki-laki dan perempuan, pengambilan keputusan dengan indikator persentase pejabat tinggi, manajer, pekerja profesional dan teknisi, distribusi pendapatan dengan indikator persentase upah buruh non pertanian disesuaikan antara laki-laki dan perempuan. Berikut diagram perkembangan Indek Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan selama 3 tahun:



Sumber Data : Dinas PPPA tahun 2022

Gambar 3.22. Perkembangan Indikator Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 s.d. 2022

Berikut target dan realisasi indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 seperti pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.122
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	tanpa satuan	56.93	53.39	93,78%

Formulasi capaian indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender

Rata-rata aritmatik dari dimensi Keterwakilan di parlemen, Pengambilan keputusan dan dimensi Distribusi pendapatan.perempuan)/(Jumlah keseluruhan keluarga) x 100%

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

$$\text{Capaian Indeks Pemberdayaan gender tahun 2022 : } \frac{53,39}{56,93} \times 100\% = 93,78\%$$

Indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2022, ditargetkan 56,93% dan terealisasi 53,39% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 93,78%. Berdasarkan klasifikasi penilaian indikator kinerja ini termasuk **Sangat berhasil** dengan kategori penilaian **Sangat baik**.

Adapun upaya yang sudah dilakukan dalam meningkatkan pemberdayaan gender di Kabupaten Pesisir Selatan, karena IDG ini merupakan nilai komposit yang dihasilkan dari survey BPS, maka kontribusi

Dinas Sosal, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada pada fasilitasi kelembagaan organisasi perempuan.

Indikator ini didukung oleh program:

1. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan target anggaran Rp. 636.221.230,- dan realisasi sebesar Rp. 627.132.466,- atau capaian 98,57 %.
2. Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan target anggaran Rp. 44.582.330,- dan realisasi sebesar Rp. 44.121.330,- atau capaian 99,97 %.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 dalam menunjang Indikator Indeks pemberdayaan gender (IDG) terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.9.549.764,- atau 1,40 %.

2. Jumlah Nagari Tangguh Bencana

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menargetkan jumlah nagari tangguh bencana sebanyak 182 Nagari dan terealisasi sebanyak 47 Nagari atau sekitar 25,82%. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pencapaian target indikator tersebut antara lain yaitu adanya indikator tangguh bencana yang menjadi pedoman dalam menetapkan nagari tersebut dikategorikan sebagai nagari tangguh bencana.

Sesuai dengan PERKA BNPB No 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana, disebutkan Bahwasanya Nagari/Desa Tangguh Bencana mempunyai 20 indikator yaitu :

- a. Adanya kebijakan/peraturan Desa (Nagari)/kelurahan tentang Penanggulangan Bencana (PB) atau Pengurangan Risiko Bencana (PRB)
- b. Adanya Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Aksi Komunitas (RAK) dan Rencana Kontijensi (RENKON)
- c. Terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB)
- d. Terbentuknya Relawan Penanggulangan Bencana (Kelompok Siaga Bencana/KSB)
- e. Adanya Kerjasama antar pelaku dan wilayah
- f. Tersedianya Dana Khusus untuk Tanggap Darurat
- g. Tersedianya Dana untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB)
- h. Diberikannya Pelatihan untuk perangkat Desa/Nagari
- i. Diberikannya Pelatihan untuk Tim Relawan
- j. Diberikannya Pelatihan untuk Masyarakat Desa/Nagari
- k. Dilibatkannya Masyarakat Desa/Nagari Secara Aktif
- l. Dilibatkannya Perempuan dalam tim relawan
- m. Adanya Peta dan Jalur Evakuasi serta tempat untuk mengungsi
- n. Adanya Sistem Peringatan Dini (Early warning system)
- o. Dilaksanakannya Mitigasi Struktural (fisik)
- p. Terbentuknya pola ketahanan ekonomi masyarakat untuk mengurangi kerentanan mereka dalam menghadapi bencana
- q. Adanya perlindungan kesehatan kepada kelompok masyarakat yang rentan

- r. Adanya pelaksanaan dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) untuk mengurangi Risiko Bencana
- s. Adanya perlindungan terhadap Aset Produktif Utama pada masyarakat

Berdasarkan indikator tersebut di atas, hanya ada 3 (tiga) indikator yang baru terpenuhi. Hal ini sangat mempengaruhi capaian target indikator nagari tangguh bencana yang sudah di targetkan. Sehingga pada tahun 2022 hanya baru 47 Nagari yang memenuhi syarat menjadi nagari tangguh bencana.

Berikut target dan realisasi indikator kinerja Jumlah Nagari tangguh Bencana Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.123
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Nagari Tangguh Bencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	Nagari	Pratama (182) Madya (0) Utama (0)	Pratama (47) Madya (0) Utama (0)	25,82

Formulasi capaian indikator kinerja Indek Jumlah Nagari Tangguh Bencana

Jumlah nagari yang sudah memenuhi kriteria tangguh bencana

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

Capaian Jumlah Nagari Tangguh Bencana tahun 2022 :	$\frac{47}{182}$	X	100%	=	25,82%
--	------------------	---	------	---	--------

Berikut perkembangan realisasi indikator kinerja jumlah nagari tangguh bencana selama 3 tahun terakhir.

Tabel 3.124
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 3 Tahun terakhir (2020 s.d 2022)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	Nagari	Pratama (17) Madya (0) Utama(0)	Pratama(27) Madya (0) Utama (0)	Pratama (47) Madya (0) Utama(0)	Pratama (17) Madya (0) Utama (0)	Pratama (27) Madya (0) Utama(0)	Pratama (47) Madya(0) Utama(0)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi jumlah nagari tangguh bencana kurun waktu 3 tahun terakhir (2020 s.d 2022) mengalami peningkatan walaupun secara realisasi masih di kategorikan **Gagal**.

Indikator kinerja Jumlah Nagari Tangguh Bencana tahun 2022, ditargetkan 182 Nagari dan terealisasi 47 nagari dengan tingkat capaian kinerja sebesar 25,82%. Berdasarkan klasifikasi penilaian indikator kinerja ini termasuk **Gagal** dengan kategori penilaian **kurang berhasil**.

Adapun Faktor Peningkatan capaian kinerja indikator Kinerja Jumlah Nagari tangguh Bencana setiap tahunnya diantaranya :

- Pendekatan Langsung Ke Nagari-Nagari Untuk Pembinaan KSB
- Menyediakan Dana Sosialisasi Tentang Nagari Tangguh dari APBD
- Pendekatan Dengan OPD Terkait dan Penyaluran Program Mitigasi Bencana
- Menggendong Swasta Untuk Dapat Berpartisipasi Dalam Mitigasi Bencana di Nagari

Beberapa Program /Kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja jumlah nagari tangguh bencana adalah Program Penanggulangan Bencana Dengan Target Anggaran Rp.4.126.911.404,- dan Realisasi Sebesar Rp. 863.916.085,- Atau Capaian 21% Berdasarkan Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.262.995.319 Atau 21%.

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 20 (dua puluh) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, tercantum pada tabel 3.125 dibawah ini:

Tabel 3.125
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang
Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	816.364.294	726.757.364	89,02
2	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	8.027.885.874	7.775.414.463	96,86
3	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	4.677.075.574	4.526.071.595	96,77
4	Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat	60.445.311.225	52.724.309.512	87,23
5	Meningkatnya Perlindungan Kesehatan Masyarakat	3.494.773.716	2.867.111.625	82,04
6	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	162.437.980	161.788.175	99,60
7	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	7.924.231.350	7.780.670.620	98,19

8	Meningkatnya investasi PMA dan PMDN	415.374.936	312.047.846	75,12
9	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	55.980.356.822	53.686.964.618	95,90
10	Menurunnya Pengangguran	110.042.180	109.338.120	99,36
11	Meningkatnya kualitas infrastruktur	160.645.677.740	155.108.110.717	96,55
12	Terjaminnya Kelestarian Lingkungan	396.646.545	360.948.796	91,00
13	Pesisir Selatan Menjadi Daerah Tujuan Wisata Favorit di Pantai Barat Indonesia	1.062.074.358	952.115.310	89,65
14	Berkembangnya Ekonomi Kreatif	808.535.050	807.525.050	99,93
15	Meningkatnya Akses Layanan Bidang Pendidikan	131.234.914.229	127.993.092.969	97,53
16	Meningkatnya daya saing pendidikan	1.126.341.090	1.119.061.210	99,35
17	Meningkatnya pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	10.700.000.000	8.076.989.471,00	75,49
18	Meningkatnya SDM kreatif dan berdaya saing	9.917.644.210	9.652.075.590	97,32
19	Terwujudnya Keluarga Bahagia	8.187.578.360	7.581.023.171	92,59
20	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	4.807.714.964	1.535.169.881	31,93
JUMLAH		756.245.092.968	704.001.176.363	93,09

Sumber : Laporan Perkembangan Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 untuk menunjang pencapaian 20 (dua puluh) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 sebesar Rp.756.245.092.968,- terealisasi sebesar Rp.704.001.176.363,- atau 93,10%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 20 (dua puluh) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar Rp.52.243.916.605,- atau 6,91%.
- b. Sisa anggaran sebesar Rp.52.243.916.605,- atau 6,91%, mencerminkan kurang akuratnya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Seharusnya sisa anggaran ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan pada Bab III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran

Dari 20 (dua puluh) sasaran yang telah ditetapkan, 9 (sembilan) sasaran mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 100% atau lebih, dan rata-rata nilai capaian indikator kinerja masing-masing sasaran adalah 139,05%, dengan nilai tertinggi adalah 219,11% yaitu sasaran “Meningkatnya investasi PMA dan PMDN”. Untuk nilai terendah dari 20 (dua puluh) sasaran yang telah ditetapkan tersebut adalah 59,80% yaitu sasaran “Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri”.

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 40 (empat puluh) indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebanyak 20 (dua puluh) indikator kinerja berhasil mencapai dan melampaui target dan 16 (delapan belas) indikator kinerja belum mencapai target, 2 (dua) indikator kinerja gagal dan 2 (dua) indikator kinerja tidak dapat diukur. Adapun rata-rata seluruh nilai capaian indikator kinerja yang mencapai atau melampaui target adalah 117,81%, dengan nilai tertinggi adalah 350% yaitu indikator kinerja “Tingkat partisipasi subuh berjamaah di mesjid/ mushola”, sedangkan indikator kinerja yang nilainya terendah 25,82% yaitu indikator kinerja “Jumlah Nagari tanggu Bencana”.

3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja daerah pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 704.001.176.363,- atau 93,10% dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp.756.245.092.968,-. Dari 20 (dua puluh) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis tertinggi adalah “Berkembangnya Ekonomi Kreatif” yaitu 99,93% dan terendah adalah “Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri” yaitu 31,93%.

4.2 SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Melakukan inovasi-inovasi baru serta penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang mendorong dalam pencapaian target kinerja;

2. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Pemerintah Kabupate Pesisir Selatan dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai agar pegawai dapat lebih cepat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat
3. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah (PD) secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah;
4. Meningkatkan kerjasama dan peran serta *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan pemerintah pusat, instansi pemerintah lainnya, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta elemen masyarakat lainnya dalam melaksanakan program-program pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Pahlawan No. 1 Painan 25611 Telp./Faks. (0756) 21601
E-mail: inspektoratpessel@yahoo.co.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini.

Painan, 30 Maret 2023

INSPEKTUR,


RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641112 199203 1 008



BUPATI PESISIR SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. RUSMA YUL ANWAR, M. Pd.**

Jabatan : Bupati Pesisir Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Painan, 31 Januari 2022



BUPATI PESISIR SELATAN

Drs. RUSMA YUL ANWAR, M. Pd.

**PERJANJIAN KINERJA BUPATI PESISIR SELATAN
TAHUN 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1.1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP
		1.2. Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	70,00 (BB)
		1.3. Skor Nilai LPPD	3.2150
		1.4. Level Maturitas SPIP Pemda	3 (30057)
2.	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	2.1. Indek Kelembagaan	P-3 (cukup efektif)
		2.2. Indek SPBE	320
		2.3. Indek Inovasi Daerah	6,300
		2.4. Indeks Profesional ASN	62
3.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	3.1. Kategori Keterbukaan Informasi Publik	93 (informatif)
		3.2. Indek Kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik	82
4.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	4.1. Angka Kematian Bayi	8
		4.2. Angka Kematian Ibu	95
		4.3. Prevalensi Stunting	10.92
		4.5. Angka Kesakitan	15.95
5.	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat	5.1. Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan	80
6.	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	6.1. Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	53
7.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	7.1. Pencapaian skor pola pangan harapan	87
		7.2. Pengeluaran perkapita	9,369,000
8.	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	8.1. Nilai investasi swasta dan masyarakat	310,000
9.	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	9.1. Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	3.61
		9.2. Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	707,32
10.	Menurunnya Pengangguran	10.1. Tingkat Pengangguran terbuka	6.85
11.	Meningkatnya kualitas infrastruktur	11.1. Persentase jalan kabupaten kondisi baik	31.90
		11.2. Rasio konektivitas	57
		11.3. Proposi lahan sawah beririgasi baik	59.20
12.	Terjaminnya Kelestarian Lingkungan	12.1 Indek kualitas lingkungan hidup	86.85
13.	Pesisir Selatan menjadi daerah tujuan wisata favorit di Pantai Barat Indonesia	13.1 Jumlah kunjungan wisatawan	1,200,000
		13.2. Lama tinggal wisatawan	1.25
14.	Berkembangnya Ekonomi Kreatif	14. Jumlah omset ekonomi kreatif	18
15.	Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan	15. Harapan lama sekolah	13.40
		15.2. Rata-rata lama sekolah	8.32

16.	Meningkatnya Daya Saing Pendidikan	16.1. Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat provinsi	4
		16.2. Indeks Pembangunan literasi masyarakat	6,643
17.	Meningkatnya Pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	17.1. Pemenuhan membayar zakat harta	96.5
		17.2. Tingkat partisipasi subuh berjamaah di mesjid/mushola	Rendah (<10 orang)
18.	Meningkatnya SDM kreatif dan berdaya saing	18.1. Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional	10
		18.2. Jumlah wirausahawan yang berdaya saing	500
19.	Terwujudnya Keluarga Bahagia	19.1. Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	0.0008
		19.2. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	91,0944
20.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri	20.1. Indeks pemberdayaan gender (IGD)	56.93
		20.2. Jumlah nagari tangguh bencana	pratama (182) madya (0) utama (0)

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4,878,806,304	
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PROGRAM DUKUNGAN	855,498,154	
3	PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	23,079,193,488	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1,237,192,060	
5	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	33,480,750	
6	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	140,750,687,133	
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	73,707,520	
8	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	457,656,866	
9	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	675,000,000	
10	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	175,919,970	
11	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	45,125,220,161	
12	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	148,800,000	
13	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	315,416,360	

No.	Program	Anggaran	Keterangan
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	291,939,800	
15	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	8,488,997,474	
16	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	39,999,850	
17	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1,374,277,240	
18	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	46,500,000	
19	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	63,387,400	
20	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	41,000,000	
21	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	19,055,409,405	
22	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7,012,108,790	
23	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1,292,100,549	
24	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4,111,049,064	
25	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4,570,117,941	
26	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2,337,080,653	
27	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1,892,394,516	
28	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	104,695,059,916	
29	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	232,035,400	
30	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	897,099,260	
31	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	35,742,300	
32	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2,400,079,158	
33	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	440,207,024	
34	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	134,745,000	
35	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3,433,033,550	
36	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2,420,072,000	
37	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	198,214,086	

No.	Program	Anggaran	Keterangan
38	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	37,297,310	
39	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	416,450,920	
40	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	74,548,870	
41	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	109,482,900	
42	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	411,223,330	
43	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	85,262,500	
44	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	44,582,330	
45	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	44,364,360	
46	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	175,712,610	
47	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	69,792,490	
48	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	142,653,398	
49	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	70,001,592	
50	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	408,189,040	
51	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	8,114,221,160	
52	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	12,706,991,670	
53	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	473,042,700	
54	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	130,097,760	
55	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	464,539,200	
56	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3,051,736,256	
57	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	7,499,983,700	
58	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	149,999,850	
59	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	72,101,440	
60	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	29,999,960	

No.	Program	Anggaran	Keterangan
61	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	4,358,417,458	
62	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1,724,634,350	
63	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	673,128,186	
64	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	767,330,650	
65	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2,550,075,200	
66	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	230,304,000	
67	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	178,186,800	
68	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	644,620,970	
69	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	199,999,815	
70	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	5,274,999,000	
71	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2,464,999,920	
72	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	42,999,980	
73	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	34,999,990	
74	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	59,999,864	
75	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	40,000,000	
76	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	61,999,790	
77	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	30,000,000	
78	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	79,999,990	
79	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2,308,766,738	
80	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1,729,201,270	
81	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	14,299,970	

No.	Program	Anggaran	Keterangan
82	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	102,986,620	
83	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	114,866,490	
84	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	30,739,950	
85	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7,633,369,940	
86	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	28,685,510	
87	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	44,999,730	
88	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	21,857,010	
89	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	38,419,741	
90	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	404,200,000	
91	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	88,450,160	
92	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	305,050,000	
93	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	889,820,620	
94	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	77,473,890	
95	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	214,998,840	
96	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	47,128,270	
97	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	16,901,932,090	
98	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	25,000,000	
99	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	64,799,880	
100	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	584,999,720	
101	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	841,307,970	
102	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	233,467,596	

No.	Program	Anggaran	Keterangan
103	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	253,730,596,635	
104	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	865,936,784	
105	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1,488,979,308	
106	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	199,435,164	
107	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	531,482,694	
108	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	292,179,728	
109	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	716,832,020	
110	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1,552,322,540	
111	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	90,744,572	
112	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1,125,087,631	
113	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	20,026,930	
114	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	86,080,192	
115	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1,184,585,916	
116	PROGRAM Penanggulangan Bencana	8,288,637,574	
117	PROGRAM Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	266,154,276	
118	PROGRAM Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2,384,198,060	
119	PROGRAM Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	10,065,042,029	

No.	Program	Anggaran	Keterangan
120	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1,897,297,569	
121	PROGRAM PEMBERD AYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	611,301,390	
122	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	69,287,410	
123	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	368,523,410	
124	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	156,338,680	
	Total Anggaran	756,246,092,968	

Painan 21 Januari 2022

BUPATI PESISIR SELATAN



Drs. RUSMA YUL ANWAR M.Pd.